

**PENDIDIKAN DI MAKASSAR
PADA MASA PENDUDUKAN JEPANG 1942-1945**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Ilmu Budaya Pada Jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Hasanuddin**

Oleh :

CITRA DEWI NILASARI

Stambuk F811 03 010

No. Pendaftaran	2 - 06 - 08
Aspek	Sastra
Bahasa	1 ely
Harga	Harbis
No. Buku	54
Stempel	

MAKASSAR

2008

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi

PENDIDIKAN DI MAKASSAR PADA MASA PENDUDUKAN JEPANG (1942-1945)

Disusun dan diajukan oleh:

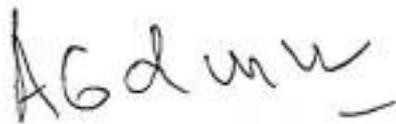
Citra Dewi Nilasari

F 811 03 010

Telah dipertahankan didepan panitia Ujian Skripsi
Pada tanggal 16 Mei 2008

Menyetujui,

Pembimbing I



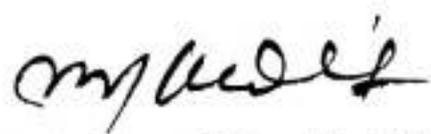
Dr. A. Rasyid Asba, M.A

Pembimbing II



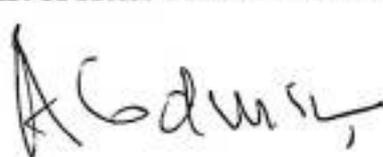
Dra. Nahdia Nur, M.hum

Dekan
Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Hasanuddin 



Dr. Muhammad Darwis, M.S

Ketua Jurusan Ilmu Sejarah
Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Hasanuddin



Dr. A. Rasyid Asba, M.A

HALAMAN PENERIMAAN

JUDUL : Pendidikan Di Makassar Pada Masa
Pendudukan Jepang (1942-1945)
NAMA : Citra Dewi Nilasari
N I M : F 811 03 010
PROGRAM STUDI : Ilmu Sejarah
JURUSAN : Ilmu Sejarah

Telah diperiksa dan disahkan oleh panitia Ujian Sarjana
Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin, Pada hari Jumat, 16
Mei 2008 dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1)
pada Jurusan Ilmu Sejarah.

Makassar, 16 Mei 2008

Panitia Ujian Skripsi

Ketua : Dr. Edward L. Poelinggomang

(.....)

Sekretaris : Dra. Nahdia Nur, M.Hum

(.....)

Penguji I : Dr. Bambang Sulistyo

(.....)

Penguji II : Dr. Edward L. Poelinggomang

(.....)

Konsultan I : Dr. A. Rasyid Asba, M.A.

(.....)

Konsultan II : Dra. Nahdia Nur, M.Hum

(.....)

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, atas limpahan Rahmat dan Taufik-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini walaupun dalam bentuk yang sangat sederhana. Dalam penyusunan skripsi ini Penulis mengalami banyak hambatan dan tantangan, terutama waktu yang begitu sangat mengejar sehingga penulis harus mampu berpacu mengarungi tantangan dengan memanfaatkan waktu yang ada. Namun penulis dapat jadikan sebagai suatu motivasi dan dorongan untuk tetap maju dan tegar menghadapi tantangan tersebut dengan suatu tekad dan harus selesai dengan kemampuan yang ada pada diri penulis.

Skripsi ini disusun sebagai dan merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan tugas akhir/studi pada Strata Satu (S1) pada Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin. Sebagai manusia biasa dalam masih proses, Penulis menyadari bahwa karya ini masih banyak kekurangan dan ketidaksempurnaan dari berbagai aspeknya. Oleh karena itu, Segala bentuk kritik dan saran yang sifatnya membangun senantiasa diterima dengan lapang dada guna penyempurnaan penulisan ini.

Dalam kesempatan ini penulis menghaturkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda Aco Waris dan Ibunda Taslang, serta tanteku A. misnawati atas doa tulus, kasih sayang, pengorbanan, pengertian dan kepercayaan dalam mendidik serta membesarkan penulis dengan penuh kesabaran,

semoga Allah SWT senantiasa mencintai dan menyayangi beliau serta semua keluargaku yang telah memberikan semangat dan motivasinya

Penghargaan dan ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. dr Idrus Paturusi selaku Rektor Universitas Hasanuddin
2. Bapak Dr. H. Muh. Darwis, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Budaya, Pembantu Dekan I, Pembantu Dekan II, dan Pembantu Dekan III.
3. Bapak Dr. Abd. Rasyid Asba, MA, dan Dra. Nahdia Nur, M.Hum, yang telah bersedia menjadi pembimbing, yang telah bersusah payah meluangkan waktunya memberikan bimbingan dan petunjuk dalam penulisan Skripsi ini.
4. Bapak Dr. Abd. Rasyid Asba, MA selaku Ketua Jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya, dan kepada seluruh staf pengajar jurusan Ilmu Sejarah yang telah memberikan bantuan dan bimbingannya serta sebagian ilmunya sejak mulai menduduki bangku kuliah sampai tahap akhir penyelesaian Skripsi ini.
5. Kepada sahabat-sahabatku senasib dan seperjuangan, saudaraku Hasriani (terima kasih atas waktu, pengertiannya, dan dorongannya selama ini), Sahabatku sekaligus kakakku Ria (terimakasih atas semua bantuannya selama mulai dari saya mau seminar judul sampai selesainya penulisan Skripsi ini yang senantiasa memberikan semangat kepada penulis), kawan-kawan terbaikku Ira, warma, marwan, Uchu, Taufiq, Ellenk, Chua, mardan, dan semua teman-teman di Jurusan Ilmu Sejarah yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas semua bantuan, canda tawanya dalam suka maupun duka selama bersama-sama dibangku kuliah karena tanpa kalian semuanya tidak akan terasa indah untuk

dijalani, semoga semua yang telah kita lewati dapat bernilai ibadah dan dijadikan jejak sejarah yang dapat dikenang di hari esok dan terus berjuang kawan.

6. Buat teman-teman KKN Reguler posko Bomach (Bantaeng), ada Mumun, Abank, Nuno, Ome, Anty, Dilla and yanti, makasih atas kebersamaan, persaudaraan, dan segala motivasi serta inspirasi yang telah diberikan kepada penulis.
7. Semua kawan-kawan Angkatan 2003 (Prosa '03) atas kebersamaan dan kerjasamanya selama ini.

Semoga Allah SWT membalas budi baik semua pihak yang telah penulis sebutkan diatas. Akhir kata, meskipun telah bekerja dengan semaksimal mungkin Skripsi ini tentunya tidak luput dari berbagai kekurangan. Harapan penulis apa yang di paparkan dalam skripsi ini dapat memberikan manfaat pada pembaca. Wassalam

Makassar, 2007

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vi
ABSTRAK	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Penelitian	1
B. Alasan Memilih Judul.....	7
C. Rumusan Masalah Dan Fokus Penelitian	10
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	12
E. Metodologi.....	13
BAB II MAKASSAR DALAM DUNIA PENDIDIKAN	15
A. Gambaran Umum Kota Makassar	15
1. Latar Geografis	15
2. Kondisi Sosial Politik Kota Makassar Sebelum Kemerdekaan	16
3. Kondisi Ekonomi	23
B. Latar Historis Pendidikan Di Makassar.....	25
1. Sekilas Sejarah Pendidikan Pra-Politik Etis Di Indonesia	29

C. Sejarah Pendidikan Di Makassar.....	35
1. Latar Historis	35
2. Pendidikan Tradisional.....	37
3. Pendidikan Modern	40
D. Sistem Penerimaan Siswa	46
E. Reaksi Masyarakat Terhadap Pendidikan.....	49
BAB III PENDIDIKAN PADA MASA PENDUDUKAN JEPANG	51
A. Perkembangan Pendidikan Dan Sebarannya Sebelum Kedatangan Tentara Jepang	51
B. Kedatangan Tentara Jepang	58
C. Sistem Pemerintahan Jepang.....	62
D. Kebijakan-Kebijakan Pendudukan Jepang Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan	68
1. Sebaran Dan Jenis Sekolah.....	72
2. Kurikulum Yang Digunakan.....	75
3. Keadaan Guru Dan Murid	77
BAB IV PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP MASYARAKAT	82
A. Peranan Dan Fungsi Pendidikan Terhadap Gerakan Nasionalisme	83
B. Kendala-kendala Yang Dihadapi Terhadap Perkembangan Pendidikan.....	86

C. Dampak Pendidikan Terhadap Kehidupan Sosial	
Masyarakat	90
D. Dampak Pendidikan terhadap Budaya Lokal.....	91
BAB V KESIMPULAN.....	93
DAFTAR PUSTAKA.....	96

ABSTRAK

Citra Dewi Nilasari, **"Pendidikan Di Makassar Pada Masa Pendudukan Jepang 1942-1945"** dibimbing Abd. Rasyid Asba dan Nahdia Nur.

Dalam penelitian ini penulis membahas tentang Perkembangan Pendidikan Di Makassar Pada Masa Pendudukan Jepang 1942-1945. Tujuan dari studi ini difokuskan pada kebijakan-kebijakan yang diterapkan pendudukan Jepang di bidang pendidikan yang meliputi latar belakang, jenis-jenis sekolah, lama studi, sekolah yang diizinkan beroperasi dan tidak, sekolah baru yang dibangun dan kurikulum yang digunakan. Perubahan dan penyeragaman kurikulum dilakukan guna memenuhi kebutuhan angkatan perang Jepang melawan sekutu memberi dampak pada kehidupan masyarakat di Makassar, baik terhadap gerakan nasionalisme, kehidupan sosial politik masyarakat maupun budaya.

Dengan menggunakan metode sejarah yang deskriptif analitis, penelitian ini membahas tentang Makassar sebagai pusat pemerintahan pendudukan Jepang dengan aktivitasnya di bidang pendidikan. Walaupun pendudukan Jepang hanya melanjutkan apa yang telah dirintis oleh Belanda tetapi model pendidikan yang dikembangkan disesuaikan dengan kebutuhan perang Jepang melawan sekutu, yakni pendidikan yang lebih bersifat vokasional dibanding bersifat akademis.

Hasil studi ini menunjukkan bahwa pendidikan yang diselenggarakan Jepang di Makassar dilatarbelakangi oleh kepentingan politis dalam peperangan melawan sekutu dan propaganda "kemakmuran bersama Nippon" dan menganggap dirinya sebagai saudara tua masyarakat Indonesia. Model pendidikan dasar yang diskriminatif yang dikembangkan oleh Belanda diubah menjadi model pendidikan dasar dengan hanya satu sekolah dasar yakni Sekolah Rakyat dengan masa studi yang seragam pula, yakni enam tahun. Sekolah yang dicurigai pro Belanda dan dianggap mengancam kedudukan Jepang ditutup. Dampaknya pendidikan terhadap gerakan nasionalisme, kehidupan sosial politik dan budaya sangat besar mulai dari terbangunnya rasa nasionalisme yang didukung oleh semangat optimisme dalam mencapai kemerdekaan, pemakaian bahasa Indonesia hingga muncul kelompok sosial baru yakni kelompok intelektual di tengah-tengah masyarakat.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Penelitian

Pendidikan bukanlah suatu yang otonom melainkan senantiasa dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan politik, sosial, ekonomi, kultural, sehingga seringkali pendidikan dipandang sebagai alat politik untuk mengatur dan menguasai perkembangan suatu bangsa. Walaupun politik sendiri tidak lepas dari pengaruh sosial, ekonomi dan budaya.¹

Bagi bangsa Indonesia pada saat pembangunan bangsa (*nations building*), pendidikan mempunyai peranan penting dalam membangun kesadaran nasional sebagai salah satu sumber daya mental dalam proses pembangunan kepribadian dan identitas nasional. Struktur kepribadian nasional tersusun dari karakteristik (perwatakan) yang tumbuh dan melembaga dalam suatu pengalaman panjang berlangsungnya kehidupan bangsa. Sehingga dengan demikian dapat dikatakan bahwa peran pendidikan bukan hanya berpengaruh dalam kehidupan nasional saja, tetapi juga dalam kehidupan yang lebih luas, pendidikan merupakan penentu nasib suatu negara, karena tanpa pendidikan suatu bangsa akan mengalami keterbelakangan dan kebodohan. Jadi fungsi pendidikan di sini salah satunya adalah menjadi faktor yang dapat mempercepat perubahan dalam kehidupan bermasyarakat.

¹ S. Nasution, Sejarah Pendidikan Indonesia, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2001), hlm. iii.



Anggapan umum yang mengatakan bahwa intervensi asing (baca: pemerinatah kolonial Belanda) dalam bidang pendidikan, bangsa Indonesia adalah bangsa yang buta huruf. Kalau yang dimaksud adalah buta huruf latin mungkin benar, akan tetapi kalau buta huruf tradisional-lokal, realitas sejarah tidak dapat menerima anggapan tersebut, karena jauh sebelum kedatangan bangsa Eropa, masyarakat di Makassar pada umumnya bisa membaca dan menulis. Hanya saja kemampuannya itu terbatas pada “melek” huruf tradisional-lokal yang dipelajari melalui sistem pendidikan yang sederhana, dan kemudian dikenal dengan pendidikan tradisional.²

Pada zaman Hindu dan Budha misalnya, pendidikan tradisional berjalan dengan baik dan telah menghasilkan karya-karya yang terkenal, seperti Pararaton dan Negara Kertagama.³ Akan tetapi pendidikan hanya dinikmati oleh kelas Brahmana, yang merupakan kelas teratas dalam kasta Hindu. Yang dipelajari umumnya teologi, sastra, bahasa, ilmu pasti, dan ilmu seni bangunan. Sejarah mencatat, kerajaan-kerajaan Hindu seperti Kalingga, Kediri, Singosari, dan Majapahit, melahirkan para empu, punjanga, karya sastra, dan seni yang hebat.⁴ Pendidikan yang diutamakan

² Sarkawai, Dari Huruf Lontara Ke Latin, Pergeseran Pendidikan Tradisional Ke Kolonial Di Makassar dalam <http://article.melayuonline.com> Edisi 09 Agustus 2007 15:47. Diakses 23 Januari 2008.

³ Sarkawi, *Ibid.*

⁴ Padepokan adalah model pendidikan zaman Hindu yang dikelola oleh seorang guru/bengawan dan murid/cantrik mempelajari ilmu bersifat umum, religius, dan juga kesaktian. Murid di Padepokan bisa keluar masuk bila merasa cukup atau tidak puas dengan pengajaran yang diberikan guru. Lihat <http://yherlanti.wordpress.com/2008/01/11/perjalanan-kurikulum-pendidikan-di-indonesia-dari-masa-ke-masa/>, Perjalanan Kurikulum Pendidikan Di Indonesia Dari Masa Ke Masa, Edisi 11 Januari 2008. Diakses 22 Januari 2008.

pada zaman itu adalah pendidikan keagamaan, pemerintahan, strategi perang dan ilmu kekebalan, kemahiran menunggang kuda, dan memainkan senjata tajam.⁵

Seperti halnya pada zaman Hindu dan Budha, ketika Islam masuk dan berkembang di Nusantara, aspek pendidikan menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Sistem pendidikan yang banyak dianut dan dikembangkan pada masa itu adalah sistem pendidikan langgar dan pesantren.⁶ Pada zaman penyebaran Islam, pola pendidikan bernapaskan Islam menyebar dan mewarnai penyelenggaraan pendidikan. Pusat-pusat pendidikan tersebar di langgar, surau, masjid, dan pesantren⁷. Pendidikan di langgar diajarkan hal-hal yang bersifat dasar, sedangkan di pesantren lebih meningkat dan mendalam.

Ketika pendidikan kolonial mulai muncul dengan aturan dan sistemnya sendiri, maka pendidikan tradisional yang sudah menjadi bagian dari masyarakat mulai kehilangan pamor. Peran seorang pengajar yang memiliki kharisma di mata para siswanya, mulai digantikan dengan kehadiran seorang guru yang mengajarkan

⁵ Pendidikan dilakukan oleh para brahmana kepada siswa dalam jumlah terbatas pada suatu padepokan. Dengan kata lain, siswa tinggal serumah dengan guru dan istri guru dianggap sebagai ibu mereka. Sang guru dianggap sebagai seorang yang sakti sehingga ia sangat dihormati. Ia tidak mempunyai penghasilan tetap, tetapi sewaktu-waktu menerima pemberian sukarela dari orang tua siswa. Selain dengan sistem padepokan, seorang bangsawan, ksatria atau pejabat kerajaan lainnya meminta guru datang ke istana untuk mengajar putra-putrinya. Ary H. Gunawan, Kebijakan-Kebijakan Pendidikan di Indonesia, (Jakarta: Bina Aksara, 1986), hlm. 5-6. Lihat juga Sarkawi, *Ibid.*

⁶ Sarkawi, *Ibid.*

⁷ Pesantren adalah lembaga pendidikan formal tertua di Indonesia. Pesantren diajar oleh seorang kyai, dan santri/murid tinggal di pondok/asrama di sekitar pesantren. Lihat <http://yherlanti.wordpress.com/2008/01/11/perjalanan-kurikulum-pendidikan-di-indonesia-dari-masa-ke-masa/>, Perjalanan Kurikulum Pendidikan Di Indonesia Dari Masa Ke Masa, Edisi 11 Januari 2008. Diakses 22 Januari 2008.



pelajaran umum di kelas. Munculnya banyak sekolah "kolonial" tersebut juga berkaitan dengan perubahan arah kebijakan pemerintah kolonial pada awal abad ke-20. Eksploitasi terhadap bangsa Indonesia sebagai pembenaran utama atas kekuasaannya mulai berkurang dan digantikan dengan pernyataan-pernyataan keprihatinan atas kesejahteraan bangsa Indonesia.⁸

Penyelenggaraan pendidikan modern oleh Pemerintah kolonial Belanda di Indonesia tidak terlepas dari penerapan kebijakan politik etis dengan diadakannya peraturan mengenai pendirian sekolah desa (*volkschool*) dengan lama pendidikan selama tiga tahun. Pendidikan yang diperuntukkan bagi pribumi masih setengah hati, terbatas dan sangat diskriminatif. Tidak semua lapisan masyarakat mendapat hak untuk memperoleh pendidikan yang sama karena pertimbangan politis. Alasan lainnya adalah untuk mendapatkan dan memenuhi kebutuhan akan tenaga administrasi pada Birokrasi Pemerintah kolonial dan tenaga kerja pada perusahaan/industri milik kolonial dengan upah yang murah.

Pada masa pendudukan Jepang, pendidikan dengan sistem Barat yang diperkenalkan oleh kolonial Belanda kemudian diubah menjadi pendidikan dengan sistem Jepang. Perubahan-perubahan yang dilakukan antara lain; *pertama*, menghapus jenis-jenis pendidikan rendah berdasarkan golongan-golongan penduduk dan kemudian menetapkan hanya satu jenis sekolah untuk semua lapisan masyarakat. *Kedua*, lama studi sekolah desa yang semula hanya tiga tahun kemudiat

⁸ M.C. Ricklefs, Sejarah Indonesia Modern, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1995), hlm. 227.

diseragamkan menjadi enam tahun di semua wilayah pendudukan Jepang. Tujuannya adalah untuk memudahkan pengawasan sekolah. Dan *ketiga*, materi yang diajarkanpun diubah berdasarkan kurikulum ala Jepang.

Kebijakan-kebijakan yang dilakukan Jepang dalam menyelenggarakan pendidikan di masa pendudukan, antara lain sebagai berikut:

- (1) Pendidikan Dasar (*Kokumin Gakko*/Sekolah Rakyat) dengan masa studi 6 tahun merupakan sekolah pertama yang merupakan konversi nama dari Sekolah Dasar 3 atau 5 tahun bagi pribumi pada masa Hindia Belanda. Secara keseluruhan di wilayah Makassar ada sekitar 33 buah Sekolah Rakyat (SR) atau *Futsu U Ko Gakko*.
- (2) Pendidikan Lanjutan yang terdiri dari *Shoto Chu Gakko* (Sekolah Menengah Pertama) dengan masa studi 3 tahun dan *Koto Chu Gakko* (Sekolah Menengah Tinggi) juga dengan masa studi 3 tahun. *Normaal School* sebagai sekolah lanjutan dari *Vervolg School* diubah namanya menjadi *Sihan Gakko*. Sementara sekolah menengah seperti MULO diganti namanya menjadi *Cu Gakko*.⁹
- (3) Sekolah guru *Cursus voor Onderwijs* (CVO) dengan masa kursus dua tahun dan *Opleidingschool voor Onderwijs* (OVO) dengan lama studi tiga

⁹ Sekolah MULO mendapat perhatian utama pendudukan Jepang dan mendatangkan guru khusus dari Jepang yang bernama Dr. Herota (dosen ilmu ekonomi Universitas Kobe) untuk dijadikan kepala sekolah *Cu Gakko* lengkap dengan pemberian pangkat militer kepadanya, yakni Kolonel Tituler. Mardanas Safwan dan Sutrisno Kuntoyo (ed)., Lihat Mardanas Safwan dan Sutrisno Kuntoyo (ed)., Sejarah Pendidikan Sulawesi Selatan, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Sulawesi Selatan, 1980/1981), hlm. 100.

tahun zaman Belanda dilebur menjadi satu dan namanya diganti menjadi *Kio In Yoseiyo*.

(4) Pendidikan Kejuruan meliputi sekolah lanjutan yang bersifat vokasional seperti di bidang pertukangan, pelayaran, pendidikan, teknik, dan pertanian *Noogyo Zitsumu Gakko*.

(4) Pendidikan Tinggi.

Sebagai langkah awal, Jepang kemudian menawarkan konsep Pusat Tenaga Rakyat (PUTERA) dan kemudian *Seinendan*, *Kaihodan*, *Bogodan*, yang dilatih secara kemiliteran serta perkumpulan wanita yang bernama *Hahanokai* yang bertugas pada dapur umum atau menghibur tentara yang sedang berjuang di garis depan. Tetapi kebanyakan tugas dari *Hahanokai* adalah mempersiapkan perbekalan bagi tentara Jepang dan menghibur orang-orang Jepang, terutama para opsir Jepang yang baru kembali dari garis depan.¹⁰

Di Sulawesi Selatan pada masa pendudukan Jepang, semua hal yang berkaitan dengan pendidikan yang ditinggalkan oleh kolonial Belanda ditangani *Celebes Meisebu Bukiyokatyō* yang berkedudukan di Makassar.¹¹ Badan ini dibentuk, di samping untuk memudahkan pengawasan terhadap sekolah-sekolah di Makassar dan Sulawesi Selatan pada umumnya, juga untuk mengelola dan menyusun materi pengajaran. Bagi masyarakat di Makassar penyeragaman di dalam bidang pendidikan disambut baik karena tidak ada lagi diskriminasi, terbuka dan demokratis.

¹⁰ <http://www.pakguruonline.pendidikan.net/sjh-pendidikan-sumatera-barat.rtf>

¹¹ Lihat Mardanas Safwan dan Sutrisno Kuntoyo (ed.), *Op. Cit.*, hlm. 51-52.

Sebenarnya perubahan-perubahan yang dilakukan Pendudukan Jepang tidak terlepas dari tujuan politik angkatan militer Jepang melawan sekutu. Tujuan politik tersebut di samping dimaksudkan sebagai persiapan dan sekaligus propaganda melawan sekutu juga untuk memenuhi kebutuhan perang Jepang.

B. Alasan Memilih Judul

Ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan dua faktor utama yang selalu mempercepat terjadinya perubahan dalam masyarakat. Apalagi saat ini, ilmu pengetahuan dan teknologi mengalami kemajuan yang sangat pesat dan tidak pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah peradaban manusia. Perubahan-perubahan terjadi mengikuti semangat zaman yang ditopang dan disponsori oleh ilmu pengetahuan dan teknologi yang ditandai oleh jangka waktu perubahan kebudayaan yang dramatis.

Begitupula perubahan-perubahan yang terjadi di Makassar setelah masuknya pendidikan modern. Perubahan-perubahan di bidang pendidikan itu jelas terlihat, bukan hanya pada pergantian "aktor" penyelenggara pendidikan tetapi melainkan juga pada perubahan sistem dan kebijakan-kebijakan pendidikan. Konsekuensi perubahan ini sebagai kenyataan hidup yang baru bagi pemuda terdidik di Makassar memberi dampak psikologis terutama terbangunnya jiwa nasionalisme dan patriotisme mereka. Dengan pendidikan pula wawasan mereka bertambah lebih luas dan terbuka serta mengerti perkembangan yang berlangsung di dunia Internasional. Untuk dapat menyesuaikan diri dengan keadaan yang selalu berubah-ubah itu, pendidikan dan belajar terus menerus merupakan solusi terbaik untuk menjawabnya.

Pada masa pendudukan Jepang, sistem penyelenggaraan pendidikan di Makassar mengalami perubahan-perubahan yang cukup signifikan, mulai penyeragaman jenis sekolah, lama studi sampai penggunaan kurikulum pengajaran. Lembaga pendidikan dengan struktur yang baru (non formal) juga ikut dibentuk untuk memenuhi kebutuhan militer Jepang melawan sekutu.

Menariknya adalah kebijaksanaan dan sistem pendidikan yang ditempuh Jepang selama masa pendudukan diadopsi oleh pemerintah Republik Indonesia setelah kemerdekaan bahkan hingga sekarang¹². Dengan demikian menjadi sangat penting untuk mengetahui latar belakang kegiatan pendidikan yang diterapkan Jepang di Indonesia, bukan hanya itu latar belakang, pengaruh, kebijakan-kebijakan, bahkan hingga pada reaksi masyarakat dan dampaknya perlu ditelusuri dan dilacak secara objektif.

Selain itu, untuk menghilangkan pengaruh Belanda di bidang pendidikan, Jepang sempat melakukan pembekuan sekolah selama 3 bulan pada masa awal pendudukannya dan sterilisasi (razia) buku-buku berbahasa Belanda dan guru-guru yang pro Belanda. Untuk mengatasi langkanya buku-buku pelajaran, maka translasi

¹² Sebagai contoh, dapat dilihat dari model pendidikan nasional yang dikembangkan pemerintah mulai dari tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan masa studi yang sama pula merupakan model pendidikan sekolah yang digunakan pada zaman Jepang. Hanya saja materi kurikulum yang digunakan kemudian dipadukan dengan model pendidikan yang digunakan pada zaman Belanda, yakni antara "semi" vokasional dan akademis. Akan tetapi secara umum, dapat dikatakan tidak banyak yang berbeda. Jika pada zaman Jepang, rutinitas siswa di sekolah dimulai dengan menyanyikan lagu kebangsaan Jepang, *kimigayo* setiap pagi dan mengibarkan bendera Jepang *Hinomura, taiko*, latihan baris berbaris, siswa pakai topi hingga kegiatan kerja bakti, maka sekarang hal tersebut masih dilakukan seperti upacara bendera dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya pada setiap hari Senin, senam pagi, kegiatan kerja bakti dan masih banyak yang lainnya. Untuk lebih jelasnya akan dibahas lebih detail di Bab III.

buku-buku yang berbahasa Belanda ke dalam bahasa Melayu (Indonesia) terpaksa dilakukan. Kemudian guru-guru yang dianggap pro Belanda ditawan dengan alasan gerakan spionase terhadap pendudukan Jepang. Akibatnya banyak guru-guru terutama berasal dari Ambon dan Manado bersembunyi dan lari kepedalaman, berganti profesi dan kurang bergairah dalam mengajar.¹³ Pengecualian bagi guru-guru yang sebelumnya memang anti Belanda.

Budaya disiplin yang telah ditanamkan semenjak Belanda menangani pendidikan kembali diberlakukan, bahkan lebih ditingkatkan lagi. Pendidikan sekolah ala "militer" yang diterapkan Jepang lebih bersifat vokasional dibanding akademis seperti indoktrinasi dan propaganda Jepang dan baris-berbaris. Menghardik dan memukul yang dilakukan guru terhadap murid ikut mewarnai perjalanan pendidikan pada masa pendudukan Jepang.

Sementara perkembangan pendidikan yang dikelola oleh swasta seperti Muhammadiyah, Zending, Misi Katolik justru dibekukan, kecuali bagi sekolah yang bersedia menerima peraturan dan syarat-syarat yang ditawarkan pihak Jepang. Sekolah swasta yang dibiarkan buka tetap diawasi dengan ketat. Sekolah-sekolah yang jauh dari pengawasan Jepang dan dianggap pro Belanda kemudian ikut ditutup dan murid-muridnya digabung dengan sekolah-sekolah terdekat.

¹³ Ada juga yang dipanggil kembali tetapi bukan sebagai guru untuk mengajar melainkan sebagai mandor untuk memimpin (mengawasi) pengerjaan perbaikan-perbaikan dan pengerjaan lapangan seperti Lapangan Udara Mandai dan lain sebagainya.. Lihat Mardanas Safwan dan Sutrisno Kuntoyo (ed)., *Ibid*, hlm. 99.

Berdasarkan dengan hal tersebut di atas, maka **Pendidikan Di Makassar Pada Masa Pendudukan Jepang 1942-1945** menjadi topik yang menarik untuk dikaji, karena kolerasinya dengan perkembangan pendidikan masa kini masih dapat dilacak dan ditelusuri. Ternyata banyak kebijakan-kebijakan di bidang pendidikan di Makassar Zaman Jepang masih diterapkan hingga sekarang, ataupun merupakan adaptasi dan pengembangannya.

C. Rumusan Masalah Dan Fokus Penelitian

Berangkat dari permasalahan yang kompleks yang dihadapi penulis dalam menelaah pendidikan di masa pendudukan Jepang, maka diperlukan suatu pendekatan sejarah yang kritis-objektif (ilmiah) agar dapat mengungkap secara jelas pokok-pokok permasalahan yang sesungguhnya. Untuk merealisasikan maksud tersebut, kompleksitas permasalahan akan dirumuskan dan selanjutnya direduksi menjadi pertanyaan-pertanyaan yang sistematis sehingga dapat dianggap mewakili dari totalitas permasalahan yang ada.

Fokus perhatian terhadap kompleksitas permasalahan terletak kebijakan-kebijakan di bidang pendidikan dan dampaknya terhadap perkembangan pendidikan menurut analisa awal penulis dari penelusuran data-data kepustakaan, diperoleh hipotesis bahwa (1) dibanding dengan sistem pendidikan yang diterapkan masa pemerintahan Belanda, maka sistem pendidikan yang diterapkan pendudukan Jepang di Makassar lebih baik dan disambut dengan baik oleh masyarakat karena sistem operasionalnya lebih terbuka, demokratis dan tidak diskriminatif berdasarkan golongan (ras) dan status sosial. Hipotesis ini didukung oleh argumen: penyeragaman

semua jenis sekolah baik ditingkat dasar maupun tingkat lanjutan dengan lama studi yang sama, yakni 6 tahun untuk sekolah tingkat dasar dalam hal ini Sekolah Rakyat (SR) dan 3 tahun untuk untuk sekolah lanjutan; (2) kebijakan perubahan melalui penyeragaman kurikulum atau materi pengajaran dan pembukaan sekolah-sekolah baru (sekolah non formal) dilakukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan perang Jepang melawan sekutu; dan (3) walaupun masa pendudukan Jepang sangat singkat, akan tetapi memberi pengaruh dan dampak yang signifikan bagi perkembangan pendidikan di Makassar khususnya pada pola pikir masyarakat, sosial budaya, dan politik (tokoh-tokoh pergerakan lokal-nasional)

Secara detail fokus perhatian akan diarahkan menjadi fokus penelitian yang dijabarkan sebagai berikut:

1. kebijakan-kebijakan apa yang diterapkan pendudukan Jepang dalam bidang pendidikan terutama dalam hal latar belakang, jenis-jenis sekolah, lama studi, sekolah yang boleh beroperasi dan tidak, sekolah yang baru dibangun dan kurikulum yang digunakan?
2. khusus mengenai kebijakan perubahan dan penyeragaman kurikulum yang digunakan dan sekolah baru yang dibuka, apakah perubahan dan penyeragaman kurikulum yang digunakan dan sekolah baru yang dibuka dilakukan guna untuk memenuhi kebutuhan angkatan perang Jepang melawan sekutu? dan
3. bagaimana dampak pendidikan terhadap kehidupan masyarakat?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendidikan di Makassar pada masa pendudukan Jepang 1942-1945. Secara operasional tujuannya adalah untuk mengetahui:

- 1 kebijakan-kebijakan yang diterapkan pendudukan Jepang dalam bidang pendidikan terutama dalam hal latar belakang, jenis-jenis sekolah, lama studi, sekolah yang boleh beroperasi dan tidak, sekolah yang baru dibangun dan kurikulum yang digunakan.
- 2 Apakah perubahan dan penyeragaman kurikulum yang digunakan dan sekolah baru yang dibuka betul-betul dilakukan untuk memenuhi kebutuhan angkatan perang Jepang melawan sekutu.
- 3 dampak pendidikan terhadap kehidupan masyarakat.

Sedangkan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Dari segi teoritis penelitian ini diharapkan dapat mengungkap temuan yang memperkaya literatur sejarah nasional, khususnya dimensi sejarah pendidikan sehingga dapat dijadikan bahan referensi para peneliti selanjutnya yang mengkaji dimensi yang sama.
2. Bagi Pemerintah kota Makassar, kiranya dapat mempertimbangkan penelitian ini dalam rangka pengembangan strategi pendidikan yang optimal ke depan nantinya.

E. Metodologi

Di dalam pemikiran analitis lazimnya suatu gejala sejarah hendak didefinisikan dalam suatu proses sejarah dan sekaligus melihat hubungan kausalitasnya dengan gejala sejarah yang lain, yakni yang terjadi sebelumnya atau sesudahnya atau ada hubungan fungsionalnya dalam konteks suatu sistem.

Tumbuh dan berkembangnya kehidupan masyarakat modern menuntut alat-alat intelektual yang dapat memahami lingkungan secara mendalam dan penuh arti, sehingga tidak terikat atau terpaku pada rasa keinginan belaka, dan mampu mengemansipasikan diri dari gejolak musim-musiman, lebih-lebih dari tekanan kekuatan sosial, dan seperti apa yang telah diucapkan langlois dan Seignobos, "Sejarah mempunyai pengaruh higienis terhadap jiwa kita karena membebaskan dari sifat percaya belaka".¹⁴

Dalam usaha mengungkapkan dan merekonstruksi objek permasalahan ini maka diperlukan cara kerja yang mantap agar dapat meringankan beban dan mengurangi kesulitan-kesulitan yang dihadapi penulis. Cara kerja yang dimaksud adalah metode sejarah yang meliputi :

1. Heuristik yang berupa studi pustaka (*library research*) dan studi arsip, yaitu pencarian dan pengumpulan data-data tertulis yang berhubungan dengan objek yang diteliti berupa buku-buku dan dokumen yang relevan yang terdapat di perpustakaan, artikel dan berbagai brosur atau surat-surat resmi

¹⁴ Sartono kartodirjo, Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah, (Jakarta : Gramedia Pustaka utama, 1992), hlm. 21.

yang ada hubungan atau kaitannya dengan penelitian tersebut. Tempat penulis mengadakan kegiatan pustaka adalah di perpustakaan Fakultas Sastra, Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin, Arsip Nasional Daerah Sulawesi Selatan, Perpustakaan Daerah, dan Internet.

2. Kritik Sumber melalui kritik intern dan ekstern terhadap berbagai macam buku, arsip, artikel, profil, laporan tahunan diperoleh dari kantor Pendidikan Nasional dan juga data dari kantor Badan Pusat Statistik Propinsi Sulawesi Selatan.
3. Interpretasi dan analisa, hal ini diperuntukkan kepada penulis setelah data-data sudah terkumpul itu kemudian dikelompokkan sesuai dengan tempat dan tahun, dengan tujuan agar penulis dapat mengetahui pasti mana data primer dan data sekunder, dan
4. Selanjutnya adalah historiografi atau penulisan sejarah.

Hal tersebut di atas dilakukan dengan mengingat bahwa sejarah sebagai ilmu dituntut objektivitasnya agar nilai-nilai ilmiahnya tetap terjaga. Namun disadari sepenuhnya bahwa subjektivitas penulis tidak mungkin dapat dihindari. Dengan demikian data dan keterangan atau sumber-sumber yang kredibilitas dan validitasnya dapat diterima kemudian dipergunakan untuk membuat sintesis dalam bentuk penulisan skripsi yang deskriptis analitis.

BAB II

MAKASSAR DALAM DUNIA PENDIDIKAN

A. Gambaran Umum Kota Makassar

1. Latar Geografis

Secara geografis, kota Makassar mempunyai posisi strategis karena berada di persimpangan jalur lalu lintas dari arah selatan dan utara dalam propinsi di Sulawesi, dari wilayah kawasan Barat ke wilayah kawasan Timur Indonesia dan dari wilayah utara ke wilayah selatan Indonesia. Letak wilayah kota Makassar secara astronomis terbentang antara titik koordinat $119^{\circ}18'27,97''$ Bujur Timur – $119^{\circ}32'31,03''$ Bujur Timur dan $5^{\circ}00'30,18''$ Lintang Selatan – $5^{\circ}14'6,49''$ Lintang Selatan.

Kota Makassar diapit oleh dua buah sungai, yakni Sungai Tallo yang bermuara di sebelah utara kota dan Sungai Jeneberang yang bermuara di sebelah selatan kota. Secara keseluruhan kota Makassar memiliki luas sekitar $175,77 \text{ Km}^2$ dan termasuk 11 pulau yang berada di Selat Makassar dengan luas wilayah perairan sekitar 100 km^2 yang berbatasan dengan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) di sebelah utara, Kabupaten Maros di sebelah timur, Kabupaten Gowa di sebelah selatan dan Selat Makassar di sebelah barat. Batas-batas kota tersebut sesungguhnya telah mengalami perubahan-perubahan sejak zaman kerajaan, kolonial, kemerdekaan dan masa-masa mutakhir.

Kondisi topografi Kota Makassar berada di dataran rendah dan berhadapan langsung dengan pantai Selat Makassar di sebelah barat pada ketinggian yang

bervariasi antara 1-25 meter di atas permukaan laut dan kemiringan 0-5⁰ ke arah barat. Berdasarkan data Stasiun Meteorologi Maritim Paotere, rata-rata kelembaban udara sekitar 81-91% dengan temperatur udara sekitar 26,7⁰ – 28,6⁰ C dan kecepatan angin kira-kira 3,4 knot.¹

2. Kondisi Sosial-Politik Kota Makassar Sebelum Kemerdekaan²

Jika dilihat dari latar historisnya, letak dan pusat kota Makassar³ sebenarnya tumbuh dari kota kolonial yang terbentuk hanya di sekitar benteng Rotterdam sekitar akhir abad ke-17. Pertumbuhan kota kemudian dengan munculnya permukiman-permukiman baru seperti *Vlaardingen* dan atau Kampung Baru di sekitar benteng sebagai pusat kekuasaan Belanda di Makassar dan Sulawesi selatan pada umumnya. Pemukiman-pemukiman baru tersebut dibangun oleh masyarakat yang beragam etnis seperti Melayu, Cina, Belanda, Bugis, Jawa, dan tentu saja kelompok masyarakat Makassar dari Gowa dan sekitarnya. Pertumbuhan kota juga diikuti dengan peningkatan jumlah populasi penduduk yang signifikan. Hingga tahun 1930 terdapat

¹ Zainal, Perkembangan Kantor Pos Besar Makassar 1945-1997, (Makassar: Skripsi Jurusan Ilmu Sejarah Unhas, 2003), hlm. 20, dan Sarnice Randan, Migrasi Orang Toraja Ke Kelurahan Paropo Kecamatan Panakukang Kotamadya Makassar Tahun 1950-1980 (Suatu Tinjauan Historis), (Makassar: Skripsi Jurusan Ilmu Sejarah Unhas, 2004), hlm. 11. Lihat juga <http://bappeda.makassar.go.id/index>, dipublikasikan 1 Januari 2008 dan diakses 28 Januari 2008.

² Untuk menjelaskan tentang topografi sosial-politik kota Makassar sebelum kemerdekaan, tulisan Dias Pradimara banyak membantu penulis. Adapun tulisan yang dimaksud adalah Sejarah Kota, Warga Kota Dan Penduduk Kota: Kisah Makassar terutama dengan sub judulnya: topografi politik kota kolonial Makassar.

³ Letak kota pada zaman kerajaan Gowa-Tallo, terletak di sekitar muara Sungai Jeneberang yang merupakan pusat kekuasaan dari kerajaan Gowa-Tallo. Tempat tersebut terletak di sebelah selatan kota Makassar saat ini.

hampir 3500 penduduk “Eropa,” lebih dari 15.000 Cina dan lebih dari 65 ribu Bumiputera dari berbagai daerah di Nusantara.⁴

Sekitar sepuluh tahun pertama abad ke-20, dengan jumlah penduduk yang demikian, kota Makassar berkembang menjadi kota yang kosmpolitan lengkap dengan segala fasilitasnya sehingga menjadikan kota ini sebagai bagian dari sebuah jaringan komunikasi dan transportasi yang menghubungkannya dengan segala penjuru dunia. Di *Pasarstraat* (sekarang Jl. Nusantara) setidaknya ada 3 toko pakaian besar seperti “*Hotchand Kemchand*,” “*Bombay Moerah*,” dan “*Liberty*.”⁵ Tidak jauh dari tempat itu, di *Tempelstraat* (sekarang Jl. Sulawesi), terdapat juga sebuah toko pakaian ala Prancis “*Au Bon Marche*”.⁶

Selain toko pakaian, ada juga tempat yang khusus melayani kebutuhan hasil peternakan seperti *boerderij* (Frisia) di Goaweg (sekarang Stadion Matoangin) yang menyediakan susu segar dari sapi Australia maupun sapi dari—seperti juga nama perusahaannya—Frisland di ujung utara Negeri Belanda. Pemiliknya adalah U. Hudoffsky (tampaknya keturunan Eropa Timur). Selain susu segar, tempat ini juga menyediakan yoghurt Bulgaria “asli,” dan mentega.⁷

⁴ Dias Pradadimara, Sejarah Kota, Warga Kota, Dan Penduduk Kota: Kisah Makassar, Manuskrip Tanpa Kota Penerbit, Penerbit dan Tahun diterbitkan, hlm. 3.

⁵ Nama-namanya mengindikasikan setidaknya dua dari tiga toko tersebut dimiliki oleh pedagang keturunan India.

⁶ Pada saat itu, ada beberapa tempat yang “berbau” ala Prancis seperti *Maiso* (Femina). Di pintunya ada petunjuk yang tertulis *dames* dan *heeren* jika ingin membukanya. Dias Pradadimara, *Ibid.*, hlm. 4.

⁷ *Ibid.*

Di bidang transportasi, tersedia beberapa perusahaan taksi yang siap mengantar. Banyak di antara penduduk kota memiliki kendaraan yang tergolong mewah pada saat itu, seperti sedan Italia, "Fiat," baik model yang paling irit ataupun yang paling gaya yaitu model 1500 sang "Kereta Ajaib." Ada juga yang memiliki sedan Amerika "Dodge," termasuk yang paling besar dan mewah Dodge-Six "De Luxe" dengan 7 tempat duduk. Semua mobil tersebut dapat dipesan langsung melalui telepon dengan pedagang mobil H.P. Lienhardt, di *Pasarstraat*.⁸

Kesan kosmopolitan kota Makassar didukung dengan hadirnya 9 konsulat yang berasal dari negara-negara di Eropa maupun Asia. Ke-9 konsulat itu mewakili Negara-negara Denmark, Swedia, Norwegia, Inggris, Perancis, Jerman, Belgia, Portugal, dan Cina di Makassar sebagai perwakilan dagang.

Perluasan dan pembangunan kota Makassar dimulai tahun-tahun pertama pada dekade awal abad ke-20 dan pada tahun 1938 kota Makassar menjadi sebuah kota besar kedua di luar Pulau Jawa setelah kota Palembang di Pulau Sumatera. Jika pada akhir abad ke-19 jumlah penduduk kota ini berada pada kisaran 20 ribu-an saja dan 1905 jumlah penduduk kota hanya diperkirakan 26 ribu orang, maka setelah penaklukan penguasa-penguasa lokal di Sulawesi Selatan oleh Pemerintah Hindia di tahun 1905-1906, jumlah penduduknya terus bertambah. Menurut hasil sensus tahun 1930, penduduk kota Makassar mencapai lebih dari 84 ribu orang.⁹

⁸ *Ibid.*

⁹ Pada saat itu sulit untuk mengetahui laju pertumbuhan penduduk karena tidak ada lagi penghitungan penduduk yang cukup tepat yang dilakukan hingga nanti setelah tahun 1960. Barbara Sillars Harvey,



Pada tahun 1938, penduduk kota Makassar sudah dilayani dengan fasilitas listrik, bahkan pasokan tenaga listriknya sampai di Sungguminasa dan daerah-daerah sekitar Makassar termasuk Malino menjelang tahun 1940. Di masa itu listrik, seperti juga gas, dilayani oleh perusahaan swasta, dan terdapat 4.342 pelanggan listrik di Makassar yang menggunakan 4,7 juta kilowatt jam tenaga listrik.¹⁰ Kemudian, sejak 1924 pemerintah kota sudah menyediakan fasilitas air minum yang memadai. Di Goaweg dibangun satu menara air yang masih berfungsi hingga sekarang. Sumber air bakunya diambil dari sungai Jeneberang dengan menggunakan pompa, sedang pipa transmisi airnya dibuat sepanjang 7 km dari Sungguminasa.¹¹

Pertumbuhan dan perluasan kota Makassar berlangsung sejajar dengan semakin lengkapnya perangkat birokrasi pemerintah yang mengatur, mendisiplinkan dan menguasai kota. Tiga tahun setelah *Decentralisatiewet* 1903 diberlakukan oleh Gubernur Jenderal Idenburg dan segera setelah penaklukan penguasa-penguasa lokal selesai dilaksanakan, Makassar menjadi sebuah *gemeente* yang berhak mengatur dan memerintah diri sendiri. Untuk itu dibentuk pula Dewan Kota (*Gemeenteraad*) yang beranggotakan 13 orang yang terdiri dari 8 orang Belanda, 3 pribumi dan 2 timur

Pemberontakan Kahar Muzakkar. Dari Tradisi ke DI/ TII., (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1989), hlm. 89-91, Lihat juga Sarkawi, **Perkembangan Pendidikan Kolonial di Makassar, 1876-1945**, (Yogyakarta: Tesis Universitas Gadjah Mada, 1997), hlm. 30-33, dan Dias Pradimara, *Ibid.*

¹⁰ Kalau diasumsikan tiap pelanggan menggunakan listriknya untuk rumahnya yang dihuni oleh, katakanlah, 5 orang anggota keluarga, maka 21 ribu lebih penduduk kota (atau hampir seperempat dari keseluruhan penduduk) sudah menikmati aliran listrik. Barbara Sillars Harvey, *Ibid.*, hlm 66 dalam Dias Pradadimara, *Ibid.*, hlm. 5.

¹¹ Yulianto Sumalyo, **Pola Perkembangan Kota dan Arsitektur Ujung Pandang**, (Makassar: Jurusan Teknik Arsitektur Unhas, 2002), hlm. 46 dalam Dias Pradadimara, *Ibid.*

asing dan diketuai oleh Kepala Pemerintahan Daerah Afdeling Makassar (*Het Hoofd van Plaatselijk Bestuur van de Afdeling Makassar*). Lima tahun kemudian susunan dewan kota diperbesar dengan ditambahkannya 2 orang Belanda. Pada 1916 dewan ini mengusulkan adanya perubahan lebih lanjut terhadap struktur pemerintahan kota ini. Usul ini diterima oleh Gubernur Jenderal, dan di tahun 1918 Makassar memperoleh Walikotanya (*Burgemeester*) yang pertama. Walikota jugalah yang menjadi ketua dewan kota. Duapuluh tahun kemudian, di tahun 1938 status Makassar berubah lagi menjadi Kotapraja (*Stadsgemeente*) dengan hak-hak pengaturan yang diperluas dan jumlah anggota dewan diperbanyak. Kali ini 2 orang pribumi ditambahkan ke dewan dan menjadikan jumlah total anggotanya 17 orang.¹² Tampak jelas bagaimana ras menjadi satu dasar pertimbangan, kalau bukan malah pertimbangan utama, bagaimana penguasa kolonial mengendalikan kota.

Perbandingan jumlah wakil dari tiap kelompok masyarakat berbanding terbalik dengan jumlah kelompok. Untuk mengendalikan pertumbuhan permukiman di kota, di tahun 1918 dikeluarkan *Bouw en Woonverordening voor de Gemeente Makassar* yang kemudian diperbaiki di tahun 1949 dan 1952, dan sekarang sudah dilupakan sama sekali. Peraturan ini digunakan untuk mengatur bangunan yang akan didirikan dan secara tak langsung melakukan zonasi untuk tempat tinggal dari kelompok yang berbeda. Tahun 1926 juga dikeluarkan *Hinderordonantie* yang

¹² Pedoman Kota Besar Makassar, (Makassar: Tri Bakti, 1954), hlm. 8-9 dalam kutipan Dias Pradadimara, *Ibid.*

digunakan untuk menentukan kegiatan-kegiatan tertentu yang bisa atau tidak bisa dilakukan di kota.¹³

Teknologi kekuasaan kolonial Belanda di kota Makassar menggunakan ras sebagai dasar kategori pengendalian penduduk kota dan ruang kota ini muncul ke permukaan dengan lahirnya sebuah sistem pemerintahan kota bermuka dua. Di satu sisi sistem pemerintahan ini didasarkan pada sistem "modern" yang dilengkapi dengan adanya dewan kota yang menjadi perwakilan warga kota (maksudnya terutama warga kota berstatus hukum "Eropa" yang minoritas). Di sisi lain—atau bahkan sisi bawah, hampir di bawah permukaan yang tak akan nampak dalam buku panduan untuk turis ada sistem pemerintahan yang mengandalkan pada penguasa-penguasa lokal dan juga mata-mata untuk mengawasi mayoritas penduduk yang Bumi Putera.¹⁴

Bersamaan dengan diperolehnya status *gemeente*, kota Makassar kemudian dibagi menjadi 6 distrik masing-masing Makassar, Wajo, Melayu, Ende, Ujung Tanah dan Mariso. Semua wilayah ini, kecuali dua yang terakhir, secara nyata menunjuk pada asal-usul permukiman yang bersifat etnis—setidaknya di masa

¹³ McTaggart, W. Donald, Kebijaksanaan Pembangunan Kota di Indonesia, dalam Masyarakat Indonesia, 3, 1, 1976, hlm. 80-81. Lihat juga Dias Pradadimara, *Ibid.*, hlm. 6.

¹⁴ Kalau di satu sisi pemerintahan "modern" yang diciptakan mengambil bentuk satu pemerintahan kota yang bekerja dengan sistem perwakilan yang (seharusnya) liberal dan demokratis, maka di sisi lain pemerintahan kota Makassar didasarkan pada sistem pembagian wilayah dimana di setiap wilayah terdapat kepala yang pemilihannya didasarkan pada sistem patron-klien tradisional. Sisi pemerintahan moderen adalah wilayah bagi warga kota "Eropa" sedang sisi pemerintahan tradisional digunakan untuk mengontrol warga kota lainnya yang bukan "Eropa." Dias Pradadimara, *Ibid.*

awalnya.¹⁵ Sejak tahun 1921 hanya 4 distrik tersisa di kota ini dengan dihapuskannya distrik Melayu dan Ende. Setiap distrik dikepalai oleh seorang “*kapitein*” atau “*kapitang*” kecuali Ujung Tanah dan Mariso yang dikepalai oleh seorang “*gallarang*” yang semuanya digaji. Untuk warga kota yang menjadi “perantara” di dua kelompok ras, masih ada kelompok “Cina” yang juga memiliki satu “*major*,” sedang untuk kelompok Timur Asing lainnya juga ditunjuk satu “*kapitein*.” Di setiap distrik terdapat kampung-kampung yang juga diketuai oleh seorang kepala kampung (*matoa kampong* atau *kampong hoofd*) yang dipilih sendiri oleh para laki-laki dewasa di sana dari antara mereka sendiri.

Posisi kelompok Timur Asing oleh Pemerintah Belanda ditempatkan sebagai jembatan sosial dan ekonomi di antara dua kelompok ras penghuni kota. Yang bertugas mengawasi dan mengendalikan hubungan antara kedua muka sistem masyarakat adalah kepala kampung.¹⁶ Meskipun sudah ditambah di tahun 1938, kelompok “bumiputera” yang mayoritas hanya diwakili oleh sejumlah kecil anggota dewan pemerintahan kota. Dengan kata lain, di bawah permukaan sistem pemerintahan kota Makassar yang modern dibentuk dan dipertahankan sistem

¹⁵Menurut Dias Pradadimara, sebenarnya nama wilayah bisa membuat kita menganggap bahwa penduduk wilayah tersebut selalu berasal dari daerah atau kelompok etnis tertentu. Dan buku Sejarah Sosial Daerah Sulawesi Selatan. Mobilitas Sosial Di Kota Makassar 1900-1950. (Jakarta: DPdK, 1984/1985) membuat anggapan tersebut (lihat terutama Bab II). Tapi, seperti yang ditunjukkan oleh hasil penelitian Professor Heather Sutherland yang menggunakan data arsip, anggapan semacam itu ternyata salah untuk abad ke-18 dan seterusnya. *Ibid.*

¹⁶ Kepala kampung dipilih oleh dan dari kalangan para lelaki dewasa di permukiman tersebut memberi ruang kemungkinan bagi terus dimainkannya elemen-elemen kekerabatan (baik kekerabatan sesungguhnya maupun buatan) dan karisma pribadi—keduanya adalah basis bagi sistem patron-klien tradisional—dalam pemilihan kepala kampung.

kekuasaan lama dengan berbagai elemen tambahan baru yang campur aduk. Kedua muka sistem pemerintahan kota Makassar ini tidak diubah setelah pendudukan Jepang berakhir, meskipun dengan pemain yang berbeda. Hanya saja, pada masa pendudukan Jepang, sistem pemerintahan desa lebih dikembangkan lagi dengan pembentukan RT (Rukun Tetangga) dan RW (Rukun Warga) dengan tujuan untuk memudahkan pihak Jepang dalam mengontrol aktivitas penduduk kota Makassar.

4. Kondisi Ekonomi

Dasar pertumbuhan ekonomi kota Makassar sejak zaman dulu telah dirintis oleh kerajaan Gowa sejak abad ke-16-17. Dalam perkembangannya kota Makassar banyak memikat migrasi yang berpengaruh pada sistem perekonomian (sistem jual beli, pedagang dan pekerja).¹⁷

Pada masa pendudukan Jepang, Sulawesi Selatan termasuk Makassar merupakan daerah yang tergolong penghasil beras yang cukup memadai untuk memenuhi kebutuhan pangan militer Jepang terutama Angkatan Laut. Apabila tidak mencukupi, Jepang mendatangkan beras dari Pulau Jawa.¹⁸ Pada masa ini juga kondisi umum sosial ekonomi masyarakat sangat memprihatinkan. Kemiskinan dan kemelaratan yang ditandai dengan kelaparan, kekurangan sandang (pakaian) yang melanda kehidupan masyarakat di mana-mana. Belum lagi ditambah dengan adanya

¹⁷ Zainal, *Ibid.*, hlm. 21.

¹⁸ Barbara Sillars Harvey, Pemberontakan Kahar Muzakkar Dari Tradisi Ke DI/TII, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1989), hlm. 97.

pemaksaan untuk ikut serta dalam berbagai kegiatan seperti persiapan perang melawan sekutu.¹⁹

Dalam usaha meningkatkan produksi pertanian, pemerintah pendudukan Jepang mengirim banyak pemuda masuk sekolah pertanian *Noogyo Zitsumu Gakko* (sebelumnya *Landbouwschool*). Respon masyarakat atas usaha ini sangat baik. Namun peningkatan hasil produksi pertanian tidak diikuti oleh bertambahnya kesejahteraan penduduk, karena surplus padi diperuntukkan tentara Jepang.²⁰ Dan inilah yang menjadikan masyarakat malas bekerja dan banyak memanipulasi sejumlah komoditi pertanian dan perikanan, sehingga secara keseluruhan wilayah Sulawesi Selatan kekurangan bahan makanan dan harus dibantu oleh suplai dari luar seperti Jawa. Bahkan terjadi penyeludupan padi di beberapa wilayah di Sulawesi Selatan.²¹

Selain masalah pangan, masalah sandang juga ikut mewarnai penderitaan penduduk secara ekonomi pada masa pendudukan Jepang. Sebelum pecahnya perang, keperluan sandang sangat tergantung impor dari negara Belanda (untuk itu penduduk diwajibkan menanam kapas pada masa pemerintahan Belanda). Belum lagi produksi pabrik tekstil yang ada tidak mampu melayani semua permintaan masyarakat,

¹⁹ Suhardin Tjenne, *Pendudukan Jepang Di Malimpung*, (Makassar: Skripsi Jurusan Ilmu Sejarah Unhas, 1991), hlm. 41.

²⁰ *Ibid.*, hlm 42.

²¹ Barbara Sillars Harvey, *Ibid.*, hlm. 100.

karena fokus perhatian Jepang lebih ditujukan pada usaha untuk memenangkan perang melawan sekutu.²²

Keadaan perekonomian masyarakat yang sedang carut-marut itu diparah lagi dengan adanya pungutan pajak dan penjualan hasil pertanian dan perikanan. Barang-barang kebutuhan harian berada di bawah kendali Jepang sehingga masyarakat harus membelinya dengan harga yang mahal, padahal di sisi lain pendapatan masyarakat justeru semakin berkurang. Apalagi didukung oleh jumlah uang yang beredar di masyarakat sangat sedikit (karena masyarakat tidak menyukai uang Yen Jepang).²³

B. Latar Historis Pendidikan Di Indonesia

Dewasa ini, pendidikan di Indonesia telah dirumuskan berulang kali agar didapatkan suatu konsep pendidikan yang optimal, sesuai dengan kebutuhan bangsa dan kemudian diimplementasikan dalam suatu sistem pendidikan nasional. Tujuannya tidak lain di samping untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, juga untuk menyejahterakan masyarakat Indonesia. Bukan hanya itu, konsep-konsep dan pengertian pendidikan pun ikut dirumuskan dan selalu diperbaharui agar mengikuti perkembangan dan tingkat kebutuhan masyarakat. Dalam arti luas, pendidikan diterjemahkan sebagai proses yang berkaitan dengan upaya untuk mengembangkan diri seseorang pada tiga aspek dalam kehidupannya, yakni, pandangan hidup, sikap hidup dan keterampilan hidup.

²² Suhardin Tjenne, *Ibid.*, hlm. 44.

²³ *Ibid.*



Upaya untuk mengembangkan ketiga aspek tersebut bisa dilaksanakan di sekolah, luar sekolah dan keluarga. Kegiatan di sekolah direncanakan dan dilaksanakan secara ketat dengan prinsip-prinsip yang sudah ditetapkan. Pelaksanaan di luar sekolah, meski memiliki rencana dan program yang jelas tetapi pelaksanaannya relatif longgar dengan berbagai pedoman yang relatif fleksibel disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi lokal. Pelaksanaan pendidikan dalam keluarga dilaksanakan secara informal tanpa tujuan yang dirumuskan secara baku dan tertulis.²⁴

Dengan mendasarkan pada konsep pendidikan tersebut di atas, maka sesungguhnya pendidikan merupakan pembudayaan atau "*enculturation*", suatu proses untuk mentasbihkan seseorang mampu hidup dalam suatu budaya tertentu. Konsekuensi dari pernyataan ini, maka praktek pendidikan harus sesuai dengan budaya masyarakat akan menimbulkan penyimpangan yang dapat muncul dalam berbagai bentuk guncangan-guncangan kehidupan individu dan masyarakat. Tuntutan keharmonisan antara pendidikan dan kebudayaan bisa pula dipahami, sebab praktek pendidikan harus mendasarkan pada teori-teori pendidikan dan giliran berikutnya teori-teori pendidikan harus bersumber dari suatu pandangan hidup masyarakat yang bersangkutan.²⁵

Padahal jauh sebelumnya, ketika pendidikan sekolah untuk pertama kalinya diperkenalkan oleh kolonial Belanda, tujuannya sangat sederhana, itupun karena

²⁴ <http://pakguruonline.pendidikan.net>, **Paradigma Pendidikan Masa Depan**, diakses 23 Januari 2008.

²⁵ *Ibid.*

desakan kaum humanis. Bukan murni inisiatif untuk mencerdaskan masyarakat di daerah jajahannya, apalagi untuk membebaskan masyarakat dari belenggu kehidupan adat yang kolot dan statis. Setelah perintah untuk melaksanakan pendidikan sekolah sebagai bagian dari kebijakan politik etis yang harus segera dilaksanakan, kebijakan tersebut pun dimanipulasi dan kemudian disesuaikan kebijakan politik asosiasi Pemerintah Hindia Belanda, agar diperoleh tenaga kerja dan tenaga birokrasi yang murah.

Di sini sangat perlu untuk menguraikan sedikit tentang pengertian pendidikan sekolah dan pendidikan non sekolah untuk sebagai pengantar, karena pada masa pendudukan Jepang, penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan tidak hanya terbatas pada pendidikan sekolah, tetapi juga pada pendidikan non sekolah. Tujuannya adalah melatih dan mendidik pemuda-pemuda pribumi secara militer guna dipersiapkan melawan tentara sekutu dalam perang pasifik.

Pendidikan Sekolah

Pendidikan sekolah adalah suatu bentuk pendidikan yang diorganisir oleh negara atau lembaga kemasyarakatan yang tentu dapat atau mampu mengorganisir penyelenggaraan administrasi, personalia, nilai serta bentuk penyampaian.²⁶ Cara ini ditempuh disebabkan oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern serta sosial budaya, di mana keluarga dan organisasi kemasyarakatan menginginkan hasil pendidikan yang lebih baik dari apa yang dihasilkan pendidikan keluarga. Dengan demikian pendidikan formal diharapkan memberikan layanan pendidikan

²⁶ Soetinah Soewondo, Pendidikan Nasional II (Indonesia), (Makassar : Batu Putih, 1970), hlm. 2.

lebih sempurna, sistematis, lebih bertanggung jawab dan senantiasa disesuaikan dengan perkembangan zaman.

Dalam pendidikan sekolah, peran dan tanggung jawab diberikan secara penuh kepada sekolah untuk mendidik pesertanya selama dalam waktu tertentu. Hal ini tidaklah berarti bahwa jika peserta didik itu telah masuk sekolah maka bebaslah orang tua dari tanggung jawab dan kebergantungan pendidikan anaknya.

Pada zaman pendudukan Jepang pendidikan sekolah yang dimaksud adalah pendidikan yang berlangsung dan dilaksanakan di sekolah-sekolah dan diajar guru-guru yang digaji oleh Jepang. Tentu saja pengecualian bagi sekolah yang dikelola oleh swasta. Guru yang mengajar di sekolah swasta pada saat itu digaji oleh lembaga tempat mereka mengajar seperti guru yang mengajar pada sekolah yang dikelola oleh Muhammadiyah, Zending dan Misi Katolik.

Pendidikan Non Sekolah

Bentuk pendidikan non sekolah yang dimaksudkan di sini adalah pendidikan yang dilakukan di luar sekolah. Artinya, pendidikan ini dilaksanakan untuk memberikan berbagai keterampilan khusus untuk mendukung pendidikan sekolah. Pendidikan non sekolah jika diterjemahkan dalam teori pendidikan modern, dapat dimasukkan dalam kategori pendidikan informal dan pendidikan non formal.

Yang dimaksud dengan pendidikan non sekolah yang dilaksanakan pada zaman Jepang adalah Pusat Tenaga Rakyat (PUTERA), *Seinendan*, *Kaibodan*, *Bogodan*. Di situ para pemuda dilatih secara kemiliteran dan banyak juga di antaranya merupakan murid sekolah.

1. Sekilas Sejarah Pendidikan Pra-Politik Etis Di Indonesia

Pada masa VOC, yang merupakan sebuah kongsi (perusahaan) dagang, kondisi pendidikan di Indonesia dapat dikatakan tidak lepas dari maksud dan kepentingan komersial. Berbeda dengan kondisi di negeri Belanda sendiri di mana lembaga pendidikan dikelola secara bebas oleh organisasi-organisasi keagamaan, maka selama abad ke-17 hingga 18 M, bidang pendidikan di Indonesia harus berada dalam pengawasan dan kontrol ketat VOC. Jadi, sekalipun penyelenggaraan pendidikan tetap dilakukan oleh kalangan agama (gereja), tetapi mereka adalah berstatus sebagai pegawai VOC yang memperoleh tanda kepangkatan dan gaji. Dari sini dapat dipahami, bahwa pendidikan yang ada ketika itu bercorak keagamaan (Kristen Protestan). Hal ini juga dikuatkan dari profil para guru di masa ini yang umumnya juga merangkap sebagai guru agama (Kristen). Dan sebelum bertugas, mereka juga diwajibkan memiliki lisensi (surat izin) yang diterbitkan oleh VOC setelah sebelumnya mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh gereja Reformasi.²⁷

Kondisi pendidikan di zaman VOC juga tidak melebihi perkembangan pendidikan di zaman Portugis atau Spanyol. Pendidikan diadakan untuk memenuhi kebutuhan para pegawai VOC dan keluarganya di samping untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja murah terlatih dari kalangan penduduk pribumi. VOC memang mendirikan sekolah-sekolah baru selain mengambil alih lembaga-lembaga pendidikan yang sebelumnya berstatus milik penguasa kolonial Portugis atau gereja

²⁷ <http://peziarah.wordpress.com/2007/02/05/pendidikan-di-zaman-penjajahan-belanda> diakses 28 Januari 2008.

Katholik Roma. Secara geografis, pusat pendidikan yang dikelola VOC juga relative terbatas di daerah Maluku dan sekitarnya. Di Sumatera, Jawa dan Sulawesi, VOC memilih untuk tidak melakukan kontak langsung dengan penduduk, tetapi mempergunakan mediasi para penguasa lokal pribumi. Jikalau ada, itu hanya berada di pusat konsentrasi pendudukannya yang ditujukan bagi para pegawai dan keluarganya.²⁸

Secara umum sistem pendidikan pada masa VOC dapat digambarkan sebagai berikut:

(1) Pendidikan Dasar

Berdasar peraturan tahun 1778, dibagi kedalam 3 kelas berdasar rankingnya. Kelas 1 (tertinggi) diberi pelajaran membaca, menulis, agama, menyanyi dan berhitung. Kelas 2 mata pelajarannya tidak termasuk berhitung. Sedangkan kelas 3 (terendah) materi pelajaran fokus pada alphabet dan mengeja kata-kata. Proses kenaikan kelas tidak jelas disebutkan, hanya didasarkan pada kemampuan secara individual. Pendidikan dasar ini berupaya untuk mendidik para murid-muridnya dengan budi pekerti. Contoh pendidikan dasar ini antara lain *Batavische school* (Sekolah Betawi, berdiri tahun 1622); *Burgerschool* (Sekolah Warga-negara, berdiri tahun 1630); dan lain-lain.

(2) Sekolah Latin

Diawali dengan sistem numpang-tinggal (*in de kost*) di rumah pendeta tahun 1642. Sesuai namanya, selain bahasa Belanda dan materi agama, mata pelajaran

²⁸ *Ibid.*

utamanya adalah bahasa Latin. Setelah mengalami buka-tutup, akhirnya sekolah ini secara permanent ditutup tahun 1670.

(3) *Seminarium Theologicum* (Sekolah Seminari)

Sekolah untuk mendidik calon-calon pendeta, yang didirikan pertama kali oleh Gubernur Jenderal van Imhoff tahun 1745 di Jakarta. Sekolah dibagi menjadi 4 kelas secara berjenjang. Kelas 1 belajar membaca, menulis, bahasa Belanda, Melayu dan Portugis serta materi dasar-dasar agama. Kelas 2 pelajarannya ditambah bahasa Latin. Kelas 3 ditambah materi bahasa Yunani dan Yahudi, filsafat, sejarah, arkeologi dan lainnya. Untuk kelas 4 materinya pendalaman yang diasuh langsung oleh kepala sekolahnya. Sistem pendidikannya asrama dengan durasi studi 5,5 jam sehari dan Sekolah ini hanya bertahan selama 10 tahun.

(4) *Academie der Marine* (Akademi Pelayaran)

Berdiri tahun 1743, dimaksudkan untuk mendidik calon perwira pelayaran dengan lama studi 6 tahun. Materi pelajarannya meliputi matematika, bahasa Latin, bahasa ketimuran (Melayu, Malabar dan Persia), navigasi, menulis, menggambar, agama, keterampilan naik kuda, anggar, dan dansa. Tetapi iapun akhirnya ditutup tahun 1755.

(5) Sekolah Cina

Tahun 1737 sekolah Cina didirikan untuk keturunan Cina yang miskin, tetapi sempat vakum karena peristiwa de *Chineezenmoord* (pembunuhan Cina) tahun 1740. selanjutnya, sekolah ini berdiri kembali secara swadaya dari masyarakat keturunan Cina sekitar tahun 1753 dan 1787.

(6) Pendidikan Islam

Pendidikan untuk komunitas muslim relatif telah mapan melalui lembaga-lembaga yang secara tradisional telah berkembang dan mengakar sejak proses awal masuknya Islam ke Indonesia. VOC tidak ikut campur mengurus atau mengaturnya. Pada akhir abad ke-18, setelah VOC mengalami kebangkrutan, kekuasaan Hindia Belanda akhirnya diserahkan kepada pemerintah kerajaan Belanda langsung. Pada masa ini, pendidikan mulai memperoleh perhatian relatif maju dari sebelumnya. Beberapa prinsip yang oleh pemerintah Belanda diambil sebagai dasar kebijakannya di bidang pendidikan antara lain:

- (1) Menjaga jarak atau tidak memihak salah satu agama tertentu;
- (2) Memperhatikan keselarasan dengan lingkungan sehingga anak didik kelak mampu mandiri atau mencari penghidupan guna mendukung kepentingan kolonial;
- (3) Sistem pendidikan diatur menurut pembedaan lapisan sosial, khususnya yang ada di Jawa.; dan
- (4) Pendidikan diukur dan diarahkan untuk melahirkan kelas elit masyarakat yang dapat dimanfaatkan sebagai pendukung supremasi politik dan ekonomi pemerintah kolonial. Jadi secara tidak langsung, Belanda telah memanfaatkan kelas aristokrat pribumi untuk melanggengkan status quo kekuasaan kolonial di Indonesia.²⁹

²⁹ *Ibid.*

Era ini sesungguhnya telah beroleh pengaruh dari faham gerakan Aufklarung (pencerahan) yang berkembang di Eropa. Di antara tesisnya menyebutkan tentang penghargaan terhadap nalar, kebebasan spiritual serta sekularisasi agama dan negara. Implikasi logis dari hal ini salah satunya adalah penyerahan pengelolaan pendidikan kepada negara, bukan lagi kepada lembaga-lembaga keagamaan (gereja). Secara formil, pemerintah Hindia Belanda telah mendirikan beberapa sekolah di Jawa sejak kepemimpinan Daendels, yaitu sekolah artileri (1806) di Jatinegara, sekolah pelayaran (1808) di Semarang, sekolah bidan (1809) di Jakarta, dan sekolah seni tari (1809) di Cirebon. Daendels ini juga dikenal sebagai tokoh pertama yang menginstruksikan para bupati agar mengusahakan pendirian sekolah-sekolah bagi remaja-remaja pribumi. Janssens yang menggantikan Daendels juga meneruskan kebijakan yang serupa di bidang pendidikan. Tetapi usahanya terinterupsi dengan kekalahan militer dan politik dari kerajaan Inggris. Hindia Belanda selanjutnya dikelola oleh Inggris di bawah Raffles. Secara kelembagaan formal, Inggris tidaklah menaruh perhatian besar kepada dunia pendidikan bagi kaum pribumi. Hanya saja, mereka tergolong sangat berminat melakukan eksplorasi ilmiah yang kemudian menghasilkan karya-karya intelektual yang cukup monumental, antara lain: *History of Java* karya Raffles, sejarah Sumatera, kamus Melayu dan pelajaran bahasa Melayu yang merupakan karya-karya Marsden, *Java Government Gazette* yang memuat ilmu pengetahuan tentang daerah dan penduduk, hasil kajian botani oleh Horsfield, dan juga kajian kepemilikan tanah di Jawa oleh Colin Mackenzie. Karya-karya tersebut memberi kontribusi signifikan bagi dunia ilmu pengetahuan sekaligus menjadi

penanda khusus masa lima tahun (1811-1816) kekuasaan Inggris di Indonesia. Masa pemulihan kekuasaan Belanda pasca pendudukan Inggris menjadi titik tolak baru bagi perkembangan lebih maju dunia pendidikan di Indonesia.³⁰

Pada masa ini, pendidikan bagi pribumi kembali dirasa penting guna menopang operasionalisasi pemerintahan Hindia Belanda. Gubernur Jenderal Van den Bosch (1829-1834) yang dikenal sebagai penggagas *Cultuurstelsel* tercatat pernah menerbitkan edaran agar didirikan sekolah dasar negeri di tiap karesidenan atas biaya *Bijbelgenootschap* (persekutuan Injil) tahun 1831. Tetapi kurang beroleh tanggapan karena menyelisihi prinsip netral sikap pemerintah dalam soal agama. Baru kemudian tahun 1848, dengan keluarnya Keputusan Raja, diinstruksikan untuk mendirikan sekolah-sekolah pribumi dengan pembiayaan sebesar f. 25.000 setahun yang dibebankan kepada pemerintah Hindia Belanda untuk mendidik para calon pegawai negeri. Sejak itulah berdiri dan berkembang sekolah-sekolah dari tingkat dasar dan lanjutan hingga tinggi yang memperkenankan golongan pribumi (aristokrat) untuk turut menikmati pendidikan. Untuk mengurus pendidikan, agama dan kerajinan, pemerintah Hindia Belanda juga telah membentuk departemen khusus pada tahun 1867. Perkembangan ini kemudian sempat mengalami kemunduran karena krisis ekonomi dunia (*malaise*) yang berlangsung hampir satu dekade (1883-1892).³¹

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*

C. Sejarah Pendidikan di Makassar

1. Latar Historis

Selama ini terdapat anggapan umum yang berkembang bahwa sebelum kedatangan bangsa asing di Indonesia dalam hal ini Pemerintahan Kolonial Belanda dalam bidang pendidikan, bangsa Indonesia merupakan bangsa yang buta hurup. Kalau yang dimaksud adalah buta hurup latin maka anggapan ini mungkin dapat dikatakan benar. Akan tetapi kalau anggapan ini digeneralisir, mungkin kurang tepat. Kenyataannya, bangsa Indonesia tidaklah buta hurup tradisional-lokaldengan model pendidikan yang berkembang adalah pendidikan tradisional. Pada zaman Hindu dan Budha misalnya, pendidikan tradisional berjalan dengan baik dan telah menghasilkan karya-karya yang terkenal, seperti Pararaton dan Negara Kertagama.³²

Pada saat zaman Hindu dan Budha, pendidikan hanya dinikmati oleh kelas Brahmana, yang merupakan kelas teratas dalam kasta Hindu. Mereka umumnya belajar teologi, sastra, bahasa, ilmu pasti, dan ilmu seni bangunan. Sejarah mencatat, kerajaan-kerajaan Hindu seperti Kalingga, Kediri, Singosari, dan Majapahit, melahirkan para empu, punjanga, karya sastra, dan seni yang hebat. Saat itu Padepokan adalah model pendidikan zaman hindu yang dikelola oleh seorang guru/bengawan dan murid/cantrik mempelajari ilmu bersifat umum, religius, dan juga

³² Sarkawai, Dari Huruf Lontara Ke Latin, Pergeseran Pendidikan Tradisional Ke Kolonial Di Makassar dalam <http://article.melayuonline.com> Edisi 09 Agustus 2007 15:47. Diakses 23 Januari 2008.



kesaktian. Murid di Padepokan bisa keluar masuk bila merasa cukup atau tidak puas dengan pengajaran guru.³³

Pada masa itu, model pendidikan yang diutamakan adalah pendidikan keagamaan, pemerintahan, strategi perang dan ilmu kekebalan, kemahiran menunggang kuda, dan memainkan senjata tajam. Pendidikan dilakukan oleh para brahmana kepada siswa dalam jumlah terbatas pada suatu padepokan. Dengan kata lain, siswa tinggal serumah dengan guru dan istri guru dianggap sebagai ibu mereka. Sang guru dianggap sebagai seorang yang sakti sehingga ia sangat dihormati. Ia tidak mempunyai penghasilan tetap, tetapi sewaktu-waktu menerima pemberian sukarela dari orang tua siswa. Selain dengan sistem padepokan, seorang bangsawan, ksatria atau pejabat kerajaan lainnya meminta guru datang ke istana untuk mengajar putra-putrinya.³⁴ Ketika Islam masuk dan berkembang di Nusantara, aspek pendidikan menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Sistem pendidikan yang banyak dianut dan dikembangkan pada masa itu adalah sistem pendidikan langgar³⁵ dan pesantren.

³³ <http://yherlanti.wordpress.com/2008/01/11/perjalanan-kurikulum-pendidikan-di-indonesia-dari-masa-ke-masa/>, **Perjalanan Kurikulum Pendidikan Di Indonesia Dari Masa Ke Masa**, Edisi 11 Januari 2008. Diakses 22 Januari 2008.

³⁴ Ary H. Gunawan, **Kebijakan-Kebijakan Pendidikan di Indonesia**, (Jakarta: Bina Aksara, 1986), hlm. 5-6. Lihat juga Sarkawi, *Ibid*.

³⁵ Langgar yang terdapat di hampir seluruh desa di Indonesia, selain berfungsi sebagai tempat ibadah juga sebagai tempat berlangsungnya proses belajar mengajar. Di langgar, seorang guru yang juga biasanya pengurus langgar mengajarkan kepada siswa membaca Alquran dan diberikan pada pagi atau sore hari sekitar 2 jam. Pendidikan di langgar diajarkan hal-hal yang bersifat dasar, sedangkan di pesantren lebih meningkat dan mendalam. Siswanya disebut santri berasal dari berbagai tempat dan dikumpulkan dalam suatu pondok (semacam asrama) yang di dekatnya terdapat mesjid dan rumah guru. Pelajaran-pelajaran yang diberikan antara lain *nahwu* (syntax) dan *saraf* (morfologi), fiqh, usul fiqh, hadis, tafsir, tauhid, tasawwuf, etika dan cabang lain seperti *tarik* dan *balaghah*.

Setelah itu pendidikan kolonial mulai muncul dengan aturan dan sistemnya sendiri maka pendidikan tradisional yang sudah menjadi bagian dari masyarakat mulai kehilangan pamor. Peran seorang pengajar yang memiliki kharisma di mata para siswanya, mulai digantikan dengan kehadiran seorang guru yang mengajarkan pelajaran umum di kelas. Munculnya banyak sekolah "kolonial" tersebut juga berkaitan dengan perubahan arah kebijakan pemerintah kolonial pada awal abad ke-20.³⁶ Eksploitasi terhadap bangsa Indonesia sebagai pembenaran utama atas kekuasaannya mulai berkurang dan digantikan dengan pernyataan-pernyataan keprihatinan atas kesejahteraan bangsa Indonesia.³⁷

2. Pendidikan Tradisional

Bagi masyarakat Bugis-Makassar di Sulawesi Selatan, pendidikan tradisional sudah dikenal sejak lama. Bahkan, kedudukan mereka yang terpelajar disebut *To-panrita* dan *To-sulesana* sangat dihargai. Wujud penghargaan itu antara lain adanya kemungkinan bagi mereka untuk memperistri gadis golongan bangsawan.

Sistem pendidikan tradisional yang telah berlangsung cukup lama tersebut dapat dibuktikan melalui dua hal. (1) dikenalnya aksara tradisional dalam masyarakat

Lihat Zamakhsyari Dhofier, Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kiai. (Jakarta: LP3ES, 1982), hlm. 44-45, dan Sarkawi, *Ibid*.

³⁶ Kebijakan tersebut dinamakan politik etis yang berpangkal pada gagasan "kewajiban moral" dan "hutang budi" (*een eerschuld*) pemerintah kolonial terhadap tanah jajahan. Pidato tahunan Ratu Wilhelmina dari tahta kerajaan di Negeri Belanda pada September 1901 mengumandangkan bermulanya "zaman etis" dengan trilogi kebijakan: edukasi, irigasi, dan emigrasi. Bosch, Amry van den, The Dutch East Indies: Its Government, Politics, and Problems, (Berkeley: Berkeley University Press, 1941), hlm 46 dalam Sarkawi, *Ibid*.

³⁷Sarkawi, *Ibid*, dan M.C. Ricklefs, Sejarah Indonesia Modern, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1995), hlm. 227.

yang disebut hurup *lontara*³⁸ dan hurup *serang* dan (2), cara pengajaran membaca Alquran yang disebut dengan *mangngaji*. Adapun huruf-huruf *lontara*³⁹ yang biasa digunakan adalah:

KA	GA	NGA	NGKA	PA	BA	MA	MPA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
TA	DA	NA	NRA	CA	JA	NYA	NCA
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
YA	RA	LA	WA	SA	A	HA	
(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	

Tanda bunyi:

___ i: misalnya *ki* ditulis:

___ u: misalnya *gu* ditulis:

___ e: misalnya *nge* ditulis:

___ o: misalnya *po* ditulis:

___ e: misalnya *be* ditulis:

³⁸ Hurup *lontara* ini pada umumnya dipakai untuk menulis tata aturan pemerintahan dan kemasyarakatan. Naskah ditulis pada daun *lontar* menggunakan lidi atau kalam yang terbuat dari ijuk kasar (kira-kira sebesar lidi). Huruf *lontara* biasa juga dinamakan dengan *hurupu sulapa' appaka* (Bugis: *sulapa' eppa*) yang berarti huruf yang bersegi empat. Penamaan ini berpangkal pada kepercayaan dan pandangan mitologi orang Bugis-Makassar yang memandang alam ini sebagai satu kesatuan yang dinyatakan dengan simbol // = *sa*, yang berarti // = *seua* (tunggal atau esa), simbol // ini merupakan mikrokosmos/*sulapa eppa'na taue* (segi empat tubuh manusia), di puncak terletak kepalanya, di sisi kiri dan kanan adalah tangannya, dan ujung bawah adalah kakinya. Simbol // itu menyatakan diri secara konkrit pada bahagian kepala manusia yang disebut "*saung*" //, berarti mulut atau tempat keluar. Menurut mereka, dari mulutlah segala sesuatu dinyatakan, yakni // = *sadda* (bunyi). Bunyi itu disusun sehingga memiliki makna (simbol-simbol) yang disebut // = *ada* (kata, sabda, atau titah). Dari kata // *ada* (kata) inilah keluar segala sesuatu yang meliputi seluruh tertib kosmos (sarwa alam) yang diatur melalui // *ada* (kata atau logos). Bila kata itu dibubuhi kata sandang tertentu // = *E*, ia menjadi // *adae* (kata itu). Inilah yang menjadi pangkal kata // = *ade'* (adat), yakni sabda atau penertib yang meliputi sarwa alam // = *sa*. Mattulada. Latoa: Satu Lukisan Analitis Terhadap Antropologi Politik Orang Bugis, (Ujung Pandang: Hasanuddin University Press, 1995), hlm. 8-9. Lihat juga Sarkawi, *Ibid*.

³⁹ J. Noorduyn, Variation in the Bugis Makassar Script, dalam *BKI*, Deel 149, 1993, hlm. 535, yang dikutip Sarkawi, *Ibid*.

Catatan: Huruf keempat, kedelapan, dan keenambelas hanya digunakan dalam lontara Bugis, tetapi tidak terdapat pada lontara Makassar.

Tradisi *literer* dengan menggunakan hurup *lontara* mengalami perkembangan paling pesat pada abad ketujuh belas. Dengan pengaruh contoh-contoh sastra Melayu maupun Portugis, orang Makassar mulai menuliskan *tarik* yang setia fakta (*matter-of-fact*) yang merinci pesatnya perkembangan Makassar. Tujuan penulisan ini adalah semata-mata agar raja-raja tidak dilupakan oleh anak-anak, cucu-cucu dan keturunannya, karena ada dua bahaya kebodohan yaitu kita merasa sebagai raja-raja besar atau orang lain menganggap kita orang-orang yang tak berarti.⁴⁰

Tradisi bagi pencatatan masa lampau ini dimulai pada masa pemerintahan Karaeng Patinggaloang (1600-1654), yang dikenal telah menyuruh seorang Ambon pelarian di Makassar agar menulis sejarah Maluku dalam bahasa Melayu. Sebagai menteri utama kerajaan Makassar, ia membuat pembaharuan-pembaharuan istimewa dalam urusan pemetaan, letak istana, penerjemahan naskah-naskah kemiliteran dari bangsa Portugis, Turki, dan Melayu ke dalam bahasa Makassar. Di samping itu, kebiasaan menuliskan kelahiran, perkawinan, dan perceraian dalam keluarga raja, kedatangan kapal dan utusan, pembangunan benteng dan istana serta penggunaan sistem penanggalan ganda, yakni Masehi dan Hijriah.⁴¹

⁴⁰ Anthony Reid dan David Merr, (ed.), Asia Tenggara Dalam Kurun Niaga 1450-1680 Jilid I, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1992), hlm. 275, yang dikutip Sarkawi, *Ibid.*

⁴¹ J. Noorduyn, *Ibid.*, hlm. 134 dan Anthony Reid, dan David Merr, (ed.), *Ibid.*, masing-masing dalam kutipan Sarkawi, *Ibid.*

Pendidikan tradisional juga mengalami perkembangan pada masa pemerintahan I Mariogau' Daeng Bonto bergelar Karaeng Lakiung (gelar anumerta Karaeng Tunipallangga) sebagai raja Gowa ke-10. Hal itu ditandai dengan diangkatnya seorang pejabat istana yang bergelar *Tumakkajannangang ana' bura'ne*.⁴² Tugasnya adalah mengepalai dan mengawasi anak-anak para bangsawan di seluruh kerajaan. Pejabat ini juga yang bertugas menyalurkan anak-anak bangsawan ke berbagai pendidikan yang sesuai dengan bakatnya masing-masing.⁴³ Pada masa pemerintahan raja Gowa ke-10 ini juga dikembangkan keterampilan seperti pandai besi, pembuat bangunan rumah dan perahu, pembuatan sumpit, senjata dan lain-lain.

Setelah agama memeluk agama Islam dan menjadikannya sebagai agama resmi kerajaan pada tanggal 9 November 1607, sistem pendidikan tradisional semakin berkembang. Masjid Kalukubodoa (Tallo-Gowa) dijadikan sebagai salah satu pusat pengajian Islam yang dikunjungi oleh siswa baik dari kerajaan Gowa maupun dari segenap negeri-negeri Bugis-Makassar lainnya yang telah memeluk agama Islam. Bahkan pendidikan dan pengajian di mesjid-mesjid dan langgar semakin berkembang pada masa pemerintahan raja Gowa ke-15 I Mannuntungi Daeng Mattola Karaeng

⁴² Mattulada, *Op. Cit.*, hlm. 13-14.

⁴³ Selain penyaluran ke berbagai pendidikan, seorang anak bangsawan yang dipersiapkan menerima warisan dalam salah satu jabatan pemerintahan diberikan satu daerah khusus yang disebut *bate ana karaeng*. Di daerah inilah mereka dididik sebagai kepala daerah khusus. Mereka diberi hak menghadiri pertemuan-pertemuan dewan adat dan juga dilatih mengeluarkan pendapatnya dalam pertemuan itu. Hasil kerja seorang anak bangsawan dalam memerintah daerah *bate ana karaeng* mendapat penilaian dari para pembesar di pusat, terutama oleh *sombaya* (raja) sendiri. Mereka juga harus menempuh ujian akhir seperti keperwiraan, ketangkasan mempergunakan bermacam-macam senjata, menunggang kuda dan berburu. Tradisi ini menunjukkan bahwa syarat untuk menduduki jabatan adalah status sosial, kecerdasan, keterampilan dan bakat. Sarkawi, *Ibid*.

Lakiung atau nama islamnya Sultan Malikussaid (1637-1653). Tiap-tiap *bate* (negeri) sudah memiliki mesjid. Malah di tiap-tiap kampung sudah memiliki *langgara'* (langgar). Mesjid dan langgar tersebut, selain dipergunakan untuk shalat, juga dipergunakan sebagai tempat pengajian agama bagi anak-anak muda dikampung itu. Guru yang mengajarkan Alquran dan ilmu-ilmu Islam lainnya disebut *anrong-gurunta* atau *gurunta*.⁴⁴

Bukan hanya itu penulisan dan penyalinan (translasi) buku-buku agama Islam dari bahasa Melayu ke bahasa Makassar (*lontara*) semakin giat dilaksanakan. Berbagai *lontara* yang asalnya dari bahasa Melayu diduga berasal dari zaman permulaan perkembangan Islam di Sulawesi Selatan (abad ke-17 dan 18), sampai sekarang masih populer di kalangan orang tua-tua Bugis-Makassar.⁴⁵

2: Pendidikan Modern

Perkembangan pendidikan di Indonesia mendapati tahapannya menjadi lebih progresif ketika memasuki tahun 1900, yakni era Ratu Juliana berkuasa di kerajaan Belanda. Van Deventer yang menjabat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda menerapkan politik etis (*Etische Politiek*) pada tahun 1899 dengan motto "de Eereschuld" (hutang kehormatan) dan slogan "*Educatie, Irigatie, Emigratie*". Prinsip-

⁴⁴ Mattulada, *Ibid.*, hlm. 29.

⁴⁵ *Lontara* yang dimaksud antara lain: (1) *Lontara* perkawinan antara Sayidina Ali dengan Fatima, putri Rasulullah, (2) *Lontara* Nabi Yusuf dan percintaan Laila dan Majnun, (3) *Sura' bukkuru* yang dalam bahasa Bugis dikenal dengan *lontara pau-paunna Sultanul Injilai*, (4) Budi Istihara, (5) *Kitta faraid* (Kitab Hukum Pewarisan), (6) *Kitta Nika* (Kitab Hukum Perkawinan), (7) *Lontara'na Sehe Maradang*, (8) *Lontara* tentang peperangan Nabi Muhammad dengan raja Hindi, (9) Berbagai mukjizat Nabi Muhammad, dan (10) *Lontara* tentang wewenang *kali* (kadhi) menurut *sara'* dan banyak yang lain. *Ibid.*, hlm. 28. Lihat juga Sarkawi, *Op. Cit.*

prinsip atau arah etis (*etische koers*) yang diterapkan di bidang pendidikan pada masa ini adalah: (1) Pendidikan dan pengetahuan Barat diterapkan sebanyak mungkin bagi pribumi. Bahasa Belanda diupayakan menjadi bahasa pengantar pendidikan; (2) Pendidikan rendah bagi pribumi disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Sistem pendidikan pada masa ini belum lepas dari pola stratifikasi sosial yang telah ada, dan beroleh pengesahan legal sejak tahun 1848 dari penguasa kolonial. Dalam stratifikasi resmi tersebut dinyatakan bahwa penduduk dibagi kedalam 4 (empat) golongan: (1) Golongan Eropa; (2) Golongan yang dipersamakan dengan Eropa; (3) Golongan Bumiputera; dan (4) Golongan yang dipersamakan dengan Bumiputera. Tahun 1920, rumusan ini mengalami revisi menjadi seperti berikut ini: (1) Golongan Eropa; (2) Golongan Bumiputera; dan (3) Golongan Timur Asing. Perlu dicatat bahwa untuk golongan pribumi (bumiputera), secara sosial terstratifikasi sebagai berikut: (1) Golongan bangsawan (aristokrat) dan pemimpin adat; (2) Pemimpin agama (Ulama); dan (3) Rakyat biasa.⁴⁶

Secara umum, sistem pendidikan di Indonesia pada masa penjajahan Belanda sejak diterapkannya Politik Etis dapat digambarkan sebagai berikut: (1) Pendidikan dasar meliputi jenis sekolah dengan pengantar Bahasa Belanda (ELS, HCS, HIS), sekolah dengan pengantar bahasa daerah (IS, VS, VgS), dan sekolah peralihan. (2) Pendidikan lanjutan yang meliputi pendidikan umum (MULO, HBS, AMS) dan pendidikan kejuruan. (3) Pendidikan tinggi.⁴⁷

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ *Ibid.*

Pendidikan Modern Di Makassar

Pendidikan modern di Makassar dirintis oleh seorang pendeta yang bernama Benjamin Fredrick Matthes bersama dua orang kawannya mendirikan *kweekschool* (sekolah guru) pada tahun 1876. Pada tahun 1880, pemerintah kolonial mengambil alih sekolah itu dan mengangkat Matthes sebagai direktornya. Pengambilalihan *kweekschool* oleh pemerintah kolonial sekaligus menandai munculnya pendidikan formal di Makassar.⁴⁸ Pengambilalihan *kweekschool* tersebut tidak dengan sendirinya menyuburkan pendidikan di Makassar. Bahkan, dibanding dengan daerah lainnya (misalnya Manado), perkembangan pendidikan di Makassar relatif lebih lambat.

Perkembangan pendidikan baru mulai tampak ketika pemerintah kolonial mulai membuka sekolah rendah seperti *sekolah desa* dan *Inlandsche School* (sekolah pribumi) bagi anak-anak keluarga terkemuka. Di sekolah-sekolah tersebut siswa diberi pelajaran berhitung, menulis dan membaca untuk disiapkan menjadi pegawai rendah administrasi kekuasaan Hindia Belanda.

Kehadiran *kweekschool* di Makassar tidak dapat dipisahkan dengan peran Matthes⁴⁹ di daerah ini. Pada bulan Juli 1876, Matthes membuka *kweekschool*⁵⁰ yang

⁴⁸ *Indische Gids*, 1885: 1567-68; AVGCO, 1879 No. 132/1 dalam kutipan Sarkawi, *Ibid*.

⁴⁹ Matthes lahir di Amsterdam pada 16 Januari 1818 dari perkawinan H.J. Matthes dengan W.M.E. Hayer (ENI, 1919:689) Pada tahun 1873, Matthes yang saat itu tinggal di Belanda, setelah seperempat abad mempelajari bahasa Bugis dan Makassar di Sulawesi Selatan sebagai utusan *Nederlandsch Bijbelgenootschap* (NEG) oleh pemerintah diminta agar kembali ke Makassar dalam dinas negara. Matthes diminta untuk membuka *kweekschool* bagi guru pribumi dan untuk mendidik para juru bahasa di Makassar. Untuk membantunya, pada tahun 1874 pemerintah memperbantukan L.W.Th. Schmidt yang bekerja sebagai guru di Hindia Belanda dan memiliki ijazah sebagai pegawai bagi bahasa Melayu dan bahasa pribumi lainnya. Pada tanggal 1 Oktober 1875 keduanya berangkat ke Makassar. (IG,II, 1885: 1567-1568) dalam kutipan Sarkawi, *Ibid*.



oleh penduduk disebut sebagai "sekolah raja". Selain Schmidt dan H.W. Bosman, Matthes juga dibantu oleh La Mangewa Daeng Manasa. Yang disebut terakhir adalah guru yang membantu dalam bidang bahasa Bugis dan Makassar.⁵¹ Pada 31 Oktober 1879 atas permohonan sendiri, Matthes mengundurkan diri sebagai direktur dan diganti oleh Schmidt dan pada tahun 1880 Matthes kembali ke Belanda.⁵² Sejak saat itu *kweekschool* mengalami kemunduran drastis.

Setahun sebelum reorganisasi, yakni pada akhir tahun 1885, *kweekschool* di Makassar memiliki 31 orang siswa dan sejak tahun 1886 jumlah siswa sekolah itu mengalami penurunan. Penurunan itu disebabkan oleh reorganisasi yang ditandai dengan keluarnya *Staatsblad* No. 189 tahun 1885, yang menetapkan antara lain bahwa sejak 1 Januari 1886 jumlah maksimal calon guru yang diterima di *kweekschool* Makassar dikurangi dari 50 menjadi 25 orang.⁵³

⁵⁰ Pada awalnya sekolah yang dibuka Matthes (1876) yang bertujuan mencetak guru mengalami kesulitan dalam mendapatkan siswa. Siswa yang tertampung sangat sedikit yakni sekitar 20 orang. Umumnya siswa sekolah berasal dari keluarga raja dan atau kerabat raja yang pernah memperoleh pendidikan privat di rumah masing-masing. Inilah salah satu alasan sekolah ini disebut oleh penduduk sebagai sekolah raja. Pada akhir tahun 1878 di sekolah ini terdapat 18 guru bantu, 16 pengurus pembantu dan 5 juru bahasa. Sementara itu, pada tahun pelajaran 1879/1880, sekolah ini memiliki 39 siswa dan tiga guru bantu (AVCO, 1879:68-71).

⁵¹ *Kweekschool* yang semula tidak hanya bertujuan mendidik guru pribumi, tetapi juga juru bahasa dan pegawai pribumi kini oleh pemerintah Hindia Belanda dibatasi hanya untuk mendidik calon guru. Menurut pemerintah Belanda penciptaan juru bahasa Bugis dan Makassar lebih baik dilakukan pada biro pribumi di kantor gubernur (KV, 1880:92, STNI, 1880 No.77) dalam kutipan Sarkawi, *Ibid*.

⁵² AVGO, 1879 No. 132/1, IG, Jilid II, 1885: 1567-1568 dalam kutipan Sarkawi, *Ibid*.

⁵³ STNI, 1885 No. 189. Pengurangan jumlah siswa ini disebut oleh Jhs. J.K.W. Quarles van Ulfrod sebagai "hukuman mati" bagi *kweekschool* untuk guru pribumi di Makassar. Re-organisasi ini akhirnya menjadi perdebatan di parlemen negeri Belanda. Perdebatan bermula ketika Quarles mengirimkan tulisannya pada majalah *Vederland* tanggal 10 November 1885 dan dalam majalah *Indische Gids* pada Desember 1885 dan artikel pada 29 dan 30 November 1885 serta usulannya pada Majelis Tinggi Parlemen (IG, 1885, II, hlm. 1567-1568). Menurut Quarles apa yang disampaikan oleh menteri urusan jajahan kepada majelis tinggi dalam kasus *kweekschool* di Makassar adalah

Untuk memenuhi kebutuhan guru⁵⁴ yang sangat mendesak, Pemerintah Belanda kemudian membuka *Opleiding School voor Indlandsche Ambtenaren* (OSVIA). Pendidikan OSVIA atau *Sekolah Latihan bagi Pegawai Pribumi* sangat berkaitan dengan pendekatan "elitis" yang ditempuh oleh J.H. Abendanon, direktur pendidikan "etis" yang pertama (1900-1905). Di bawah Abendanon, pada tahun 1900 *Hoofdenscholen* (sekolah para kepala) yang lama diubah menjadi sekolah yang direncanakan untuk menghasilkan pegawai-pegawai pemerintahan dan diberi nama baru OSVIA.⁵⁵ Sekolah yang secara resmi dibuka pada tanggal 17 Oktober 1910 dengan lama studi enam tahun dan menerima lulusan sekolah-sekolah dasar berbahasa Belanda. OSVIA menerima siswa tidak hanya berasal dari Sulawesi Selatan, tetapi juga dari Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur, Timor, Manado, dan Ternate.⁵⁶

tidak berarti. Menurutnya, dia dan Matthes lebih mengerti apa yang terjadi di Hindia Belanda jika dibandingkan dengan menteri jajahan. Akan tetapi, pemerintah Belanda tetap pada keputusannya untuk membatasi jumlah siswa *kweekschool* Makassar dari 50 menjadi 25 siswa terhitung 1 Januari 1886. Sejak pengurangan itu, jumlah siswa *kweekschool* tiap tahun mengalami penurunan. Pada tahun 1886, 1887, 1889, dan 1890 jumlah siswanya berturut-turut 25, 24, 23, dan 22 (KV, 1887-1891). Penurunan ini berlanjut terus sampai dihapusnya sekolah ini pada Oktober 1910. Untuk memenuhi kebutuhan guru yang merupakan kebutuhan mendesak di Makassar maka dibukalah *Opleiding School Voor Indlandsche Ambtenaren* (OSVIA) yang di dalamnya juga dididik calon pegawai. Lihat Sarkawi, *Ibid*.

⁵⁴Problem kekurangan guru di Makassar merupakan masalah serius dalam upaya meningkatkan jumlah sekolah untuk memajukan pendidikan masyarakat. Di samping itu, mendidik anak-anak bangsawan dan melatih para calon pegawai juga merupakan kebutuhan mendesak. Untuk memenuhi kedua kebutuhan tersebut maka sekolah kombinasi untuk pegawai negeri dan guru (OSVIA) didirikan di Makassar yang ditetapkan lewat Surat Keputusan Pemerintah tanggal 10 Agustus 1910 No. 50. Kombinasi tersebut membuat OSVIA Makassar berbeda dengan OSVIA di daerah lainnya seperti Bandung, Magelang, dan Probolinggo yang berdiri sendiri. Sarkawi, *Ibid*.

⁵⁵Bijblad STNI, 1900 No. 5516. dalam kutipan Sarkawi, *Ibid*.

D. Sistem Penerimaan Siswa

Sistem penerimaan siswa pada masa pemeritahan Belanda disesuaikan dengan tujuan politiknya dalam mempertahankan kekuasaannya.⁵⁷ Secara umum dapat dilihat bahwa penyelenggaraan pendidikan kolonial berorientasi pada prinsip-prinsip garis warna (*color line*), diskriminasi, segregasi, dan nonakulturatif.⁵⁸ Prinsip-prinsip ini diimplementasikan dengan realisasi pendidikan yang dikalisifikasikan menurut pembagian golongan masyarakat kolonial, yakni untuk golongan Eropa, Timur Asing (Cina) dan golongan pribumi kemudian penyelenggaraan pendidikan dibedakan menurut status sosial, yakni pendidikan untuk kaum elite dan pendidikan untuk rakyat biasa. Differensiasi menurut golongan ras dan status sosial itu dipertegas dengan pembedaan dalam hal penggunaan bahasa pengantar, yakni bahasa Belanda untuk

⁵⁶ AVIO, 1910: 67. Untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan siswa dipungut uang sekolah yang berkisar antara f 1-10 sebulan. Akan tetapi, jika jumlah penghasilan orang tua atau walinya kurang dari f 150 sebulan maka seorang siswa mendapatkan pelajaran secara gratis dengan jalan mengajukan permohonan pada pihak sekolah. Sarkawi, *Ibid.*

⁵⁷ Tujuan utama ini tidak berubah walaupun di negeri Belanda terjadi pergeseran dari politik kolonial liberal ke politik etis. Oleh karena itu, pendidikan sebagai instrumen yang sangat penting bagi berlangsungnya kekuasaan kolonial di Indonesia selalu diarahkan pada pencapaian tujuan. Dalam hal ini yang terpenting adalah untuk mengisi kekurangan tenaga pegawai dalam birokrasi kolonial di tingkat bawah (lokal) atau menjadi pegawai pada perusahaan-perusahaan industri dan perdagangan swasta yang erat hubungannya dengan pemerintah. J.S. Furnivall, Educational Progress in Southeast Asia, (New York: International Secretariat Institute at Pasific Relations, 1943), hlm. 35 dan Mestika Zed, Pendidikan Kolonial dan Masalah Distribusi Ilmu Pengetahuan: Suatu Perpektif sejarah, dalam SEJARAH, Pemikiran, Rekonstruksi, Perspepsi I (Jakarta: MSI-Gramedia, 1991), hlm. 19.

⁵⁸ Djoko Suryo, Pendidikan, Diferensiasi Kerja & Pluralisme Sosial: Dinamika Sosial Ekonomi 1900-1990, Makalah disampaikan pada Konggres Sejarah Nasional Indonesia di Jakarta, Tanggal 12-15 Nopember 1996.

pendidikan orang-orang Eropa dan golongan elite dan bahasa daerah bagi pendidikan golongan rakyat biasa.⁵⁹

Realisasi lebih lanjut dari diferensiasi atas ras, status sosial maupun bahasa tersebut dapat dilihat pada pengaturan penyelenggaraan pendidikan dasar yang termuat dalam *Staatsblad* Tahun 1893, No. 125. Dalam *Staatsblad* tersebut disebutkan bahwa pendidikan dasar di Hindia Belanda dibedakan atas Sekolah Dasar Kelas Satu (*De Eerste Klasse School*) yang diperuntukkan bagi anak-anak para pemuka, tokoh terkemuka dan terhormat bumiputera dan sekolah dasar Kelas Dua (*De Tweede Klasse School*) yang diperuntukkan bagi bumiputera pada umumnya.⁶⁰

Dalam menerima siswa, khususnya untuk jurusan pemerintahan, OSVIA memiliki aturan sebagai berikut. Kategori A diperuntukkan bagi siswa yang orang tuanya menjabat pamong praja atau keturunan pamong praja. Kategori B adalah siswa yang berasal dari keturunan bangsawan dan kategori C adalah mereka yang tidak termasuk kategori A dan B. Mereka yang berkategori A dan B bila tamat HIS segera diarahkan ke pendidikan jurusan pemerintahan, sedangkan yang berkategori C

⁵⁹Menurut Vastenhouw (1964), sistem pendidikan dualistis di atas adalah ciri khas pendidikan di Indonesia pada masa kolonial. Diferensiasi antara kedua jenis pendidikan itu pada hakekatnya jauh lebih besar daripada perbedaan antara kedua macam bahasa pengantar tersebut. Pendidikan berbahasa pengantar Belanda tersusun lengkap dan terdiri atas pendidikan rendah, menengah, kejuruan dan pendidikan tinggi. Pada tahun 1940 jumlah siswa sekitar 180.000 orang, tetapi biaya yang dikeluarkan untuk pendidikan relatif tinggi yakni sekitar 21 juta rupiah, sedangkan pengeluaran pemerintah seluruhnya untuk pendidikan berjumlah kira-kira 33 juta rupiah. Jadi 2/3 dari pengeluaran itu dipergunakan untuk membiayai pendidikan berbahasa pengantar Belanda. Di lain pihak, pendidikan yang berbahasa pengantar bumiputera memiliki susunan yang tidak lengkap dan hanya meliputi pendidikan rendah yang sangat sederhana dengan jumlah siswa lebih dari 2 juta orang. M. Vastenhouw, *Inleiding tot de voor Oorlogsche Paedagogische Problemer in Indonesia*, (Groningen: J.B. Wolter, 1964) dalam kutipan Sarkawi *Ibid.*

⁶⁰ Sarkawi *Ibid.*

dapat melanjutkan ke OSVIA dengan mendapat surat rekomendasi dari kepala distrik di wilayahnya. Untuk mengetahui kategori seorang siswa, kepala sekolah mempelajari kategori seorang siswa yang dibuat dan disetujui oleh kepala distrik. Silsilah tersebut dikirim kepada *Inspecteur Inlands Onderwijs* (Pegawai Pendidikan Pribumi) yang berkedudukan di Makassar untuk memperoleh persetujuan apakah siswa yang bersangkutan berhak menempuh pendidikan di OSVIA. Hasil seleksi ini akan dikirim kepada residen, yang kemudian mengeluarkan surat keputusan siapa-siapa yang berhak memasuki tahun ajaran berikut di OSVIA.⁶¹

Pada masa pendudukan Jepang, sistem penerimaan siswa yang demikian dihapus dan semua sekolah dibuka berdasarkan golongan masyarakat diseragamkan menjadi sekolah rakyat (sekolah dasar), sekolah lanjutan pertama dan menengah dengan lama studi masing-masing 6 tahun, 3 tahun dan 3 tahun. Semua masyarakat dapat masuk sekolah yang sama tanpa ada diskriminasi berdasarkan golongan dan status sosial. Yang jelas sistem penerimaan siswa oleh Jepang disesuaikan dengan kebutuhan perang melawan sekutu.

⁶¹Ben Wowor, dkk., Drs. H.R. Ticoalu: Sebuah Biografi, Profil Seorang Abdi Masyarakat. (Manado, Yayasan Drs. H.R. Ticoalu, 1993) hlm. 6-7. Di sekolah ini siswa menerima pelajaran bahasa Belanda, Melayu, Bugis, Makassar, Geografi, Sejarah, Ilmu Alam, Berhitung, dan Menulis Indah, sedangkan yang memilih untuk menjadi calon pegawai mendapat tambahan pelajaran seperti Prinsip-prinsip Agraris, Ilmu Ekonomi Negara, Prinsip-prinsip Negara dan Administrasi Hukum, Ilmu Hukum, dan Ilmu Ekonomi Pertanian. Sejak didirikannya tahun 1910 sampai pada tahun 1931, OSVIA Makassar memiliki peminat yang cukup besar dan stabil. Sulawesi Selatan merupakan pemasok siswa yang paling banyak disusul Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur, Timor, Manado, Ternate, dan Ambon (KV, 1910-1927; AVVO, 1933: 85). Namun demikian, sekolah yang semula berdiri atas hasil reorganisasi dari *kweekschool* ini kembali menghadapi persoalan yang sama. Pada akhir tahun ajaran 1933/1934 sekolah ini dihapus dan selanjutnya digabung dengan MULO dengan jalan menambahkan satu kelas lanjutan selama satu tahun. Re-organisasi dilakukan dengan maksud penghematan anggaran. Data tentang perkembangan sekolah ini setelah digabung dengan MULO tidak ditemukan, kecuali disebutkan bahwa pada akhir tahun pelajaran 1936/1937 semua siswa dari bekas OSVIA telah lulus (AVVO, 1939: 42) Sarkawi, *Ibid.*

E. Reaksi Masyarakat terhadap pendidikan

Reaksi masyarakat terhadap pendidikan di Makassar sangat bagus. Apresiasinya dapat dilihat pada tingginya minat masyarakat terhadap pendidikan⁶². Hanya saja pendidikannya masih pendidikan tradisional dan dinikmati oleh golongan bangsawan saja.⁶³ Pada masa kedatangan Islam pun demikian, bahkan respon masyarakat terhadap pendidikan semakin bertambah. Apalagi setelah Islam resmi dijadikan sebagai agama kerajaan oleh I Manggerangi Sultan Alauddin. Mesjid dan langgar hampir terdapat di semua kampung sebagai pusat pendidikan agama Islam (*manggaji*) selalu ramai dikunjungi oleh masyarakat.⁶⁴

Pada pemerintahan Belanda, kaum kerabat dekat dari bekas raja dan kaum bangsawan yang dalam strata sosial pada masa lampau tergolong bangsawan tinggi tidak banyak menggunakan kesempatan untuk belajar di sekolah formal. Mereka tidak tertarik pada lembaga-lembaga pendidikan yang didirikan oleh pemerintah kolonial Belanda, karena beranggapan dengan memasuki lembaga pendidikan kolonial berarti mereka akan di "Belandakan" dan dijadikan *ata* (budak) yang mengabdikan pada kepentingan kolonial. Akan tetapi, dalam perkembangannya, khususnya ketika hampir seluruh kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan dikuasai dan setelah pemerintah mengembangkan suatu aparat administrasi kekuasaan Hindia

⁶² Misalnya pendidikan dengan sistem padepokan, seorang bangsawan, ksatria atau pejabat kerajaan lainnya meminta guru datang ke istana untuk mengajar putra-putrinya. Gunawan, *Ibid.*, hlm. 5-6.

⁶³ Tentu saja generalisasi ini ada pengecualian bagi masyarakat biasa yang dekat dengan kekuasaan.

⁶⁴ Sarkawi, *Ibid.*

Belanda, pemerintah kolonial mulai membuka sekolah rendah seperti *sekolah desa* dan *Inlandsche School* (sekolah pribumi) bagi anak-anak keluarga terkemuka. Walaupun banyak sekolah yang dibuka akan tetapi jumlah murid tidak memenuhi target. Ini menandakan respon masyarakat tidak terlalu bagus. Alasannya adalah *pertama*, kehidupan penduduk belum pulih dari situasi peperangan; *kedua*, penduduk (orang tua) curiga terhadap tujuan sekolah (pendidikan) dan kebanyakan di antara mereka beranggapan bahwa dengan memasuki sekolah Belanda akan dijadikan sebagai tentara Belanda; dan *ketiga*, penduduk (orang tua) menganggap bahwa anak-anaknya akan dibawa ke Negeri Belanda setelah tamat sekolah.⁶⁵

Pada masa pendudukan Jepang, walaupun sistem pendidikan berlangsung tanpa diskriminasi rasial dan golongan, tetapi justru reaksi masyarakat malah semakin menurun dalam menuntut pendidikan terutama bagi yang beragama Islam. Ini dikarenakan oleh adanya perintah di sekolah sebelum masuk kelas untuk membungkuk ke arah utara, tempat kaisar Jepang berada dan juga sebagai penghormatan bagi kaisar Jepang di Tokyo. Oleh masyarakat yang beragama Islam hal yang dianggap musyrik dan bertentangan dengan agama.

⁶⁵Mardanas Safwan dan Sutrisno Kuntoyo (Ed.), *Ibid.*, hlm. 56.

BAB III

PENDIDIKAN PADA MASA PENDUDUKAN JEPANG

A. Perkembangan Pendidikan dan Sebarannya Sebelum Kedatangan Tentara Jepang

Keadaan pendidikan sebelum kedatangan Jepang di Makassar berlangsung (diselenggarakan) dengan sangat terbatas dan diskriminatif. Tidak semua lapisan masyarakat mendapat hak yang sama dalam menempuh pendidikan. Banyak sekolah yang dibangun berdasarkan kelompok-kelompok dan golongan masyarakat. Itupun jumlahnya tidak terlalu banyak bila dibandingkan dengan jumlah sekolah yang di Pulau Jawa dan Sumatera.

Penyelenggaraan pendidikan oleh Pemerintah Kolonial Belanda di Sulawesi Selatan dimulai dari Makassar sebagai Ibu Kota *Gubernemen Celebes*. Usaha pendidikan yang dirintis oleh Benjamin Frederik Matthes adalah *Kweekschool* pada tahun 1876.¹ Kemudian sekolah tersebut diambil alih pengeloalaanya oleh Pemerintah Kolonial pada tahun 1898 dan dipersiapkan untuk mendidik calon pamongpraja. Sedangkan B.F. Matthes sendiri lebih tertarik mengumpulkan kesusastraan kuno.

¹ Penamaan yang cukup tinggi tersebut dimaksudkan sebagai penghormatan terhadap guru. mungkin juga karena para raja ikut mendukung pendiriannya dan murid-muridnya pun pada umumnya berasal dari keluarga raja dan bangsawan. B.F. Matthes dibantu oleh La Mangewa dan Daeng Manassa mengajar di sekolah tersebut. Guru yang terakhir diangkat khusus untuk mengajar bahasa daerah. Lihat Mardanas Safwan dan Sutrisno Kuntoyo (ed)., Sejarah Pendidikan Sulawesi Selatan. (Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Sulawesi Selatan), hlm. 51-52.

Dengan adanya sekolah rintisan B.F. Matthes, sekolah-sekolah formal lainnya sudah mulai dibuka secara resmi, seperti "sekolah kelas dua" dengan nama *Gouvernemen School* di Butung *Weg* pada tahun 1904. Pada tahun yang sama, didirikan lagi sekolah serupa di Lompoganrang di dekat Lapangan Karebosi (sekarang Jalan Ammanagappa). Setahun kemudian, yakni pada tahun 1905 kedua sekolah tersebut diubah namanya menjadi *Inlandsche School* (masyarakat: sekolah Melayu). Untuk menjalankan dan mengawasi kinerja operasional kedua sekolah tersebut, maka dibentuklah sebuah badan dengan nama *School Commisie*.²

Usaha pembukaan sekolah-sekolah yang baru di Makassar kemudian tertunda pelaksanaannya, karena Pemerintah Kolonial lebih berkonsentrasi pada usaha untuk menaklukkan Sulawesi Selatan secara menyeluruh. Kekuasaan kolonial Belanda di daerah Sulawesi Selatan baru dimulai pada tahun 1910, yaitu sesudah mengadakan "kampanye" militer selama 5 tahun untuk menaklukkan daerah itu.³ Khusus Kota Makassar sebagai pusat kekuasaan Belanda di Sulawesi Selatan telah sekitar dua abad lamanya.

Pada tahun 1906, dibuka lagi sekolah dengan nama *Hollandsche Ambonsche School* (HAS) yang dikhususkan bagi komunitas Ambon di Makassar sebagai balas jasa karena telah membantu tentara Belanda dalam menyerang dan menaklukkan raja-raja yang ada di Sulawesi Selatan (masyarakat: *sikola* Ambong). Tahun 1907 dibuka

² *Ibid.*, hlm. 52.

³ Barbara S. Harvey, *Sulawesi Selatan: Boneka dan Patriot*, (Manuskrip Tanpa Tanpa Kota Penerbit, Penerbit dan Tahun Diterbitkan), hlm. 213-214.

lagi sebuah HAS di Tabaringan dan *Hollandsche Chineesche School* (HCS) di Timor *Weg*⁴ yang khusus diperuntukkan bagi komunitas Cina yang sebagian besar berdomisili sekitar tempat itu yang dikenal dengan nama Kampung Cina.

Selain itu, di luar kota (tetapi masih dalam wilayah *Afdeling* Makassar) dirintis pula pembangunan beberapa sekolah tingkat dasar oleh Jenderal van Heutz yang diperuntukkan bagi penduduk desa pada tahun 1907. Pada tahun itu juga pendidikan kejuruan pun ikut didirikan seperti sekolah pertukangan dengan nama *Ambatht School* (masyarakat: sekolah amba) di Jalan Banda.

Walaupun jumlah sekolah telah cukup memadai, akan tetapi jumlah murid yang masuk sekolah tidak pernah memenuhi target. Alasannya adalah *pertama*, kehidupan penduduk belum pulih dari situasi peperangan; *kedua*, penduduk (orang tua) curiga terhadap tujuan sekolah (pendidikan) dan kebanyakan di antara mereka beranggapan bahwa dengan memasuki sekolah Belanda akan dijadikan sebagai tentara Belanda; dan *ketiga*, penduduk (orang tua) menganggap bahwa anak-anaknya akan dibawa ke Negeri Belanda setelah tamat sekolah.⁵

Selama enam tahun (1904-1910), Pemerintah kolonial Belanda hanya mengelola pendidikan formal saja (sekolah tingkat dasar). Kedua jenis pendidikan dasar itu masing-masing:

1. *Inlandsche School* dengan lama pendidikan lima tahun. Bahasa pengantarnya adalah bahasa Melayu. Guru-gurunya kebanyakan berasal dari Sumatera Barat,

⁴ *Op. Cit.*, hlm. 55.

⁵ *Ibid.*, hlm. 56.

Ambon dan Manado serta ditambah (dibantu) oleh guru-guru yang terdiri dari orang-orang Bugis Makassar.

2. *Volks School* (VS) dengan lama pendidikan tiga tahun. Mata pelajaran yang diberikan terbatas pada berhitung sederhana seperti Penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian, membaca seperti membaca huruf latin dengan bahasa melayu maupun bahasa daerah dengan aksara lontarak. Selain itu, ada juga yang mempelajari huruf-huruf Arab seolah-olah menjadi mata pelajaran wajib.

Hingga tahun 1910, keadaan sekolah/pendidikan formal dan sebarannya di Makassar cukup baik dengan jumlah sekolah sebanyak 33 buah dengan rincian bahwa untuk Kota Makassar, ada tiga buah *Inlandsche School* dan lima buah *Volks School*. Sementara untuk *Afdeling* Makassar, ada lima buah *Inlandsche School* dan 20 buah *Volks School*.

Selain *Volks School*, *Inlandsche School*, *Holland Ambonsche School* dan *Holland Chineesche School*, di Makassar ada juga sekolah lain yang dibangun di Jalan Sungai Tangka, yakni *Holland Inlandsche School* (HIS) pada tahun 1911. Kelebihannya ialah adanya pemberian materi bahasa Belanda bahkan penggunaannya dijadikan sebagai bahasa pengantar. Dengan adanya materi pengajaran bahasa Belanda di HIS, maka terbukalah kesempatan bagi suku Bugis, Makassar dan suku lainnya untuk mempelajari bahasa Belanda. Lulusan sekolah dipersiapkan untuk pendidikan lanjutan dan diperuntukkan hanya untuk menampung murid yang berasal dari dalam kota Makassar saja.

Pada tahun 1920 Pemerintah kolonial Belanda kemudian membuka lagi sekolah dengan *Vervolgschool* (VVS) yang merupakan sekolah lanjutan bagi tamatan *Volks School*. Dengan demikian sudah terdapat dua buah sekolah yang melaksanakan pendidikan hingga kelas lima, yakni *Inlandsche School* dan *Vervolgschool*. Jika di *Inlandsche School* dimulai dari kelas satu hingga tamat di kelas lima, maka di *Vervolgschool* hanya menangani kelas empat dan kelas lima, karena kelas satu hingga kelas tiga telah ditamatkan di *Volks School*. Walaupun kedua sekolah tersebut masing-masing lama pendidikannya hingga kelas lima, akan tetapi kualitas dari lulusannya berbeda. Lulusan *Vervolgschool* agak lebih baik bila dibandingkan dengan lulusan *Inlandsche School*. Hal ini disebabkan karena lulusan *Volks School* yang melanjutkan sekolahnya sampai ke *Vervolgschool* merupakan murid-murid yang memiliki kemampuan terbaik dan mempunyai keinginan kuat untuk melanjutkan sekolahnya (pelajaran).⁶

Pada tahun 1920, didirikan sekolah lanjutan pertama dengan nama *Middelbare Uitgebreid Lagere Onderwijs* (MULO) dan pengawasannya langsung berada di bawah Residen Sulawesi Selatan. MULO didirikan sebagai lanjutan HIS. Sedangkan bagi lulusan *Inlandsche School* dan VVS yang ingin melanjutkan pendidikannya di MULO, diwajibkan memasuki kelas persiapan (*Voorklas*) lebih dahulu selama dua tahun. Hingga tahun 1941 hanya terdapat sebuah MULO di Makassar yang mewakili daerah Sulawesi Selatan karena dianggap tingkat kesadaran pendidikan Masyarakat di Sulawesi Selatan belum selevel dengan tingkat kesadaran

⁶ *Ibid.*, hlm. 57-60.



pendidikan masyarakat yang berada di Pulau Jawa dan Sumatera. Murid Mulo diajarkan 4 bahasa antara lain; bahasa Belanda, bahasa Jerman, bahasa Inggris, dan bahasa Prancis. Lulusan MULO bisa melanjutkan pendidikannya ke *Algemeenne Middlebare School* (AMS) yang hanya ada di Batavia.⁷

Pada tahun 1921 Pemerintah kolonial Belanda mendirikan sekolah dengan nama *Opieldings School Voor Inlandsche Amtenaren* (OSVIA) di Makassar. Lama pendidikan sekolah ini dibagi ke dalam dua jenis, yakni OSVIA *Afdeling A* dengan lama pendidikan 2 tahun dan OSVIA *Afdeling B* dengan lama pendidikan 3 tahun.

Selain itu, ada juga sekolah yang didirikan khusus mencetak guru, yakni *Holland Inlandsche Kweekschool* (HIK). Sama halnya dengan OSVIA, murid-murid HIK juga harus melalui kelas permulaan selama 2 tahun. Di tahun ke-3 OSVIA mengkhususkan pelajarannya dalam bidang hukum (*rechten*), sedangkan HIK lebih memfokuskan pelajarannya pada bidang paedagogik (ilmu pendidik). HIK menggunakan bahasa pengantar bahasa Belanda. Guru-guru HIK kebanyakan orang Manado, Ambon dan kepala sekolahnya selalu orang Belanda. Sementara *Kweekschool* yang sebelumnya dipersiapkan untuk calon pamongpraja kembali dipersiapkan untuk mencetak guru. Bahasa pengantar yang digunakan di sekolah ini adalah bahasa Melayu.

Untuk menampung lulusan *Vervolg School*, maka didirikan lagi sekolah dengan nama *Normaal School* (NS) pada tahun 1925. Pada tahun 1930-an didirikan

⁷ *Ibid.*, hlm. 59-60.

pula sekolah pertanian dengan nama *Landbouw School*. Sekolah ini setingkat lebih tinggi dari VVS.

Hingga tahun 1941, jumlah *Volks School* (3 tahun) di Makassar ada 14 buah. *Volks School* dinamakan dengan *Gemeente School* oleh masyarakat. Sementara *Vervolg School* hanya ada 8 buah masing-masing tersebar di Kampung Wajo, Jalan Amanagappa, Jalan Mardekaya, Tabiringan, Maricaya, Kampung Layang, dan Kampung Mariso. Selain sekolah formal yang diasuh oleh pemerintah, ada juga sekolah swasta yang diasuh oleh zending, missie dan Muhammadiyah.⁸

Semua pengelolaan sekolah tersebut tetap ditangani oleh Pemerintah kolonial Belanda melalui Residen untuk sekolah lanjutan seperti MULO, Asisten Residen mengatur HIS dibantu oleh *Controleur*. Sedangkan Wedana (*Zelfbestuur*) bertugas mengawasi VS, VVS dan *Normaal School*. Surat tamat ijasahnya ditandatangani oleh pemerintah yang diwakili oleh *School Commisie*

Untuk menanggulangi masalah kekurangan tenaga guru yang sejalan seiring dengan terus bertambahnya jumlah sekolah yang di buka, maka Pemerintah kolonial Belanda terpaksa membuka kursus kilat guru dengan nama *Legang voor Onderwijs* (LVO) pada tahun 1920. kemudian pada tahun 1935 namanya diubah menjadi *Cursus voor Onderwijs* (CVO) dengan masa kursus dua tahun. Setelah masalah kekurangan guru dapat diatasi, maka Pemerintah kolonial Belanda membuka lagi sekolah guru

⁸ *Ibid.*, hlm. 62.

dengan nama *Opleidingschool voor Onderwijs* (OVO) dengan lama pendidikan tiga tahun sekitar tahun menjelang pecahnya Perang Dunia II.⁹

B. Kedatangan Tentara Jepang

Kedatangan tentara Jepang di Indonesia tidak lepas dorongan semangat dari *grand skenario* untuk mengembangkan pengaruh dan wilayahnya sebagai bagian dari rencana membentuk Asia Timur Raya yang meliputi Manchuria, Daratan China, Kepulauan Filipina, Indonesia, Malaysia, Thailand, Indo China dan Rusia di bawah kepemimpinan Jepang.¹⁰ Dengan konsep "*Hakko Ichiu*" (Kemakmuran Bersama Asia Raya) dan semboyan "Asia untuk Bangsa Asia", maka tentara Jepang mulai melakukan ekspansi ke berbagai negara di sekitarnya.¹¹

⁹ *Ibid.*, hlm. 64.

¹⁰ <http://peziarah.wordpress.com/2007/02/05/pendidikan-di-zaman-pendudukan-jepang>, **Pendidikan Di Zaman Pendudukan Jepang**, diakses pada tanggal 25 Januari 2008.

¹¹ Sebenarnya, sampai akhir tahun 1940, pimpinan militer Jepang tidak menghendaki melawan beberapa negara sekaligus, namun sejak pertengahan tahun 1941 mereka melihat, bahwa Amerika Serikat, Inggris dan Belanda harus dihadapi sekaligus, apabila mereka ingin menguasai sumber daya alam di Asia Tenggara. Apalagi setelah Amerika melancarkan embargo minyak bumi, yang sangat mereka butuhkan, baik untuk industri di Jepang, maupun untuk keperluan perang. Keadaan ini didukung dengan Jenderal Hideki Tojo menggantikan Konoe sebagai Perdana Menteri Jepang pada bulan Oktober 1941. Admiral Isoroku Yamamoto, Panglima Angkatan Laut Jepang, mengembangkan strategi perang yang sangat berani, yaitu mengerahkan seluruh kekuatan armadanya untuk dua operasi besar. Seluruh potensi Angkatan Laut Jepang mencakup 6 kapal induk (pengangkut pesawat tempur), 10 kapal perang, 18 kapal penjelajah berat, 20 kapal penjelajah ringan, 4 kapal pengangkut perlengkapan, 112 kapal perusak, 65 kapal selam serta 2.274 pesawat tempur. Kekuatan pertama, yaitu 6 kapal induk, 2 kapal perang, 11 kapal perusak serta lebih dari 1.400 pesawat tempur, tanggal 7 Desember 1941, akan menyerang secara mendadak basis Armada Pasifik Amerika Serikat di Pearl Harbor di Kepulauan Hawaii. Sedangkan kekuatan kedua, sisa kekuatan Angkatan Laut yang mereka miliki, mendukung Angkatan Darat dalam Operasi Selatan, yaitu penyerangan atas Filipina dan Malaya/Singapura, yang akan dilanjutkan ke Jawa. Kekuatan yang dikerahkan ke Asia Tenggara adalah 11 Divisi Infantri yang didukung oleh 7 resimen tank serta 795 pesawat tempur. Seluruh operasi direncanakan selesai dalam 150 hari. Admiral Chuichi Nagumo memimpin armada yang ditugaskan menyerang Pearl Harbor.

Sebelum kedatangan tentara Jepang di Makassar, terlebih dahulu telah bermukim sejumlah pengusaha yang berasal dari Jepang. Jenis usahanya adalah membuka toko-toko yang melayani kebutuhan masyarakat sehari-hari. Salah satu toko mereka yang terkenal dan ramai dikunjungi adalah Toko Koneko.¹² Di samping karena tempatnya strategis yang berada tepat pada jejeran toko di pusat kota, juga karena harga barang-barang jualannya lebih murah dibanding toko sejenis lainnya. Pengusaha tersebut adalah J. Ogata yang sesungguhnya bertugas sebagai intelejen Jepang, untuk mengumpulkan informasi tentang kemungkinan mendaratnya tentara Jepang di Makassar.¹³

Hari minggu pagi tanggal 7 Desember 1941, 360 pesawat terbang yang terdiri dari pembom pembawa torpedo serta sejumlah pesawat tempur diberangkatkan dalam dua gelombang. Pengeboman Pearl Harbor ini berhasil menenggelamkan dua kapal perang besar serta merusak 6 kapal perang lain. Selain itu pemboman Jepang tersebut juga menghancurkan 180 pesawat tempur Amerika. Lebih dari 2.330 serdadu Amerika tewas dan lebih dari 1.140 lainnya luka-luka. Namun tiga kapal induk Amerika selamat, karena pada saat itu tidak berada di Pearl Harbor. Tanggal 8 Desember 1941, Kongres Amerika Serikat menyatakan perang terhadap Jepang. Perang Pasifik ini berpengaruh besar terhadap gerakan kemerdekaan negara-negara di Asia Timur, termasuk Indonesia. Tujuan Jepang menyerang dan menduduki Hindia-Belanda adalah untuk menguasai sumber-sumber alam, terutama minyak bumi, guna mendukung potensi perang Jepang serta mendukung industrinya. Jawa dirancang sebagai pusat penyediaan bagi seluruh operasi militer di Asia Tenggara, dan Sumatera sebagai sumber minyak utama. Lihat <http://id.wikipedia.org/w/index/>, Sejarah Indonesia (1942-1945) Edisi 30 Desember 2007. Lihat juga <http://www.indonesiaindonesia.com/f/2382-indonesia-era-jepang/>, Indonesian: Era Jepang, Edisi Desember 2006. Keduanya diakses pada tanggal 28 Januari 2008.

¹² Bachtiar Kr. Leo (Informan, 75 Tahun) dalam A. Rasyid Asba (ed.), Katalog Sejarah Lisan Jepang Di Sulawesi Selatan, (Makassar: Pusat Kajian Multikultural dan Pengembangan Regional, Divisi Ilmu-ilmu Sosial dan Humaniora, Pusat Kegiatan Penelitian Universitas Hasanuddin bekerja sama dengan *Centre for Documentation and Area-Transcultural Studies (C-DATS)*, Tokyo University of Foreign Studies, 2007), hlm. 240-241.

¹³ Sarita Pawiloy dalam Muhammad Abduh dkk, Sejarah Perlawanan Terhadap Imperialisme Dan Kolonialisme Di Sulawesi Selatan, (Direktorat Sejarah Dan Nilai Tradisional, 1984), hlm. 345. Lihat Juga Mardanas Safwan dan Sutrisno Kuntoyo (ed.), *Op. Cit.*, hlm. 98 dan Suhardin Tjenne, Pendudukan Jepang Di Malimpung Tahun 1943 - 1945, (Makassar: Skripsi Jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Sastra Unhas, 1991), hlm. 11.

Ketika peperangan Asia Timur Raya meletus Jepang mencapai Makassar melalui Kendari. Informasi yang dikumpulkan intelejen J. Ogata menjadi petunjuk penting bagi kedatangan tentara Jepang. Pada tanggal 8 Februari 1942¹⁴ pada pukul 24.00 waktu Makassar, tentara Jepang berhasil mendarat di Makassar melalui Pantai Barombong¹⁵ Kabupaten Takalar tanpa perlawanan yang berarti dari pihak sekutu karena sebagian besar pasukan Belanda telah meninggalkan kota Makassar menuju Camba di Kabupaten Maros.¹⁶ Kemudian tentara Jepang berjalan kaki menuju kota Makassar yang diiringi dengan satuan pesawat pembom yang terbang di atasnya.¹⁷ Satu bulan kemudian tentara Jepang berhasil menguasai Sulawesi Selatan setelah memenangi dua pertempuran yang menentukan masing-masing di Enrekang dan Bone. Dalam pertempuran itu, pesawat pembom Jepang menjatuhkan bom pada tempat-tempat yang dianggap vital di wilayah sekutu.¹⁸

Kedatangan Jepang disambut cukup hangat oleh pemuka masyarakat. Mereka mengharapkan sesuatu perubahan yang membaik akibat kekalahan Belanda yang telah lama memelaratkan bangsa. Tokoh pergerakan seperti Lanto Daeng Pasewang, Wahab Tarru, Manai Sophian dan Andi Mattalatta¹⁹ yang telah lama mempunyai

¹⁴ Djajusman, 1978, hlm. 113 dalam Suhardin Tjenne., *Ibid.*, hlm. 22.

¹⁵ H. Bado Dg. Sija (Informan, 83 Tahun) dalam A. Rasyid Asba, *Op. Cit.*, hlm. 243.

¹⁶ Adang Dg. Gempo (Informan, 80 Tahun), *Ibid.*, hlm. 236.

¹⁷ Dg. Gammi (Informan, 86), *Ibid.*, hlm. 237.

¹⁸ Mardanas Safwan dan Sutrisno Kuntoyo (ed)., *Ibid.* dan Suhardin Tjenne, *Ibid.*

¹⁹ Bachtiar Kr. Leo dalam A. Rasyid Asba, *Ibid.*, hlm. 241.

hubungan rahasia dengan pendatang baru itu, cukup bergembira. Dan, memang tentara Jepang masa awal kekuasaannya berusaha menarik simpati penduduk, agak berhasil. Jepang seakan-akan menjadi bangsa yang membebaskan rakyat dari belenggu penjajahan.

Kehadiran tentara Jepang di Makassar disambut baik oleh tokoh-tokoh pergerakan karena dianggap sebagai penyelamat bangsa dari penjajahan Belanda. Di sisi lain tentara Jepang pada awal masa pendudukannya berusaha menarik simpati penduduk dan mempropagandakan dirinya sebagai bangsa yang akan membebaskan rakyat dari belenggu penjajahan. Dengan demikian pihak Jepang berhasil menumbuhkan keyakinan para tokoh-tokoh pergerakan di Makassar seperti Andi Mattalatta dan Manai Sophian (mantan komandan *Seinendan*),²⁰ karena membiarkan bendera Merah Putih untuk terus berkibar berdampingan dengan bendera Jepang. Begitupula dengan diakuinya kekuasaan raja-raja lokal, apalagi pasca diadakannya konferensi raja-raja yang mempertegas kedudukan raja-raja dalam struktur pemerintahan yang diinginkan pendudukan Jepang.²¹ Bahkan tokoh-tokoh pergerakan lokal yang berhaluan nasionalis telah membentuk panitia untuk menyambut kedatangan tentara Jepang, dengan nama "Panitia Keamanan Umum." Tujuannya

²⁰ Bachtiar Kr. Leo, *Op. Cit.*

²¹ Sanusi Dg. Matata, *Luwu Dalam Revolusi*, (Ujung Pandang: Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan Tenggara, 1977), Sarita Pawiloy, *Op. Cit.*, hlm. 346 dan Suhardin Tjenne, *Ibid.*, hlm. 12.

adalah untuk menggantikan tentara Belanda yang telah ditawan dalam memelihara keamanan dan ketertiban.²²

C. Sistem Pemerintahan Jepang

Pemerintahan Pendudukan Jepang di Indonesia pada tanggal 7 Maret 1942 mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 tentang pemerintahan yang akan dilaksanakan tentara Jepang. Undang-undang ini merupakan peraturan pokok tentang ketatanegaraan pada masa Pendudukan Jepang yang mengatur bahwa tentara Jepang melaksanakan pemerintahan Militer untuk sementara waktu di daerah yang dikuasainya agar ketertiban dan keamanan segera tercipta.²³

Berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut maka pemerintahan militer Jepang akan melanjutkan ketentuan pemerintahan sebelumnya berikut alat-alat perlengkapannya.²⁴ Kemudian wilayah Indonesia dibagi atas tiga wilayah pemerintahan yaitu Pemerintah Militer Angkatan Darat untuk Jawa dan Madura yang berkedudukan di Jakarta, pemerintahan Militer Angkatan Laut untuk Sumatera yang berkedudukan di Bukittinggi dan pemerintahan militer Angkatan Laut untuk

²²Barbara Sillars Harvey, Pemberontakan Kahar Muzakkar Dari Tradisi Ke DI/TII, (Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 1989), hlm. 92.

²³Pejabat tentara Jepang merupakan pemegang kekuasaan militer tertinggi termasuk kekuasaan yang dahulu berada di tangan Gubernur Jenderal. Semua lembaga pemerintahan dan kekuasaannya, hukum dan undang-undang dari pemerintah sebelumnya tetap diakui sah untuk sementara waktu, asalkan tidak bertentangan dengan aturan Pemerintah Militer. Tentara Jepang juga akan menghormati kedudukan dan kekuasaan pegawai yang setia kepada penguasa Jepang, begitu pula harta benda, jiwa yang sah dan agama sekalian rakyat yang tidak berdosa. Lihat Soegijanto Padmo, Desentralisasi Pemerintahan Daerah Di Indonesia, dalam <http://sejarah.fib.ugm.ac.id/artikel/php>, Edisi 13 Februari 2007. Diakses pada tanggal 1 Februari 2008.

²⁴Hal yang sama berlaku untuk jawatan vertikal seperti jawatan pos, polisi, kereta api, pegadaian, dan pekerjaan umum hanya saja pimpinan jawatan tersebut berada di tangan militer Jepang dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. *Ibid.*

Sulawesi, Borneo, Sunda Kecil, Maluku, dan Irian Barat yang berkedudukan di Makassar. Pemerintahan militer Jepang tidak dapat memikirkan tentang penyelenggaraan pemerintahan lokal sebab perhatian mereka tercurah pada mensukseskan perang Asia Timur Raya. Segala sesuatu yang mengangkut pemerintahan diarahkan pada tujuan mereka, yaitu mensukseskan perang tersebut. Dalam menghadapi peperangan militer Jepang yang sedang memuncak, maka pemerintahan harus sentralistis oleh karena itu desentralisasi harus ditiadakan.

Reorganisasi yang dilaksanakan oleh tentara Jepang adalah melaksanakan Perubahan Tata Pemerintahan Daerah yang termuat dalam Undang-Undang Tahun 1942 Nomor 27.²⁵ Pada tahun 1943 ditetapkan bahwa Kentyoo atau Bupati sebagai Kepala Wilayah di Kabupaten diwajibkan mengganti dan memegang kekuasaan yang dahulu dipegang oleh *Regentschaapraad* dan *College van Gecoominteerden san Sityoo* diwajibkan mengganti dan memegang kekuasaan yang dahulu dipegang oleh *Gemeenteraad* dan *College van Burgemeester en Wethouders*. Hal ini berarti bahwa kekuasaan dalam daerah yang mengurus rumah tangganya sendiri, yaitu kabupaten dan kota diserahkan kepada seorang pejabat saja dan Dewan yang ada dibekukan. Dengan demikian yang terjadi adalah pemerintahan tunggal. Pemerintah Militer

²⁵ Menurut Undang-undang tersebut Pulau Jawa dan Madura dibagi menjadi Daerah *Syuu* setaraf Keresidenan, Setiap *Shu* dibagi menjadi *Ken* atau Kabupaten dan *Si* setaraf *Styadsgemeente*. Disamping itu ada *Tokubetsu Si* atau *Stadsgemeente* Luar Biasa, kota yang istimewa yang ditunjuk oleh *Gunseikan*, Panglima Militer Jepang, yang mempunyai peranan penting dalam bidang ekonomi, sosial, politik, dan kebudayaan. Pada tingkat bawah ada *Gun* atau *Distrik*, *Son* atau *OnderDistrik*, dan *Ku* atau Desa. Daerah Swapraja atau berpemerintahan sendiri seperti kerajaan-kerajaan local disebut *Kooti*. Selanjutnya wilayah Propinsi dengan gubernurnya dihapus. Demikian pula *Afdeeling* dan *Asisten Residen*. *Ibid.*

Jepang hanya menyelenggarakan bidang dekonsentrasi. *Shuco* kekuasaannya lebih besar dari seorang Residen pada masa Kolonial Belanda. Karena ia mengerjakan tugas pemerintahan militer sehari-hari di bawah pengawasan dan atas nama *Gunseikan*. *Syuutjokan* juga diwajibkan membuat undang-undang yang terkenal dengan sebutan *Syuurei* yang mengatur segala urusan di wilayahnya baik ketataprajaan, militer, kepolisian, dan ekonomi. Sistem pemerintahan tunggal semacam itu berlangsung sampai September tahun 1943. Pada tahun itu dibentuk dewan baik di Pusat dan daerah yang bertugas memberi nasihat kepada pejabat tunggal tersebut. Karena sebatas penasihat maka kebijakan *Shucokan* tak bergeser karena ia menjalankan tugas atas nama *Gunseikan*. Terlebih lagi masa itu situasi peperangan semakin memuncak. Dengan menyerahnya militer Jepang kepada Sekutu lenyaplah kekuasaan militer Jepang yang meninggalkan akibat buruk pada lapangan pengetahuan dan pengurusan rumah tangga daerah.²⁶

Militer Jepang di bawah kendali Angkatan laut mengambil alih Makassar dari Pemerintah Kolonial Belanda pada tanggal 9 Februari 1942 yang disusul dengan daerah-daerah lainnya. Setelah itu, pihak Jepang mulai melakukan konsolidasi kekuatan dengan menjadikan Makassar sebagai markas besar Armada Barat daya Angkatan Laut Jepang dan sekaligus sebagai pusat pemerintahan sipil Angkatan Laut yang meliputi Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Sunda Kecil (Nusa Tenggara Barat dan

²⁶Soegijanto Padmo, Desentralisasi Pemerintahan Daerah Di Indonesia, dalam <http://sejarah.fib.ugm.ac.id/artikel/php>, Edisi 13 Februari 2007. Diakses pada tanggal 1 Februari 2008.

Nusa Tenggara Timur).²⁷ Sementara Sulawesi Selatan berada di bawah kekuasaan Angkatan Laut (Armada Selatan II) untuk wilayah yang meliputi Sulawesi, Kalimantan, dan Maluku dengan pusat Makassar.²⁸ Untuk Armada Selatan I meliputi wilayah Sunda Kecil, seperti Bali, Lombok, Sumbawa dan Kepulauan di Nusa Tenggara Timur dengan pusat Surabaya.²⁹

Jika pada masa pemerintahan Belanda, kekuasaan raja-raja lokal dibatasi, maka ada masa pendudukan Jepang, hal itu tidak dilakukan lagi, bahkan diberi peran yang lebih besar dalam bidang pemerintahan. Begitupula dengan dewan adat beserta anggota-anggotanya tetap berfungsi sebagaimana masa-masa sebelumnya.³⁰ Sistem pemerintahan yang dijalankan pendudukan Jepang di Sulawesi Selatan di bawah kontrol Angkatan Laut dikenal dengan istilah *Minseifu*, dengan dipimpin oleh seorang *Minseifucokan*. *Minseifu* dibagi ke dalam tiga wilayah bagian yang disebut *Minseibu* yang dipimpin oleh seorang *Seibucokan*, yang masing-masing memimpin wilayah Kalimantan, Sulawesi dan Maluku (Seram). Daerah *Minseibu* dibagi pula menjadi beberapa daerah yang disebut dengan istilah *Shu*, *Ken*, *Bunken*, *Gun*, *Son* dan *Ku*.³¹

²⁷ Barbara Sillars Harvey, *Op. Cit.*, hlm. 92.

²⁸ Marwati Djoened Poesponegoro dkk, Sejarah Nasional Jilid VI, (Jakarta: PN. Balai Pustaka, 1984), hlm. 5.

²⁹ Suhardin Tjenne, *Op. Cit.*, hlm. 27.

³⁰ Barbara Sillars Harvey, *Op.cit.*, hlm. 97.

³¹ Sagimun, MD., Perlawanan Rakyat Indonesia Terhadap Fasisme Jepang, (Jakarta: Inti Idayu Press, 1985), hlm. 32. Lihat juga Suhardin Tjenne, *Op. Cit.*, hlm. 28.

Dalam sistem pemerintahan pendudukan Jepang, residen disejajarkan dengan *Shucokan*³², sementara asisten residen diganti dengan *Ken Kanrikan*. Begitupula dengan *Controleur* diganti dengan *Bunken Kanrikan*.³³ Semua jabatan di atas pada masa pendudukan Jepang diambil alih dan dijabat oleh militer Angkatan Laut Jepang dan kemudian diserahkan lagi pengurusannya kepada beberapa orang Indonesia.³⁴

Kekuasaan raja-raja lokal tetap diberi peran untuk memerintah mendampingi *Bunken Kanrikan* mengatur jalannya pemerintahan.³⁵ Jika pada masa pemerintahan Kolonial Belanda, kekuasaan raja-raja lokal bersifat *Self Bestuurder*, maka pada masa pendudukan Jepang raja-raja lokal diberi pangkat dengan istilah *Sucho*.³⁶ Setiap distrik diperintah oleh seorang yang disebut dengan *Guncho*, *onder distrik* diperintah oleh seorang yang disebut dengan *Soncho*, desa atau kelurahan diperintah oleh seorang yang disebut *Kuco*.³⁷

Hubungan kerjasama antara *Bunken Kanrikan* dengan raja-raja lokal dalam suatu sistem pemerintahan yang berada di bawah kekuasaan militer Angkatan Laut Jepang diimplementasikan dengan wujud bahwa *Bunken Kanrikan* tidak memerintah secara langsung tetapi melainkan melalui kekuasaan raja. Untuk membantuk *Bunken*

³² *Ibid.*

³³ Mukhlis Paeni dkk, Batara Gowa: Messianis Dalam Gerakan Sosial Di Tanah Makassar, (Ujung Pandang: Belum Diterbitkan, 1985), hlm. 80.

³⁴ Sagimun, MD., *Op. Cit.*

³⁵ Sarita Pawiloy, *Op. Cit.*, hlm.374.

³⁶ Mukhlis Paeni., *Op. Cit.*

³⁷ Sagimun, MD., *Ibid.*

Kanrikan menjalankan tugasnya, diangkatlah *Hosakan* (biasanya diambil dari pribumi). *Hosakan* ini pulalah yang menghubungkan antara *Bunken Kanrikan* dengan raja dalam situasi yang normal. Pelaksanaan harian dilakukan oleh *Hanco* yang diambil dari pribumi (kaki-tangan Jepang). Satu tingkat di bawah *Bunken Kanrikan* terdapat *Kompetei* yang fungsinya adalah untuk menegakkan ketertiban dengan kekerasan. *Kompetei* ini merupakan polisi khusus Jepang.³⁸

Posisi raja-raja lokal dalam struktur pemerintahan Pendudukan Jepang hanya dijadikan sebagai simbol agar Jepang mendapat simpatik dari rakyat melalui sistem pemerintahan tradisional yang dijalkannya. Hubungan hirarki kekuasaan antara raja beserta pembantu-pembantunya dengan rakyat dengan sendirinya terputus, karena yang memegang kekuasaan birokrasi secara langsung adalah *Bunken Kanrikan*. Raja tidak mempunyai hak dan kekuatan untuk melampaui wewenang yang telah ditentukan oleh *Bunken kanrikan* sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Dengan sistem pemerintahan yang rumit seperti itu, *Bunken Kanrikan* mendikte raja, sementara setiap usul yang diberikan oleh Raja dapat ditolak, dan sebaliknya yang dikehendaki dan keputusan yang ditetapkan oleh *Bunken Kanrikan* harus dilaksanakan oleh raja.³⁹

³⁸ Sarita Pawiloy, *Ibid.*, hlm. 348-349.

³⁹ *Ibid.*

D. Kebijakan-Kebijakan Pendudukan Jepang Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan

Pada masa pendudukan Jepang, sistem pendidikan yang diselenggarakan berlandaskan pada tiga prinsip pokok pada kebijaksanaan antara lain;

1. Rekonstruksi sistem pendidikan atas dasar pemerataan (keseragaman) dan kebersamaan untuk seluruh kelompok etnis dan kelas sosial.
2. Secara sistemik pengaruh Belanda dihapuskan dari sekolah-sekolah, sedangkan unsur-unsur kebudayaan Indonesia (budaya lokal) dijadikan landasan utama.
3. Semua lembaga pendidikan dijadikan alat untuk memasukkan doktrin berupa gagasan mengenai Kemakmuran Bersama Asia Tenggara di bawah pimpinan Jepang.⁴⁰

Selain itu Jepang juga menerapkan beberapa kebijakan terkait pendidikan yang memiliki implikasi luas terutama bagi sistem pendidikan di era kemerdekaan, antara lain; (1) Dijadikannya Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi pengantar pendidikan menggantikan Bahasa Belanda; (2) Adanya integrasi sistem pendidikan dengan dihapuskannya sistem pendidikan berdasarkan kelas sosial di era penjajahan Belanda.⁴¹

⁴⁰ Arsip Nasional RI No. 4, Di Bawah Pendudukan Jepang, Kenangan Empat Puluh Dua Orang Yang Mengalaminya, (Jakarta, 1988), hlm. 87.

⁴¹ <http://peziarah.wordpress.com/2007/02/05/pendidikan-di-zaman-pendudukan-jepang>. **Pendidikan Di Zaman Pendudukan Jepang**, diakses pada tanggal 25 Januari 2008.

Kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Jepang dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pendidikan pada masa pendudukan, akan direduksi sebagai berikut:

(1) Pendidikan Dasar (*Kokumin Gakko*/Sekolah Rakyat). Lama studi 6 tahun. Sekolah Rakyat (SR) merupakan Sekolah Pertama yang merupakan konversi nama dari Sekolah Dasar 3 atau 5 tahun bagi pribumi di masa Hindia Belanda. (2) Pendidikan Lanjutan. Terdiri dari *Shoto Chu Gakko* (Sekolah Menengah Pertama) dengan lama studi 3 tahun dan *Koto Chu Gakko* (Sekolah Menengah Tinggi) juga dengan lama studi 3 tahun. (3) Pendidikan Kejuruan. Yang meliputi sekolah lanjutan yang bersifat vokasional seperti di bidang pertukangan, pelayaran, pendidikan, teknik, dan pertanian. (4) Pendidikan Tinggi.

Sebagai langkah awal, Jepang kemudian menawarkan konsep Pusat Tenaga Rakyat (PUTERA) kepada tokoh-tokoh pergerakan nasional di Jakarta di bawah pimpinan Soekarno, M. Hatta, Ki Hajar Dewantoro, dan K.H. Mas Mansur pada bulan Maret 1943 di Jakarta, supaya mendapat dukungan secara luas dari masyarakat. Sebenarnya langkah ini ditempuh setelah konsep *The Triple Movement* yang tidak menyertakan wakil tokoh-tokoh pergerakan nasional mengalami kegagalan.⁴²

⁴²Tetapi PUTERA akhirnya mengalami nasib serupa setahun kemudian. Pasca ini, Jepang tetap merekrut Ki Hajar Dewantoro sebagai penasehat bidang pendidikan mereka. Upaya Jepang mengambil tenaga pribumi ini dilatarbelakangi pengalaman kegagalan sistem pendidikan mereka di Manchuria dan China yang menerapkan sistem Nipponize (Jepangisasi). Karena itulah, di Indonesia mereka mencobakan format pendidikan yang mengakomodasi kurikulum berorientasi lokal. Sekalipun patut dicatat bahwa pada menjelang akhir masa pendudukannya, ada indikasi kuat Jepang untuk menerapkan sistem Nipponize kembali, yakni dengan dikerahkannya *Sendenbu* (propagator Jepang) untuk menanamkan ideologi yang diharapkan dapat menghancurkan ideologi Indonesia Raya. *Ibid.*

Sementara itu terhadap pendidikan Islam, Jepang juga mengambil beberapa kebijakan-kebijakan⁴³ yang seakan-akan memfasilitasi berbagai kepentingan pergerakan nasional dari kelompok-kelompok Islam, padahal nyatanya yang dilakukan adalah untuk memudahkan Jepang dalam mengontrol dan mengawasi proses penyelenggaraan pendidikan Islam. Lepas dari tujuan semula Jepang tersebut, tidak dapat dipungkiri bahwa hal itu membantu perkembangan Islam dan keadaan umatnya setelah tercapainya kemerdekaan.

Begitupula dengan kebijakan-kebijakan pendudukan Jepang di Makassar di bidang pendidikan tidak lepas dari tiga prinsip pokok tadi. Kebijakan pertama yang diambil oleh tentara pendudukan Jepang adalah membekukan untuk sementara waktu semua kegiatan sekolah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Belanda dan merazia buku-buku yang berbahasa Belanda di sekolah-sekolah. Selain itu, para guru-guru yang pernah ikut latihan militer bersama Belanda atau dikenal dengan istilah *stadswacht*⁴⁴ ditangkap dan ditawan, sehingga memberi efek psikologis bagi guru-

⁴³ Kebijakan-kebijakan tersebut antara lain (1) Mengubah *Kantoor Voor Islamistische Zaken* pada masa Belanda yang dipimpin kaum orientalis menjadi *Sumubi* yang dipimpin tokoh Islam sendiri, yakni K.H. Hasyim Asy'ari. Di daerah-daerah dibentuk *Sumuka*; (2) Pondok pesantren sering mendapat kunjungan dan bantuan pemerintah Jepang; (3) Mengizinkan pembentukan barisan Hizbullah yang mengajarkan latihan dasar seni kemiliteran bagi pemuda Islam di bawah pimpinan K.H. Zainal Arifin; (4) Mengizinkan berdirinya Sekolah Tinggi Islam di Jakarta di bawah asuhan K.H. Wahid Hasyim, Kahar Muzakir dan Bung Hatta; (4) Diizinkan ulama dan pemimpin nasionalis membentuk barisan Pembela Tanah Air (PETA) yang belakangan menjadi cikal-bakal TNI di zaman kemerdekaan; dan (5) Diizinkan Majelis Islam A'la Indonesia (MAI) terus beroperasi, sekalipun kemudian dibubarkan dan diganti dengan Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) yang menyertakan dua ormas besar Islam, Muhammadiyah dan NU. *Ibid.*

⁴⁴ Mardanas Safwan dan Sutrisno Kuntoyo (ed.), *Loc. Cit.*, hlm. 99.



guru lainnya. Banyak guru-guru yang takut dan menyingkir kepedalaman atau berganti profesi.⁴⁵

Bukan hanya itu, Jepang juga menginstruksikan tentang pelarangan materi tentang bahasa Belanda dan bahasa-bahasa Eropa lainnya, termasuk juga yang harus ditutup adalah *Hollandsche Chineesche School* (HCS) dan memaksa peranakan Cina kembali ke sekolah-sekolah berbahasa Mandarin di bawah koordinasi *Hua Chino Tsung Hui* serta berimplikasi pada adanya proses *resinification* (penyadaran dan penegasan identitas sebagai keturunan bangsa Cina).⁴⁶ Kondisi ini antara lain memaksa para guru untuk mentranslasikan buku-buku berbahasa asing kedalam Bahasa Indonesia untuk kepentingan proses pembelajaran.

Selanjutnya sekolah-sekolah yang bertipe akademis diganti dengan sekolah-sekolah yang bertipe vokasi. Jepang juga melarang pihak swasta mendirikan sekolah lanjutan dan untuk kepentingan kontrol, maka sekolah swasta harus mengajukan izin ulang untuk dapat beroperasi kembali.⁴⁷ Kebijakan ini menyebabkan terjadinya kemunduran yang luar biasa bagi dunia pendidikan dilihat dari aspek kelembagaan dan operasonalisasi pendidikan lainnya.

⁴⁵ Guru-guru banyak yang tidak mengajar lagi. Guru-guru yang berasal dari Manado dan Ambon yang telah lama bekerja pada Pemerintah Belanda kurang bergairah untuk mengajar lagi, kecuali guru-guru yang pro Jepang. Ada juga sebagian dari tenaga pendidik itu yang dipanggil Jepang memimpin suatu pekerjaan perbaikan atau semacam mandor. *Ibid.*

⁴⁶ <http://peziarah.wordpress.com/2007/02/05/pendidikan-di-zaman-pendudukan-jepang>, **Pendidikan Di Zaman Pendudukan Jepang**, diakses pada tanggal 25 Januari 2008.

⁴⁷ Seperti halnya di Jakarta, Taman Siswa terpaksa harus mengubah Taman Dewasa menjadi Taman Tani, sementara Taman Guru dan Taman Madya tetap tutup. *Ibid.*



Setelah tiga bulan menguasai pemerintahan dan membekukan pendidikan dalam rangka mensterilkan pengaruh Belanda di Makassar, langkah selanjutnya adalah melaksanakan program indoktrinasi. Untuk mewujudkan maksud tersebut, sekolah-sekolah kembali dibuka, karena Jepang menyadari arti pentingnya sekolah sebagai media untuk membangun dan mengubah cara berpikir dan mentalitas masyarakat dari cara berpikir dan mentalitas Eropa menjadi cara berpikir dan mentalitas ala Nippon. Pasca pembukaan kembali sekolah-sekolah, Jepang kemudian membentuk sebuah badan yang disebut *Selebes Minseibu Bunkiyokatyo*⁴⁸ yang berkedudukan di Makassar. Tujuannya adalah untuk mengelola dan mengawasi beroperasinya sekolah-sekolah.

1. Sebaran Dan Jenis Sekolah

Pada masa pendudukan Jepang, jenis-jenis lembaga pendidikan dan sebarannya di Makassar tidak banyak berubah seperti ketika dikelola oleh Pemerintah Kolonial Belanda karena memang Jepang hanya melanjutkan sekolah-sekolah yang sudah ada sebelumnya. Yang berubah hanya nama dan lama studinya. Dalam hal ini tentu saja ada pengecualian bagi sekolah-sekolah yang baru dibuka oleh Jepang.

Yang jelas semua sekolah yang dibuka berdasarkan golongan (ras) dan status sosial untuk sekolah tingkat dasar dengan lama studi yang bervariasi pada zaman Belanda⁴⁹, kemudian dilebur dan diadaptasi sesuai dengan sistem pendidikan ala

⁴⁸ Mardanas Safwan dan Sutrisno Kuntoyo (ed)., *Op. Cit.*

⁴⁹ Seperti pendidikan dasar *Volkschool*, *Inlandsche School*, *Hollandsche Ambonsche School* (HAS), dan *Hollandsche Chineesche School* (HCS).

Jepang. Hasil adaptasi tersebut menjadi Sekolah Rakyat (SR) atau *Futsu U Ko Gakko* dengan lama studi menjadi 6 tahun. Secara keseluruhan di wilayah Afdeling Makassar ada sekitar 33 buah Sekolah Rakyat (SR) atau *Futsu U Ko Gakko*. Untuk sekolah lanjutan 2 tahun seperti *Vervolkschool* yang berjumlah 8 buah dan tersebar di beberapa kampung seperti di Kampung Wajo, Jalan Amanagappa, Jalan Mardekaya, Tabiringan, Maricaya, Kampung Layang, dan Kampung Mariso diganti namanya menjadi *Kogio Ko Gakko* dengan lama studi 3 tahun. Selain itu, pemerintah Jepang juga membuka sebuah sekolah unggulan tingkat *Futsu U Ko Gakko* yang khusus diperuntukkan bagi putra-putri Indonesia yang mempunyai dasar kebangsaan dan keturunan baik-baik termasuk anak-anak raja di Sulawesi Selatan, cucu Sultan Pontianak dari Kalimantan dan bangsawan dari Manado, Bali dan lain-lain.⁵⁰

Begitupula dengan sekolah guru *Cursus voor Onderwijs* (CVO) dengan masa kursus dua tahun dan *Opleidingschool voor Onderwijs* (OVO) dengan lama studi tiga tahun dilebur menjadi satu dan namanya pun diganti menjadi *Kio In Yoseiyo*. *Normaal School* sebagai sekolah lanjutan dari *Vervolg School* diubah namanya menjadi *Sihan Gakko*. Sementara sekolah menengah seperti MULO diganti namanya menjadi *Cu Gakko*.⁵¹ Pada tahun 1943, Jepang mengganti nama sekolah pertanian *Landhouw School* menjadi *Noogyo Zitsumu Gakko*.

⁵⁰ Bachtiar Kr. Leo, *Op. Cit.* Pada zaman Jepang, beliau juga pernah belajar di *Tokubetsu Ko Gakko* setelah sebelumnya bersekolah di daerah Bantaeng pada zaman Belanda bersama Prof. Mattulada.

⁵¹ Sekolah MULO mendapat perhatian utama pendudukan Jepang dan mendatangkan guru khusus dari Jepang yang bernama Dr. Herota (dosen ilmu ekonomi Universitas Kobe) untuk dijadikan kepala sekolah *Cu Gakko* lengkap dengan pemberian pangkat militer kepadanya, yakni Kolonel Tituler. Mardanas Safwan dan Sutrisno Kuntoyo (ed.), *Ibid.*, hlm 100.

Pada masa ini, sekolah yang dikelola oleh swasta kurang berkembang sebagaimana sebelum kedatangan Jepang. Organisasi Islam yang selama ini giat melaksanakan program pendidikan Islam diawasi dengan ketat. Organisasi pemudanya dibubarkan dan peralatan sekolahnya dirusak. Menyadari kemungkinan dampak besar yang dapat ditimbulkan oleh pengekangan terhadap Muhammadiyah, maka didatangkanlah seorang Jepang ke Makassar yang bernama H. Umar Faisal. Ulama yang berasal dari Jepang tersebut kemudian mendirikan pendidikan agama Islam pada tahun 1944 dengan nama *Kai Kio Gakku In*. Akan tetapi itu sudah kehilangan kepribadian. *Kinrohosi, seikere* menghadap Tokyo, menyanyikah lagu-lagu Jepang, belajar bahasa Jepang terpaksa dilakukan.

Sementara sekolah yang dikelola oleh zending dan Katolik banyak yang ditutup kecuali bersedia menerima "ketertiban" yang ditawarkan oleh Pendudukan Jepang. Guru-guru Zending dan sekolah Katolik banyak yang ditawan dengan tuduhan gerakan spionase sebagai mata-mata Belanda.⁵² Semua tindakan pengawasan dan pengelolaan sekolah pada zaman Jepang dilakukan oleh Badan *Selebes Minseibu Bunkiyokatyo*.

Sekolah non-formal pada waktu Jepang berkuasa di Makassar agak banyak didirikan oleh Jepang melalui organisasi kepemudaan seperti *Seinendan, Kaibodan, Bogodan*, yang dilatih secara kemiliteran. Pendidikan untuk mereka dimaksudkan untuk dapat mempersiapkan diri menjaga kampung mereka masing-masing, tetapi sesungguhnya mereka dipersiapkan sebagai tenaga cadangan apabila tentara Jepang

⁵² *Ibid.*, hlm. 102.

sudah kurang. Di samping itu ada perkumpulan wanita yang bernama *Hahanokai* yang bertugas pada dapur umum atau menghibur tentara yang sedang berjuang di garis depan. Tetapi kebanyakan tugas dari *Hahanokai* adalah mempersiapkan perbekalan bagi tentara Jepang dan menghibur orang-orang Jepang, terutama para opsir Jepang yang baru kembali dari garis depan.⁵³

Yang paling menarik di sini adalah dibukanya kursus politik bagi pemuda yang memiliki kecerdasan yang memadai dan mereka dipersiapkan menjadi pemimpin dan kelak dapat mengatur negaranya apabila Jepang telah pergi. Sebagian dari mereka yang ikut kursus politik tersebut menjadi aktifis dan pejuang kemerdekaan.⁵⁴

2. Kurikulum Yang Digunakan

Dengan adanya keseragaman dalam waktu pendidikan, masalah penyelenggaraan dan pengawasan sekolah mudah dilakukan serta kurikulumnya dapat di buat dengan lebih baik dan seragam yang hampir sama saja dengan kurikulum di zaman Belanda. Dengan demikian pengetahuan murid Sekolah Dasar pada waktu Jepang itu dalam teorinya sama di manapun sekolah itu diadakan. Tetapi sayangnya isi pelajaran waktu itu sangat rendah mutunya, walaupun kebanyakan dari guru adalah yang telah berpengalaman semenjak zaman Belanda dahulu. Rendahnya mutu sekolah disebabkan Jepang banyak campur tangan dengan memberikan latihan kemiliteran dan menyuruh bergotong royong sehingga tidak ada kesempatan bagi

⁵³ <http://www.pakguruonline.pendidikan.net/sjh-pendidikan-sumatera-barat.rtf>

⁵⁴ St. Nuriah H. Dg. Ringai (Informan, 78 Tahun), *Loc. Cit.*, hlm. 284.

guru mengajar dengan baik. Kalau tidak bergotong royong atau latihan kemiliteran, anak-anak hanya diajar menyanyikan lagu-lagu Jepang yang sangat mengganggu jam pelajaran di sekolah. Murid-murid yang tidak datang ke sekolah pun tidak mendapat teguran sama sekali dari majelis guru, karena mereka tidak berdaya sama sekali. Keseragaman sekolah yang baik itu tidak diisi Jepang dengan materi pelajaran yang cocok buat anak didik yang sedang berkembang itu.

Materi pokok yang diajarkan guru di kelas tidak jauh berbeda materi yang diberikan guru selama pelatihan. Indoktrinasi ideologi *Hakko Ichiu*, *Nippon Seisyin*, yaitu latihan kemiliteran dan semangat Jepang, Bahasa, sejarah dan adat-istiadat Jepang, ilmu bumi dengan perspektif geopolitis, serta olahraga dan nyanyian Jepang merupakan materi yang diajarkan di sekolah. Sebagai bahasa pengantar di sekolah adalah bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa Indonesia bukan hanya digunakan di sekolah tetapi juga di kantor-kantor. Sementara bahasa Jepang merupakan bahasa wajib yang diajarkan di sekolah.⁵⁵

Di samping pendidikan formal yang diberikan Jepang di sekolah kepada pemuda, juga diberikan pendidikan non formal yang merupakan pendidikan kemiliteran seperti misalnya *Heiho* lengkap dengan pakaian militernya.⁵⁶ Materi yang diajarkan kepada pemuda adalah peraturan baris-berbaris dan disiplin militer. Lembaga pendidikan khusus untuk pendidikan militer ini seperti *Heiho* dan *Gyugun* yang terdapat di Makassar. Ada juga *Seinendan* yang bertugas menjaga ketertiban

⁵⁵ Karaeng Pati (Informan, 75 Tahun) dalam A. Rasyid. Asba, *Loc. Cit.*, hlm. 289-290.

⁵⁶ R. Partria (Informan, 72 Tahun), *Ibid.*, hlm. 83.

⁵⁷ R. Partria (Informan, 72 Tahun)

kampung. Para pemuda dididik dasar-dasar kemiliteran sebagai persiapan melawan sekutu. kepala kampung, *Sanco* juga bertugas sebagai *Hanco* atau ketua kepemuaan yang mengurus organisasi *Seinendan*.⁵⁷

3. Keadaan Guru Dan Murid

Pasca pembekuan sekolah-sekolah oleh Jepang dan sterilisasi pengaruh Belanda di sekolah-sekolah, Jepang memandang perlu melatih guru-guru agar memiliki keseragaman pengertian tentang maksud dan tujuan pemerintahannya. Materi pokok dalam latihan tersebut antara lain: (1) Indoktrinasi ideologi *Hakko Ichiu*; (2) *Nippon Seisyin*, yaitu latihan kemiliteran dan semangat Jepang; (3) Bahasa, sejarah dan adat-istiadat Jepang; (4) Ilmu bumi dengan perspektif geopolitis; serta (5) Olahraga dan nyanyian Jepang.⁵⁸

Dalam pelatihan tersebut, disiplin yang ditinggalkan Belanda lebih ditingkatkan pada masa Jepang. Walaupun bersikap keras, orang Jepang tetap memberi penghormatan kepada tenaga pengajar/pendidik. Hasilnya, selama mengajar murid di kelas guru-guru pun berlaku keras kepada murid-muridnya. Menghardik dan memukul merupakan kebiasaan guru-guru pada masa itu. Bahkan hingga sekarang masih banyak berlaku seperti itu.⁵⁹

Sementara untuk pembinaan kesiswaan, Jepang mewajibkan bagi setiap murid sekolah untuk rutin melakukan beberapa aktivitas berikut ini: (1) Menyanyikan lagi

⁵⁷ H. Abidin (Informan, 82 Tahun), *Ibid*, hlm. 201.

⁵⁸ <http://peziarah.wordpress.com/2007/02/05/pendidikan-di-zaman-pendudukan-jepang>, **Pendidikan Di Zaman Pendudukan Jepang**, diakses pada tanggal 25 Januari 2008.

⁵⁹ Mardanas Safwan dan Sutrisno Kuntoyo (ed.), *Op. Cit.*, hlm. 99.

kebangsaan Jepang, *Kimigayo* setiap pagi; (2) Mengibarkan bendera Jepang, *Hinomura* dan menghormat Kaisar Jepang, Tenno Heika setiap pagi; (3) setiap pagi mereka juga harus melakukan *Dai Toa*, bersumpah setia kepada cita-cita Asia Raya; (4) Setiap pagi mereka juga diwajibkan melakukan *Taiso*, senam ala Jepang; (5) Melakukan latihan-latihan fisik dan militer; (7) Menjadikan bahasa Indonesia sebagai pengantar dalam pendidikan. Bahasa Jepang menjadi bahasa yang juga wajib diajarkan.⁶⁰

Pendidikan pada zaman Jepang di Makassar sangat diperhatikan, anak-anak dipaksa sekolah. Materi pelajaran yang diberikan antara lain menulis dengan memakai batu tulis (*paroki*), membaca, dan berhitung, belajar bahasa Jepang dan bernyanyi terutama lagu kebangsaan Jepang, *Kimigayo*. Karena menyadari kondisi ekonomi masyarakat yang sulit, kadang-kadang pihak Jepang membagikan pakaian kepada setiap murid dan tiap tiga bulan membagikan sabun.⁶¹

Kondisi umum murid-murid Sekolah Rakyat (SR) dari tampilan fisiknya dapat digambarkan sebagai berikut:

Anak-anak sekolah saat itu tidak berseragam, namun memiliki keseragaman, yaitu bahwa kepala harus dicukur gundul. Demikian pula dengan orang-orang dewasa pada umumnya. Mereka dengan sukarela mencukur rambut kepalanya hingga gundul. Mereka meniru tentara Jepang yang mulai dari prajuritnya hingga ke opsirnya (perwira), semua tanpa kecuali harus berkepala gundul. Setiap anak sekolah mengenakan topi anyaman yang terbuat dari bahan tikar. Anak-anak sekolah semuanya tidak ada yang bersepatu, kecuali *sensei*-nya (guru).⁶²

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ M. Yahya (Informan, 73 Tahun) dalam A. Rasyid Asba, *Op. Cit.*, hlm. 91.

⁶² Djoko Widodo, *Zaman Jepang Dan Murid Sekolah* dalam <http://www.pikiran-rakyat.com>, Edisi 24 Agustus 2005. diakses 28 Januari 2008.

Selain itu, kegiatan murid di sekolah setiap pagi sebelum kegiatan belajar dimulai adalah berkumpul di halaman sekolah untuk mengikuti senam pagi yang disebut *taiso*⁶³ dengan diiringi irama lagu yang disiarkan radio secara sentral. Selesai senam *taiso* seluruh murid dikumpul di bangsal untuk mengikuti upacara ala militer dengan aba-aba dalam bahasa Jepang. Acara pertama dimulai dengan menyanyikan lagu kebangsaan Jepang, *Kimigayo*. Sesudah selesai para murid bersama-sama mengucapkan "Ikrar Siswa" dalam bahasa Jepang yang dipimpin oleh Ketua Murid Umum (KMU) atau oleh aktivis siswa yang paling bersemangat.

Selesai membaca ikrar, seluruh murid beserta para *sensei*-nya (guru) harus menghadap ke arah ibu kota Jepang, Tokyo. Dengan aba-aba bahasa Jepang, selanjutnya semua *Seikerei*.⁶⁴ Sesudah selesai *seikerei* terdengar aba-aba, *naore*, semua berdiri tegak kembali. Dan perintah terakhir berbunyi, *mokto*. Artinya mengheningkan cipta, persis seperti pada upacara-upacara yang kita lakukan sekarang. Selesai rangkaian upacara demi upacara maka pimpinan menutupnya dengan sebuah ucapan keras, *Wakare!* (bubar). Setelah upacara selesai, berhamburlah anak-anak memasuki kelasnya masing-masing, tetapi tidak langsung duduk, melainkan berdiri di samping bangku tempat duduknya. Setelah *sensei* masuk

⁶³Terdapat tiga jenis tahapan *taiso*, yakni *Dai Ichi*, *Dai Ni* dan *Dai San*. Artinya senam I, senam II dan senam III. Ketiga jenis tahapan ini berjalan sekira 30 menit. *Ibid.*

⁶⁴Caranya ialah membungkukkan badan seperti orang yang sedang rukuk di dalam salat. Yang dihormati dengan gerakan ini adalah pucuk pimpinan Kerajaan Jepang yang tiada lain adalah Kaisar Teno Haika. Dia dipercayai oleh orang Jepang sebagai orang suci, titisan/penjelmaan dari *Amateratsu* (Dewa Matahari). Maka dari itu bendera Jepang menggunakan lambang matahari yang disebut *Hinomaru no Hatta* atau *Nippon no Hatta*. Artinya bendera matahari alias bendera Jepang. *Ibid.*

dan berdiri di hadapan murid-muridnya, sambil sedikit membungkuk semua mengucapkan *ohayo ghozaimas* (Selamat Pagi). Setelah itu para murid baru diperbolehkan duduk. Demikian pula saat hendak pulang dilakukan dengan cara yang sama, tapi dengan ucapan *sayonara*, (selamat berpisah).⁶⁵

Mata pelajaran sekolah yang paling dibenci anak sekolah (untuk kelas V dan VI) adalah pelajaran tulisan Jepang yang disebut huruf kanji. Adapun huruf-huruf *Katakana* dan *Hiragana* merupakan tulisan dasar seperti *alphabet* pada tulisan latin. Sementara bahasa Jepang sendiri barangkali tidak terlalu sulit untuk dihafal dan diucapkan. Apalagi lagu-lagu Jepang (*nippon no uta*) sangat mudah untuk dilantunkan karena melodi dan iramanya sangat sederhana.

Di luar sekolah, kegiatan murid dalam dua minggu sekali adalah *kendrohoshi* (kerja bakti) dengan membersihkan halaman dan menata lingkungan sekolah, mencangkul kebun untuk ditanami jagung, ubi, singkong, *kaliki*⁶⁶ dan lain-lain. Kegiatan lainnya adalah upacara yang dilaksanakan di luar lingkungan sekolah. Upacara ini pada umumnya dilaksanakan untuk memperingati hari-hari besar Jepang. Murid SR di seluruh Makassar harus dikumpul di lapangan Karebosi guna mengikuti upacara. Intinya mendengarkan pidato dalam bahasa Indonesia dan Jepang yang tentu

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ Ada sejenis pohon yang bernama *kaliki* (jarak). Buahnya sebesar kacang merah dan tidak dapat dimakan, tapi mengandung kadar minyak yang sangat tinggi. Pohon ini merupakan tanaman yang wajib ditanam di sekeliling halaman, di setiap sekolah maupun rumah. Pohon *kaliki* ini sangat mudah tumbuh. Dalam jangka tiga bulan pohon ini dapat mencapai ketinggian 1,5 meter. Di saat itu sudah mulai dapat menghasilkan buahnya secara terus-menerus. Kemudian hasilnya, buahnya dikumpulkan dan dibawa ke pabrik untuk diproses dibuat minyak pelumas bagi mesin perang Jepang. *Ibid.*

saja sama sekali tidak dimengerti oleh murid, para guru maupun hadirin.⁶⁷ Selesai pidato kemudian dilanjutkan dengan senam massal, *taiso* dan *odori* (tarian massal yang dilakukan murid-murid perempuan).⁶⁸

Ada kegiatan olahraga yang paling disukai murid SR pada saat itu, yakni olahraga permainan kasti (semacam *soft ball*). Permainan ini dimainkan oleh dua tim saling berhadapan dan berlawanan. Pertandingan kasti antar-SR (SD) merupakan kegiatan rutin dan agenda tetap dengan tidak pernah ada hadiahnya bagi si pemenang.

⁶⁷Pidatonya begitu berapi-api sehingga pada setiap kalimat berhenti, sungguhpun tidak dimengerti semua hadirin dan murid secara spontan berteriak, *Banzai, Banzai!* Artinya Hidup, hidup! Pidatonya yang berbahasa Indonesia sepenuhnya berisi agitasi, mengutuk dan menghasut untuk menumbuhkan rasa benci kepada musuh lawannya yaitu Inggris, Amerika dan sekutu-sekutunya. Sementara Jepang menamakan dirinya pelindung, sebagai "kakak tua" atau "saudara tua dari Asia Timur Raya". *Ibid.*

⁶⁸Karena kondisi kesehatan yang tidak memadai serta letihnya badan dan panasnya sengatan matahari, menyebabkan puluhan murid jatuh pingsan. *Ibid.*

BAB IV

PERKEMBANGAN PENDIDIKAN

DAN DAMPAKNYA TERHADAP MASYARAKAT

Secara umum dapat dikatakan bahwa dampak pendidikan masa pendudukan Jepang terhadap kehidupan masyarakat terbagi dua yakni dampak baik dan dampak buruknya. Dampak baiknya adalah menyeragamkan seluruh tahun ajaran Sekolah Dasar. Hal ini baru pertama kalinya terjadi di Indonesia semenjak Indonesia dijajah oleh Belanda. Dengan adanya keseragaman dalam waktu pendidikan, masalah penyelenggaraan dan pengawasan sekolah mudah dilakukan serta kurikulumnya dapat di buat dengan lebih baik dan seragam. Dengan demikian pengetahuan murid Sekolah Dasar pada waktu Jepang itu dalam teorinya sama di manapun sekolah itu diadakan.¹

Dampak buruknya adalah anak tidak diberi pelajaran sebagaimana mestinya, tetapi disuruh kerja bakti atau gotong royong mengerjakan kepentingan Jepang. Beberapa kali seminggu anak-anak disuruh gotong royong menanam ubi, lebih-lebih setelah dekat kealahannya terhadap Sekutu. Moral anak-anak menjadi rusak, karena tindakan tentara Jepang yang tidak mendidik seperti memarahi seorang guru di hadapan muridnya. Hal ini sangat besar pengaruhnya terhadap perkembangan jiwa anak-anak yang sedang berkembang itu. Mereka serta merta dapat meniru perbuatan

¹ <http://www.pakguruonline.pendidikan.net/sjh-pendidikan-sumatera-barat.rtf> , Sejarah Pendidikan Sumatera Barat; Bab VI Pendidikan Zaman Jepang Dan Indonesia Merdeka, diakses 8 Januari 2008.

Jepang tersebut terhadap orang lain, walaupun terhadap orang yang lebih tua sekalipun. Karena keadaan seperti itu tidak ada yang melarang, lama-lama anak-anak menjadi biasa dengan perbuatan tersebut, bahkan tidak jarang seorang anak melawan kepada orang tuanya karena masalah yang kecil saja. Di samping itu anak-anak sekolah termasuk juga orang dewasa dipaksa mengikuti dan menirukan kebiasaan orang Jepang seperti "*seikere*" menghadap ke Jepang (matahari terbit) setiap pagi, diwajibkan menyanyikan lagu-lagu Jepang di sekolah, memberi hormat kepada orang Jepang walaupun pangkatnya rendah.²

A. Peranan Dan Fungsi Pendidikan Terhadap Gerakan Nasionalisme

Dapat dikatakan bahwa kehadiran Jepang di Makassar pada bulan-bulan pertama masa kedatangannya membawa angin baru bagi tokoh-tokoh pergerakan yang berhaluan nasional-lokal dan menumbuhkan harapan baru akan terciptanya sebuah perubahan yang lebih baik. Tokoh-tokoh pergerakan yang telah mengenyam pendidikan Belanda sebelumnya dan mengikuti perkembangan dan gejolak yang terjadi di dunia Internasional seperti kemenangan Jepang melawan Rusia dan lain sebagainya menyambut kedatangan Jepang sebagai sang penyelamat.

Ketika sistem pendidikan yang ditinggalkan Belanda diambil alih dan dilanjutkan oleh Jepang dengan materi pengajaran yang bersifat vokasional dan anti Belanda merupakan titik awal bagi bangkitnya kepercayaan diri bagi tokoh-tokoh pergerakan dan pejuang untuk mencapai kemerdekaan. Pola pikir mereka yang sebelumnya telah terbentuk pada masa pemerintahan Belanda membuatnya semakin

² *Ibid.*

jeli untuk memanfaatkan peluang politik yang ada dengan tampilnya pada pentas politik-pemerintahan. Walaupun pola pikir yang demikian masih terbatas pada kalangan yang berpendidikan saja.

Pola pikir lateral (pemanfaatan peluang) ini ditopang konsolidasi sistem pendidikan yang anti feodal diterapkan Jepang dengan penghapusan klasifikasi sekolah berdasarkan ras dan status sosial seperti yang diterapkan pada masa pemerintahan Belanda. Beberapa kelompok-kelompok yang menyadarinya kemudian menerima tujuan-tujuan politik (dan perang) yang diprogramkan Jepang seperti disiplin, kepercayaan pada diri sendiri, idealisme, pemikiran patriotik dan sifat-sifat inilah yang menjadi modal untuk mencapai kemerdekaan. Sebenarnya tujuan-tujuan politik yang menjadi dasar pemberian kurikulum yang digunakan di sekolah-sekolah tidak secara langsung diberikan untuk membantu masyarakat (rakyat) mencapai kemerdekaan. Tujuan penerapan kurikulum pendidikan yang bersifat vokasional (militeristik dan propaganda) itu dimaksudkan sebagai upaya Jepang agar mendapat bantuan dan dukungan perang melawan sekutu.

Sebagai langkah awal, Jepang melatih guru-guru agar memiliki keseragaman pengertian tentang maksud dan tujuan pemerintahannya. Materi pokok seperti (1) Indoktrinasi ideologi *Hakko Ichiu*; (2) *Nippon Seisyin*, yaitu latihan kemiliteran dan semangat Jepang; (3) Bahasa, sejarah dan adat-istiadat Jepang; (4) Ilmu bumi dengan perspektif geopolitis; serta (5) Olahraga dan nyanyian Jepang. Sementara untuk pembinaan kesiswaan, Jepang mewajibkan bagi setiap murid sekolah untuk rutin melakukan beberapa aktivitas berikut ini: (1) Menyanyikan lagi kebangsaan Jepang,

Kimigayo setiap pagi; (2) Mengibarkan bendera Jepang, Hinomura dan menghormati Kaisar Jepang, Tenno Heika setiap pagi; (3) setiap pagi mereka juga harus melakukan Dai Toa, bersumpah setia kepada cita-cita Asia Raya; (4) Setiap pagi mereka juga diwajibkan melakukan Taiso, senam Jepang; (5) Melakukan latihan-latihan fisik dan militer; (7) Menjadikan bahasa Indonesia sebagai pengantar dalam pendidikan. Bahasa Jepang menjadi bahasa yang juga wajib diajarkan.³

Secara umum, Jepang mencoba menerapkan format pendidikan yang mengakomodasi kurikulum berorientasi lokal. Sekalipun patut dicatat bahwa pada menjelang akhir masa pendudukannya, ada indikasi kuat Jepang untuk menerapkan sistem Nipponize kembali, yakni dengan dikerahkannya *Sendenbu* (propagator Jepang) untuk menanamkan ideologi yang diharapkan dapat menghancurkan ideologi Indonesia Raya.⁴

Jadi secara tidak langsung peran dan fungsi pendidikan yang diselenggarakan Jepang telah menumbuhkan kesadaran dan pemahaman yang tertanam secara mendalam di alam bawah sadar murid-murid sekolah tentang nasionalisme dengan patriotisme. Pemahaman tersebut menjalar dan menjadi tenaga penggerak yang berasal dari dalam dirinya untuk melakukan suatu gerakan. Motif-motif⁵ yang

³ <http://peziarah.wordpress.com>, **Pendidikan Di Jaman Pendudukan Jepang**. Dipublikasikan 5 Februari 2007 dan akses 28 Januari 3008

⁴ *Ibid.*

⁵ Motif merupakan suatu pengertian yang melingkupi semua penggerak, alasan atau dorongan dalam diri manusia yang menyebabkan ia berbua sesuatu. Lihat W.A. Gerungan, **Psikologi Sosial**, (Bandung: PT. Rafika Aditama, 2004), hlm. 151.



mendasarinya sebenarnya adalah motif sosiogenetis.⁶ Berdasarkan motif tersebut, alih teknologi kebudayaan dari Jepang membuat mereka untuk melakukan pergerakan untuk mencapai kemerdekaan bahkan untuk melawan Jepang sendiri dikemudian hari.

Pergerakan-pergerakan yang terbangun dan terjalin dari waktu ke waktu kemudian menjadi sistematis dan terprogram. Dari sinilah awal mulanya terbangun pemikiran nasionalis dan patrioti dengan metode pergerakan yang lebih rapi, lebih hidup dan lebih meyakinkan. Persiapan-persiapan menuju terwujudnya cita-cita kemerdekaan terus digalang baik secara lokal di Makassar maupun secara nasional hingga masa pendudukan Jepang berakhir dan di proklamirkannya kemerdekaan Republik Indonesia.

Dan yang paling penting peranannya di sini di luar pendidikan sekolah dalam kaitannya dengan gerakan nasionalisme adalah dibukanya kursus politik bagi pemuda yang memiliki kecerdasan yang memadai. Alumnus kursus politik ini kemudian memegang dan memainkan peran penting bagi gerakan nasionalisme di Makassar bahkan di Sulawesi Selatan.

B. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Terhadap Perkembangan Pendidikan

Pada awalnya masyarakat sangat bersemangat untuk ikut serta dalam dunia pendidikan yang diselenggarakan Jepang karena banyaknya kemudahan-kemudahan yang diberikan, namun pada akhirnya mereka harus meninggalkan bangku sekolah.

⁶ Motif sosiogenetis adalah motif-motif yang dipelajari orang dan berasal dari lingkungan kebudayaan tempat orang itu berada dan berkembang. Motif ini berkembang berdasarkan interaksi sosial dengan orang-orang atau hasil kebudayaan orang. *Ibid.*, hlm. 154.

Kendalanya adalah keadaan ekonomi masyarakat yang sedang “morat-marit”. Untuk membantu membangun ekonomi keluarga, murid-murid sekolah ikut orang tua bekerja dibanding belajar di sekolah. Dengan kondisi ruang-ruang kelas di sekolah banyak yang kosong, guru-guru pun ikut tidak mengajar.⁷ Padahal pada saat itu masyarakat sudah mulai menyadari pentingnya pendidikan bagi anak-anak mereka, apalagi bagi masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan seperti halnya Makassar.

Di sekolah juga, kesempatan murid-murid untuk mendapatkan pendidikan sangat terbatas, karena sistem pendidikan yang diselenggarakan Jepang adalah sistem pendidikan yang bersifat vokasional dibanding pendidikan yang bersifat akademis. Dari padatnya aktivitas yang dilakukan murid di sekolah sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai dapat dipastikan waktu murid untuk belajar di kelas sangat terbatas. Belum lagi kondisi fisik yang butuh istirahat semakin menghambat murid-murid sekolah untuk dapat menyerap materi pelajaran dengan baik. Murid-murid yang tidak datang ke sekolah pun tidak mendapat teguran sama sekali dari majelis guru, karena mereka tidak berdaya sama sekali.⁸ Belum lagi mutu pelajaran yang diajarkan jauh lebih rendah dibanding pada masa pemerintahan Belanda.

Padatnya aktivitas murid di sekolah sebelum pelajaran dimulai dapat digambarkan seperti ini : setiap pagi sebelum kegiatan belajar dimulai, semua murid harus berkumpul di halaman sekolah untuk mengikuti senam pagi yang disebut *Taiso*

⁷ Suhardin, Tjenne, Pendudukan Jepang Di Malimpung Tahun 1942-1945, (Makassar: Skripsi Jurusan Ilmu Sejarah Unhas, 1991), hlm. 38.

⁸ <http://www.pakguruonline.pendidikan.net/sjh-pendidikan-sumatera-barat.rtf> , Sejarah Pendidikan Sumatera Barat; Bab VI Pendidikan Zaman Jepang Dan Indonesia Merdeka, diakses 8 Januari 2008.

dengan diiringi irama lagu yang disiarkan radio secara sentral. Terdapat tiga jenis tahapan senam yang disebut dengan *Dai Ichi Dai Ni* dan *Dai San* (artinya senam I, senam II dan senam III). Ketiga jenis tahapan ini berlangsung sekitar 30 menit. Selesai senam seluruh murid berkumpul di bangsal untuk mengikuti upacara ala militer dengan aba-aba dalam bahasa Jepang. Acara pertama dimulai dengan menyanyikan lagu kebangsaan Jepang, *Kimigayo*. Sesudah selesai para murid bersama-sama mengucapkan "Ikrar Siswa". Selesai membaca ikrar, seluruh murid beserta para *sensei*-nya harus menghadap ke arah ibu kota Jepang, Tokyo. Dengan aba-aba bahasa Jepang selanjutnya semua *Seikerei*. Caranya ialah membungkukkan badan seperti orang yang sedang rukuk di dalam salat. Yang dihormat dengan gerakan ini adalah pucuk pimpinan Kerajaan Jepang yang tiada lain adalah Kaisar Teno Haika. Tiap-tiap dua minggu sekali murid-murid diharuskan *kendrohoshi* (kerja bakti) dengan membersihkan halaman dan menata lingkungan sekolah, mencangkul kebun untuk ditanami jagung, ubi, singkong, kaliki (jarak) dan lain-lain.⁹

Kendala selanjutnya adalah campur tangan dan pengawasan terhadap sekolah yang dikelola swasta terlalu berlebihan. Untuk pendidikan yang dikelola swasta, baik itu sekolah yang dikelola oleh Muhammadiyah, Zending, maupun Misi Katolik mendapat pengawasan yang ekstra ketat dan bahkan ditutup. Padahal ketiga lembaga yang masing-masing mewakili kelompok agama masing-masing dan memainkan perannya yang cukup dominan di kota Makassar. Muhammadiyah mendapat

⁹ Djoko Widodo, Zaman Jepang Dan Murid Sekolah, <http://www.pikiran-rakyat.com>, Edisi 24 Agustus 2005. Diakses 28 Januari 2008.

pengawasan yang ekstra ketat dalam menyelenggarakan pendidikan, organisasi pemudanya dibubarkan, dan peralatan sekolahnya dirusak. Walaupun pada akhirnya sikap Jepang mulai meludak setelah menyadari kemungkinan dampak yang ditimbulkannya. Sikap Jepang itu ditunjukkan dengan mendatangkan ulama "Jepang" dari Tokyo yang bernama H. Umar Faisal. Bersama dengan H. Umar Faisal, Muhammadiyah kemudian membuka sekolah khusus pendidikan agama Islam dengan nama *Kai Kio Gaku In* pada tahun 1944. Bukan hanya itu, peranan H. Umar Faisal dalam kehidupan agama khususnya agama Islam di Sulawesi Selatan kuat. Dialah yang banyak memberikan kebijakan-kebijakan terutama dalam kaitannya dengan "hukum" Islam.

Terhadap Zending dan Misi Katolik semua sekolah-sekolahnya dibekukan dan guru-gurunya ditawan dengan alasan gerakan spionase ataupun pro Belanda. Sekolah-sekolah yang dibiarkan melanjutkan aktifitasnya hanya sekolah-sekolah yang bersedia menerima syarat-syarat dan peraturan yang ditawarkan Jepang.

Kendala lainnya adalah adanya gerakan *sikerei* yang diberlakukan kepada murid-murid sekolah. Bagi orang tua yang beragama Islam yang fanatik tindakan semacam itu dianggap sebagai tindakan sirik, sehingga melarang anak-anaknya masuk sekolah atau menyuruhnya berhenti sama sekali terutama yang masuk sekolah Muhammadiyah.

Dibanding dengan masa pendidikan zaman Belanda, pendidikan formal pada masa pendudukan Jepang sesungguhnya mengalami kemunduran, walaupun

masyarakat diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk menuntut pendidikan.

Kendala-kendala utama yang dihadapi adalah :

1. Adanya kekacauan pada sendi-sendi kehidupan sosial maupun ekonomi masyarakat, karena fokus perhatian Jepang lebih tertuju pada perang melawan sekutu, sehingga lembaga pendidikan lebih diarahkan untuk mendukung perang yang sementara dijalani.
2. Campur tangan yang amat ketat dan tidak memberikan kesempatan yang luas kepada pihak swasta untuk membantu pemerintah mengurus dan memajukan dunia pendidikan.
3. Sikap kejam Jepang yang sering diperlihatkan oleh tentara Jepang memberikan kesan kepada masyarakat bahwa pemerintah baru itu bukanlah "saudara tua", sebagaimana yang dipropagandakan pada masa-masa awal kedatangannya.¹⁰

C. Dampak Pendidikan Terhadap Kehidupan Sosial Masyarakat

Dari segi dampak sosialnya, pendidikan tidak banyak memberi pengaruh yang berarti. Dampak sosial yang paling dirasakan masyarakat dari pendidikan adalah semangat anti feodal yang dibuktikan dengan penyeragaman semua jenis sekolah tingkat dasar menjadi satu dengan lama studi 6 tahun, sehingga masyarakat merasa diperlakukan sama tanpa ada sekat-sekat sosial yang memisahkannya. Walaupun dari segi hierarki pemerintahan masih dipertahankan karena pertimbangan politis. Jika

¹⁰Suhardin Tjenne, *Ibid*.

pada masa pemerintahan Belanda, salah satu tujuan diselenggarakannya pendidikan sekolah dimaksudkan untuk mendapatkan pegawai dan tenaga birokrasi dengan gaji yang murah, maka pada masa pendudukan Jepang dimaksudkan untuk mendukung Jepang dalam perang pasifik.

Munculnya kaum intelektual sebagai golongan sosial baru yang hadir di tengah-tengah masyarakat juga merupakan dampak sosial dari pendidikan sekolah. Bahkan keberadaan guru sangat dihormati oleh masyarakat dan kadang-kadang mereka dijadikan solutor atas rumitnya permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat sehari-hari.

Selain itu, kedudukan guru selaku pegawai pemerintah sangat dihormati. Hal ini terjadi karena yang menjadi kepala sekolah *Cu Gakko* (dulu MULO) adalah Dr. Herota yang didatangkan dari Tokyo dan kepadanya diberikan pangkat militer, yakni Kolonel Tituler. Padahal di Makassar sendiri pada waktu itu, jabatan militer Jepang yang tertinggi Cuma Kolonel. Dampaknya psikologisnya terhadap guru-guru adalah mereka ikut dihormati oleh militer Jepang. Penghidupan guru juga sedikit lumayan dengan gaji yang memadai termasuk menerima uang baru (Yen) sebagai alat pembayaran yang sah.¹¹

D. Dampak Pendidikan Terhadap Budaya Lokal

¹¹ Lihat Mardanas Safwan dan Sutrisno Kuntoyo (ed)., Sejarah Pendidikan Sulawesi Selatan, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Sulawesi Selatan), hlm. 101.

Dapat dikatakan bahwa ada semacam usaha tersembunyi Jepang selama masa pendudukan untuk men-Jepangkan bangsa Indonesia melalui materi pengajaran yang diberikan di sekolah. Pemberian pengetahuan tentang budaya Jepang maupun implementasi melalui pendidikan yang bersifat militeristik. Apa yang diajarkan di sekolah dengan mudah dapat diserap oleh murid.

Implementasi budaya (militer) Jepang seperti pelajaran wajib tentang huruf (Katakana, Hiragana dan Kanji) dan bahasa Jepang, pengetahuan budaya Jepang, murid sekolah dengan model rambut yang dicukur gundul dan memakai topi anyaman yang terbuat dari bahan tikar, kegiatan *kendorosi*, *sikerei*, *taiso: dai ichi dai ni* dan *dai san*, menyanyikan lagu *Kimigayo* dan *Nippon no Uta*, baris-berbaris dan lain-lain sangat memengaruhi budaya lokal dalam hal ini budaya masyarakat Bugis Makassar. Bahkan hingga sekarang hasil adopsi budaya tersebut masih bisa dilihat dan dirasakan seperti budaya kerja bakti, upacara sebelum masuk sekolah dan kantor setiap hari Senin, anak-anak sekolah memakai topi sekolah dan lain sebagainya.

Dari segi penggunaan bahasa Indonesia, Jepang sangat berjasa dalam memasyarakatkan bahasa Indonesia di Makassar hingga pelosok-pelosok daerah di Sulawesi Selatan. Adanya larangan dan hukuman penggunaan bahasa Belanda baik di sekolah maupun di tempat-tempat umum bagi masyarakat ikut mempercepat penggunaan bahasa Indonesia di kalangan masyarakat di Makassar. Dengan berkembangnya bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, rasa persatuanpun dengan mudah dapat digalang dan dibina dengan baik di tengah masyarakat, karena sekarang mereka dengan mudah dan dimengerti orang lain untuk mengemukakan

perasaan dan buah pikirannya. Dengan dijadikannya bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi, keuntungan bukan saja dalam pengembangan bahasa itu saja, tetapi dapatnya dibina kesatuan bangsa dengan cepat, suatu kondisi yang diperlukan dalam mencapai Indonesia merdeka. Dengan demikian bahasa daerah tetap berfungsi sebagai perantara bagi guru dan murid dalam proses belajar mengajar di kelas. Penggunaan bahasa Indonesia juga semakin intensif dilakukan oleh masyarakat.

BAB V

KESIMPULAN

Pendidikan di Makassar pada masa pendudukan Jepang justru perkembangannya mengalami stagnasi bila dibandingkan dengan pendidikan pada masa pemerintahan Belanda. Hanya saja kelebihanannya terletak pada sistem pendidikan dikelolanya lebih terbuka dan tidak diskriminatif. Malah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mendapatkan pendidikan. Berbeda dengan model pendidikan yang diterapkan Belanda yang terbatas dan diskriminatif berdasarkan golongan, suku dan ras.

Dari segi sebaran sekolah, tidak banyak perubahan yang terjadi, karena Jepang hanya melanjutkan pendidikan yang ditinggalkan Belanda kecuali beberapa pembukaan sekolah non formal yang dikhususkan buat pemuda untuk kepentingan perang Jepang melawan sekutu seperti *Heiho*, *Seinedang*, PETA, PUTERA, *Keibondang* dan lain sebagainya. Akan tetapi di sisi lain banyak juga sekolah-sekolah swasta yang ditutup seperti sekolah yang dikelola oleh Muhammadiyah, Zending dan Misi Katolik. Dari berbagai jenis sekolah yang telah dipetakan menurut tingkatannya, hanya diganti namanya dengan nama Jepang, begitu juga dengan masa studinya.

Sementara kurikulum yang digunakan justru mengalami perubahan yang sangat signifikan. Dari segi kurikulum semua pengaruh Belanda dihapus dan diganti dengan kurikulum yang bersifat vokasional (militeristik dengan propaganda). Begitu

juga dengan buku-buku yang berbahasa Belanda dilarang digunakan di sekolah, jadi usaha yang ditempuh adalah mentransilasikan buku-buku yang berbahasa Belanda ke dalam bahasa Melayu (Indonesia). Bahkan apabila ditemukan murid-murid dan guru yang menggunakan bahasa Belanda di sekolah dan di tempat umum maka akan mendapat hukuman. Pengenalan huruf (katakana, hiragana, dan kanji) dan penggunaan bahasa Jepang menjadi pelajaran wajib di sekolah. Sedangkan bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa pengantar di sekolah dan di kantor-kantor pemerintah.

Jika dilihat dari penerapan kurikulum yang digunakan di sekolah dapat dengan mudah disimpulkan bahwa ada semacam usaha Jepang untuk meng-Jepangkan bangsa Indonesia termasuk di Makassar. Dominannya pengetahuan tentang Jepang yang diajarkan di sekolah-sekolah merupakan salah satu maksud dari usaha tersebut.

Walaupun penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan oleh Jepang sangat singkat dan mengalami stagnasi, akan tetapi memberi pengaruh dan dampak yang signifikan terhadap masyarakat di Makassar. Pengaruhnya dapat dilihat pada munculnya gerakan-gerakan pro nasional-lokal yang lebih percaya diri dengan pola pikir yang lateral (pemanfaatan peluang) dalam usaha untuk mencapai kemerdekaan. Satu hal yang menjadi sangat penting dari dampak pendidikan terhadap budaya di Makassar adalah membantu memasyarakatkan penggunaan bahasa Indonesia hingga ke pelosok-pelosok sehingga dengan adanya penggunaan bahasa yang seragam

sebagai bahasa persatuan menyebabkan dengan mudah tokoh-tokoh pergerakan lokal dalam menjalin hubungan dengan tokoh-tokoh pergerakan di Jawa.

Kemudian dampaknya terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat terletak pada penyerapan budaya Jepang ke dalam sistem sosial budaya masyarakat di Makassar. Bahkan penyerapan budaya itu masih dapat dilihat hingga sekarang. Penyerapan budaya yang dimaksud antara lain budaya disiplin, upacara bendera, kerja bakti, murid-murid sekolah digundul dengan memakai topi, dan lain sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asba. A. rasyid (ed.), Katalog Sejarah Lisan Jepang Di Sulawesi Selatan, (Makassar: Diterbitkan oleh Pusat Kajian Multikultural dan Pengembangan Regional, Divisi Ilmu-ilmu Sosial dan Humaniora, Pusat Kegiatan Penelitian Universitas Hasanuddin bekerja sama dengan *Centre for Documentation and Area-Transcultural Studies (C-DATS)*, Tokyo University of Foreign Studies, 2007)
- Bosch. Amry van den,
1941 The Dutch East Indies: Its Government, Politics, and Problems, (Berkeley: Berkeley University Press)
- Dhofier. Zamakhsyari,
1982 Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kiai, (Jakarta: LP3ES)
- Ensiklopedia Sejarah Sulawesi Selatan Sampai Tahun 1905
- Furnivall. J.S.,
1943 Educational Progress in Southeast Asia, (New York: International Secretariat Institute at Pacific Relations)
- Gerungan. W.A.,
2004 Psikologi Sosial, (Bandung: PT. Rafika Aditama)
- Gunawan, Ary H.,
1986 Kebijakan-Kebijakan Pendidikan di Indonesia, (Jakarta: Bina Aksara)
- Harvey. Barbara Sillars,
1989 Pemberontakan Kahar Muzakkar Dari Tradisi Ke DI/TII, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti)
-
? Sulawesi Selatan: Boneka dan Patriot, (Kota Penerbit?, Penerbit ?)



- Kartodirjo. Sartono,
1992 Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah, (Jakarta: Gramedia Pustaka utama)
- Lembaran negara RI Tahun 1971 No. 65, tambahan Lembaran Negara No. 2970
- Mangemba, H.D.,
1972 Kota Makassar Dalam Lintasan Sejarah, (Makassar: Lembaran Sejarah Fakultas Sastra Unhas)
- Matata. Sanusi Dg.,
1977 Luwu Dalam Revolusi, (Ujung Pandang: Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan Tenggara)
- Mattulada,
1995 Latoa: Satu Lukisan Analitis Terhadap Antropologi Politik Orang Bugis, (Ujung Pandang: Hasanuddin University Press)
- M.D. Sagimun,
1985 Perlawanan Rakyat Indonesia Terhadap Fasisme Jepang, (Jakarta: Inti Idayu Press)
- Nasution S., Prof. Dr. M.A.,
2001 Sejarah Pendidikan Indonesia, (Jakarta: PT. Bumi Aksara)
- NN,
1954 Pedoman Kota Besar Makassar, (Makassar: Tri Bakti)
- Noorduyn. J.,
1995 Asal Mula Historiografi di Sulawesi Selatan dalam Soedjatmoko, dkk. Historiografi Indonesia, (Jakarta: Gramedia).
- Paeni. Mukhlis, dkk.,
1985 Batara Gowa: Messianis Dalam Gerakan Sosial Di Tanah Makassar, (Ujung Pandang: Belum Diterbitkan)
- Pawiloy. Sarita, dalam Muhammad Abduh dkk,
1984 Sejarah Perlawanan Terhadap Imperialisme Dan Kolonialisme Di Sulawesi Selatan, (Direktorat Sejarah Dan Nilai Tradisional)
- Poesponegoro. Marwati Djoened, dkk.,
1984 Sejarah Nasional Jilid VI, (Jakarta: PN. Balai Pustaka)

- Pradadimara. Dias,
200... Sejarah Kota, Warga Kota, Dan Penduduk Kota: Kisah Makassar,
(?)
- Reid. Anthony dan David Merr, (ed.),
1992 Asia Tenggara Dalam Kurun Niaga 1450-1680 Jilid I, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1992).
- Ricklefs, M.C.,
1995 Sejarah Indonesia Modern, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press)
- Safwan. Mardanas, dan Sutrisno Kuntoyo (ed).,
1981 Sejarah Pendidikan Sulawesi Selatan, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Sulawesi Selatan)
- Sahabuddin,
1985 Pendidikan Non Formal (Ujung Pandang : IKIP Ujung Pandang)
- Soewandono. Soetinah,
1970 Pendidikan Nasional II (Indonesia), (Makassar: Batu Putih)
-
1976 Pengantar Ilmu Pendidikan, (Ujung Pandang: IKIP Ujung Pandang)
- Soedjatmoko, dkk.,
1995 Historiografi Indonesia, (Jakarta: Gramedia).
- Vastenhouw M.,
1964 Inleiding tot de Voor Oorlogsche Paedagogische Problemer in Indonesia, (Groningen: J.B. Wolter)
- Wowor. Ben, dkk.,
1993 Drs. H.R. Ticoalu: Sebuah Biografi, Profil Seorang Abdi Masyarakat. (Manado: Yayasan Drs. H.R. Ticoalu)
- Zed. Mestika,
1991 Pendidikan Kolonial dan Masalah Distribusi Ilmu Pengetahuan: Suatu Perpektif sejarah, dalam SEJARAH, Pemikiran, Rekonstruksi, Perspepsi I (Jakarta: MSI-Gramedia)

Mukhlis Paeni, Dkk.,

1984-1985 Sejarah Sosial Daerah Sulawesi Selatan Mobilitas Sosial Di Kota Makassar 1900-1950. (Jakarta: DPdK, 1984/1985)

Disertasi, Tesis, Skripsi, Makalah Dan Majalah

Cense, A.A.,

1966 Old Buginese And Macassarese Diaries. (Bijdragen tot de Taal, Land, en Volkenkunde van Nederland-Indie, Vol. 122)

Majalah Indonesia Tahun III No. 1 Tahun 1976

Majalah Makassar Terkini, Tahun 02 Edisi 33, April 2006.

Mc Taggart. W. Donald.,

?

Kebijaksanaan Pembangunan Kota Di Indonesia: Kasus Ujung Pandang, Sulawesi Selatan dalam Majalah Planning Review, di terjemahkan oleh Meutia Swasono Hatta. untuk Majalah Indonesia Tahun III No. 1 Tahun 1976

Noorduyn J.,

1993 Variation In The Bugis Makassar Script, dalam *BKI*, Deel 149.

Randan. Sarnice,

2004

Migrasi Orang Toraja Ke Kelurahan Paropo Kecamatan Panakukang Kotamadya Makassar Tahun 1950-1980 (Suatu Tinjauan Historis). (Maassar: Skripsi Jurusan Ilmu Sejarah Unhas)

Sarkawi,

1997

Perkembangan Pendidikan Kolonial di Makassar, 1876-194. (Yogyakarta: Tesis Universitas Gadjah Mada)

Sumalyo. Yulianto,

2002

Pola Perkembangan Kota dan Arsitektur Ujung Pandang. (Makassar: Jurusan Teknik Arsitektur Unhas)

Suryo. Djoko.,

1996

Pendidikan, Diferensiasi Kerja & Pluralisme Sosial: Dinamika Sosial Ekonomi 1900-1990, Makalah disampaikan pada Kongres Sejarah Nasional Indonesia di Jakarta, Tanggal 12-15 Nopember.

Tjenne. Suhardin,
1991 Pendudukan Jepang Di Malimpung, (Makassar: Skripsi Jurusan Ilmu Sejarah Unhas)

Zainal,
2003 Perkembangan Kantor Pos Besar Makassar 1945-'1997, (Makassar: Skripsi Jurusan Ilmu Sejarah Unhas)

Arsip

Algemeen Verslag van het Inlandsch Onderwijs in Nederlandsch-Indie, 1910. 1912. Batavia: Landsdrukkerij.

Algemeen Verslag van het Onderwijs in Nederlandsch-Indie, 1936-1937 (AVVO). 1939. Weltevreden: Landsdrukkerij.

Algemeen Verslag van het Inlandsch Onderwijs in Nederlandsch-Indie over het Schooljaar 1930/1931. 1933. Weltevreden: Landsdrukkerij.

Arsip Nasional RI No. 4,
1988 Di Bawah Pendudukan Jepang, Kenangan Empat Puluh Dua Orang Yang Mengalaminya, Jakarta.

Arsip Nasional RI (Bundel Makassar) No. 10/11,
Algemeen Verslag van het Gouvernement celebes en Onderhoorigheden over het Jaar 1879 No. 132/1.

Arsip Nasional RI (Bundel Makassar) No. 10/10,
Algemeen Verslag van het Celebes en Onderhoorigheden over het Jaar 1879 (AVvCO).

Encyclopaedie van Nederlandsch Indie (END). 1919. s-Gravenhage Martinus Nijhoff, Leiden: E.J. Brill.

Indische Gids, Jilid II, 1885

Koloniaal Verslag, 1880, 1882, 1887-1891, 1910-1927.

Staatsblad van Nederlandsch-Indie, 1880 No. 77.

Staatsblad van Nederlandsch-Indie, 1885 No. 189.

Staatsblad van Nederlandsch-Indie, 1893 No. 125.

Internet

- Djoko Widodo, **Zaman Jepang Dan Murid Sekolah**, <http://www.pikiran-rakyat.com>, Edisi 24 Agustus 2005 dan diakses 28 Januari 2008.
- <http://bappeda.makassar.go.id/index>, dipublikasikan 26 Desember 2006. Diakses 23 Januari 2008.
- <http://id.wikipedia.org/w/index/>, **Sejarah Indonesia (1942-1945)**, dipublikasikan 30 Desember 2007 dan diakses 28 Januari 2008.
- <http://www.indonesiaindonesia.com/f/2382-indonesia-era-jepang>, **Indonesian: Era Jepang**, dipublikasikan Desember 2006 dan diakses 28 Januari 2008.
- <http://masri'spersonalsite.mutiplay.com/sejarah-singkat-kota-makassar>, diakses 28 Januari 2008.
- <http://pakguruonline.pendidikan.net>, **Paradigma Pendidikan Masa Depan**, diakses 23 Januari 2008
- <http://peziarah.wordpress.com/2007/02/05/pendidikan-di-zaman-penjajahan-belanda> diakses 28 Januari 2008.
- <http://peziarah.wordpress.com/2007/02/05/pendidikan-di-zaman-pendudukan-jepang>, **Pendidikan Di Zaman Pendudukan Jepang**, diakses 25 Januari 2008.
- <http://yherlanti.wordpress.com/2008/01/11/perjalanan-kurikulum-pendidikan-di-indonesia-dari-masa-ke-masa/>, **Perjalanan Kurikulum Pendidikan Di Indonesia Dari Masa Ke Masa**, dipublikasikan 11 Januari 2008 dan diakses 22 Januari 2008.
- <http://sejarah.fib.ugm.ac.id/artikel/php>, dipublikasikan 13 Februari 2007 dan diakses 1 Februari 2008.
- <http://www.pakguruonline.pendidikan.net/sjh-pendidikan-sumatera-barat.rtf>
- <http://www.pakguruonline.pendidikan.net/sjh-pendidikan-sumatera-barat.rtf>, **Sejarah Pendidikan Sumatera Barat; Bab VI Pendidikan Zaman Jepang Dan Indonesia Merdeka**, diakses 8 Januari 2008.
- Sarkawi, **Dari Huruf Lontara Ke Latin, Pergeseran Pendidikan Tradisional Ke Kolonial Di Makassar** dalam <http://article.melayuonline.com> dipublikasikan 9 Agustus 2007 15:47 dan diakses 23 Januari 2008.

Soegijanto Padmo, Desentralisasi Pemerintahan Daerah Di Indonesia, dalam <http://sejarah.fib.ugm.ac.id/artikel/php>, dipublikasikan 13 Februari 2007 dan diakses 1 Februari 2008.

Sarkawi,
2007

Dari Huruf Lontara Ke Latin, Pergeseran Pendidikan Tradisional Ke Kolonial Di Makassar dalam <http://article.melayuonline.com> Edisi 09 Agustus. Diakses 23 Januari 2008.